



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

MEI 2020



VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara *emerging markets*"

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

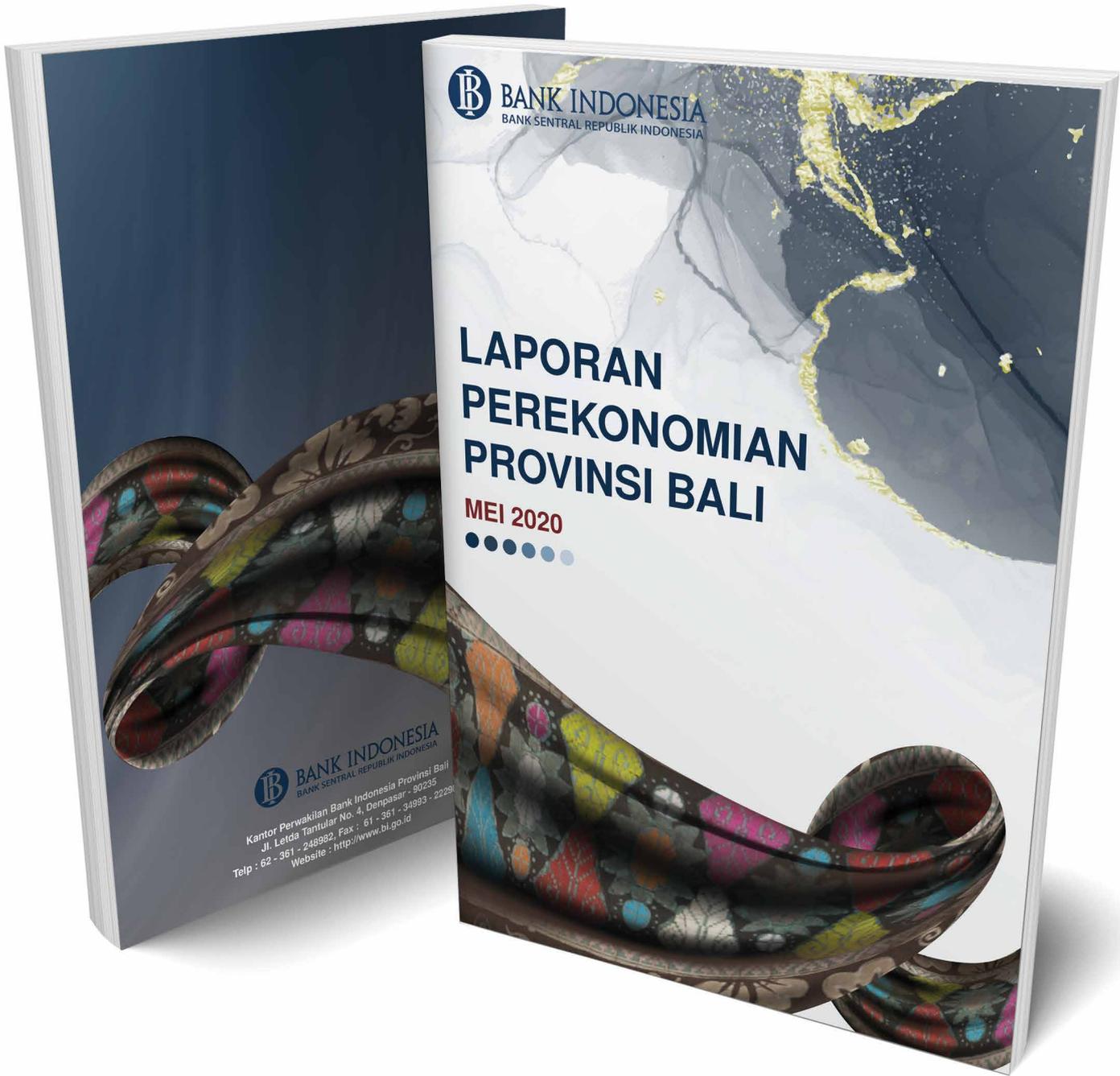
"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

... Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat. . .

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

MEI 2020



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Jl. Letda Tuntular No. 4, Denpasar - 90235
Telp : 62 - 361 - 249982, Fax : 61 - 361 - 34993 - 22291
Website : <http://www.bi.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2020 ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Provinsi Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai Rupiah. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Berbagai kajian dilakukan Bank Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap dinamika perekonomian daerah. Diseminasi hasil kajian juga terus dilakukan kepada seluruh *stakeholders* terkait guna mendorong kemajuan perekonomian daerah.

Laporan Perekonomian Provinsi Bali, kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, disusun untuk memaparkan berbagai data dan informasi mengenai perekonomian daerah Bali kepada seluruh pihak terkait. *Stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Bali di masa depan. Kami berharap akan munculnya ide-ide kreatif dan konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian - kajian lebih lanjut.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini masih jauh dari sempurna. Berbagai saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas dari kajian ini. Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Denpasar, 12 Juni 2020

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Trisno Nugroho
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvi
TABEL INDIKATOR TERPILIH	xx

01

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

	1
1.1. KONDISI UMUM	2
1.2. KINERJA PEREKONOMIAN BALI	2
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI	
SISI PERMINTAAN	4
1.3.1. Konsumsi	4
1.3.2. Investasi	5
1.3.3. Ekspor Barang dan Jasa	7
1.3.4. Impor Barang dan Jasa	8
1.4. SISI PENAWARAN	9
1.4.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	10
1.4.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11
1.4.3. Lapangan Usaha Konstruksi	12
1.4.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	13
1.4.5. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	13

02

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 21

2.1. GAMBARAN UMUM 22

2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH WILAYAH BALI 22

2.3. APBD PROVINSI BALI 24

2.3.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali 25

2.3.2. Realisasi Belanja dan Transfer di Provinsi Bali 27

2.4. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH BALI 28

2.4.1. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 28

2.4.2. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 28

2.4.3. Pagu Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 31

2.4.4. Realisasi Belanja Gabungan Kabupaten/Kota 31

2.4.5. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali 31

03

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 35

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI 36

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI 38

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa 38

3.2.2. Inflasi Menurut Kota 42

3.3. INFLASI PERDESAAN 44

3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI 44

BAB V**PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
UANG RUPIAH****65****5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN****DI BALI****66**

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai 66

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar
(Inflow/Outflow) 66

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 66

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai 67

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) 67

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG 68

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM**PEMBAYARAN****68**5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan
Uang Tidak Asli 685.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)
di Provinsi Bali 70

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali 70

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai
dan Elektronifikasi 73**04****BAB IV****STABILITAS KEUANGAN DAERAH
PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
DAN UMKM****51****4.1. KINERJA INTERMEDIASI PERBANKAN** 52

4.1.1. Dana Pihak Ketiga 52

4.1.2. Penyaluran Kredit 52

**4.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI
NONKEUANGAN** 53

4.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi 53

4.2.2. Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi 54

4.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi Nonkeuangan 54

4.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA 55

4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga 55

4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga 55

4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga 56

4.3.3.1. Penyaluran Kredit Kepemilikan
Rumah dan Apartemen (KPR dan KPA) 574.3.3.2. Penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan
Bermotor dan Multiguna 57**4.4. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
DAN UMKM** 58

4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM 58

06

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan di Bali

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali

6.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

79

80

80

84

84

85

85

85

86

07

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan

III 2020

7.1.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2020

7.1.3. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

7.2. PROSPEK INFLASI BALI

7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan III 2020

7.2.2. Perkiraan Inflasi 2020

DAFTAR ISTILAH

93

94

94

95

97

97

97

98

100

BOKS

BOKS 1 ANALISIS POTENTIAL *IMPACT* PANDEMI

COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN BALI DENGAN

MENGGUNAKAN *COMPUTABLE GENERAL*

EQUILIBRIUM MODEL

16

BOKS 2 SINERGI PENGENDALIAN INFLASI BALI

MENJELANG HBKN DI ERA COVID-19

48

BOKS 3 ANALISIS DAMPAK *SHOCK* PDRB

TERHADAP RISIKO KREDIT

DI PROVINSI BALI

60

BOKS 4 STRATEGI PENGEMBANGAN *CONTACTLESS*

DIGITAL PAYMENT DI ERA *NEW NORMAL*

76

BOKS 5 PENGENDALIAN RISIKO KEMISKINAN BALI DI

TENGAH PANDEMI COVID-19

88

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1. Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional	2	Grafik I.38. <i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	13
Grafik I.2. Pangsa Ekonomi Bali Terhadap Nasional	2	Grafik I.39. Perkembangan Kedatangan Penumpang Bandara Ngurah Rai	14
Grafik I.3. Hasil Survei Konsumen	4	Grafik I.40. Perkembangan Kegiatan Usaha Transportasi	14
Grafik I.4. Hasil Survei Penjualan Eceran	4	Grafik I.41. Kedatangan Kargo Domestik di Bandara Ngurah Rai	14
Grafik I.5. Perkembangan Kredit Konsumsi	5	Grafik II.1. Komposisi Realisasi PAD Provinsi Bali 2020	26
Grafik I.6. Perkembangan Impor Barang Konsumsi	5	Grafik II.2. Komposisi Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bali 2020	26
Grafik I.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	5	Grafik II.3. Serapan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Bali Per Triwulan (2015-2020)	28
Grafik I.8. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kab/Kota di Bali	5	Grafik II.4. Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Provinsi Bali (2016-2020)	28
Grafik I.9. Perkembangan Realisasi Belanja Modal APBD Provinsi Bali	6	Grafik II.5. Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	29
Grafik I.10. Perkembangan Realisasi Belanja Modal APBN di Bali	6	Grafik II.6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	29
Grafik I.11. Perkembangan Realisasi PMDN	6	Grafik II.7. Serapan Belanja 9 Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020	32
Grafik I.12. <i>Likert</i> Investasi, Liaison	6	Grafik III.1. Inflasi Kota di Bali (%yoy)	36
Grafik I.13. Perkembangan Kredit Investasi	6	Grafik III.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (%yoy)	36
Grafik I.14. Perkembangan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Ngurah Rai	7	Grafik III.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	37
Grafik I.15. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	7	Grafik III.4. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	37
Grafik I.16. Jumlah Kedatangan Penumpang Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang	7	Grafik III.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	37
Grafik I.17. Perkembangan Ekspor Barang Bali	7	Grafik III.6. Perkembangan Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg)	38
Grafik I.18. <i>Likert Scale</i> Penjualan Ekspor	8	Grafik III.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	38
Grafik I.19. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	8	Grafik III.8. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	38
Grafik I.20. Pertumbuhan Nilai Ekspor 3 Negara Tujuan Utama	8	Grafik III.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	38
Grafik I.21. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama	8	Grafik III.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali	38
Grafik I.22. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	8	Grafik III.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali	39
Grafik I.23. Perkembangan Kedatangan Kargo Internasional di Bandara Ngurah Rai	9	Grafik III.12. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali	39
Grafik I.24. Perkembangan Impor Barang Konsumsi	9	Grafik III.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	39
Grafik I.25. Perkembangan Impor Barang Setengah Jadi	9	Grafik III.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	39
Grafik I.26. Perkembangan Impor Barang Modal	9	Grafik III.15. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali	39
Grafik I.27. Kedatangan Penumpang di Bandara Ngurah Rai	10	Grafik III.16. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali	39
Grafik I.28. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan 3 Negara Utama	11		
Grafik I.29. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang	11		
Grafik I.30. Perkembangan Kegiatan Usaha Akmamin	11		
Grafik I.31. Perkembangan Produksi Padi	12		
Grafik I.32. Nilai Tukar Petani	12		
Grafik I.33. Perkembangan Kegiatan Usaha Pertanian	12		
Grafik I.34. Perkembangan Kredit Konstruksi	12		
Grafik I.35. Perkembangan Penjualan Semen	12		
Grafik I.36. Perkembangan Kegiatan Usaha Konstruksi	13		
Grafik I.37. Perkembangan Kegiatan Usaha Perdagangan	13		

Grafik III.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,qtq)	40	Grafik IV.13. Indeks Keyakinan Konsumen	56
Grafik III.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,yoy)	40	Grafik IV.14. Ketersediaan Dana Cadangan	56
Grafik III.19. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,qtq)	40	Grafik IV.15. Pertumbuhan Kredit Konsumsi	56
Grafik III.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,yoy)	40	Grafik IV.16. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	56
Grafik III.21. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,qtq)	41	Grafik IV.17. Pertumbuhan Kredit UMKM	58
Grafik III.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,yoy)	41	Grafik V.1. Pergerakan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , <i>Netflow</i> , Inflasi dan PDRB	67
Grafik III.23. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,qtq)	41	Grafik V.2. Rasio UTLE Terhadap <i>Inflow</i>	67
Grafik III.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,yoy)	41	Grafik V.3. Perkembangan Nominal Kliring di Bali	68
Grafik III.25. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,qtq)	41	Grafik V.4. Perkembangan Volume Kliring di Bali	68
Grafik III.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,yoy)	41	Grafik V.5. Perkembangan Nominal RTGS di Bali	68
Grafik III.27. Bobot Tahun Dasar (2018=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	42	Grafik V.6. Perkembangan Volume RTGS di Bali	68
Grafik III.28. Bobot Tahun Dasar (2018=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	42	Grafik V.7. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali	68
Grafik III.29. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% ,yoy)	43	Grafik V.8. Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali	69
Grafik III.30. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% ,mtm)	43	Grafik V.9. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	70
Grafik III.31. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	44	Grafik V.10. Perkembangan Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali	70
Grafik III.32. Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)	44	Grafik V.11. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	70
Grafik III.27. Bobot Tahun Dasar (2018=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	42	Grafik V.12. Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali	74
Grafik IV.1. Pertumbuhan DPK dan Komponennya	52	Grafik VI.1. <i>Job Vacancy Index</i>	80
Grafik IV.2. Suku Bunga Simpanan	52	Grafik VI.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	81
Grafik IV.3. Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaannya	52	Grafik VI.3. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	82
Grafik IV.4. Perkembangan Kredit Konsumsi dan Sk. Bunga Multiguna	53	Grafik VI.4. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	82
Grafik IV.5. Perkembangan LAR Sektoral	53	Grafik VI.5. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama	82
Grafik IV.6. Perkembangan NPL dan LAR Kredit di Bali	53	Grafik VI.6. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama	82
Grafik IV.7. Perkembangan LDR	53	Grafik VI.7. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal	83
Grafik IV.8. Skala <i>Likert</i>	54	Grafik VI.8. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal	83
Grafik IV.9. Kondisi Rentabilitas Korporasi	54	Grafik VI.9. Hasil SKDU Triwulan IV 2019	84
Grafik IV.10. Kondisi Likuiditas Korporasi	54	Grafik VI.10. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali	84
Grafik IV.11. NPL dan LaR Kredit Modal Kerja dan Investasi Korporasi Nonkeuangan	55	Grafik VI.11. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali	84
Grafik IV.12. Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga	56	Grafik VI.12. Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional	85
		Grafik VI.13. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk	85
		Grafik VI.14. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	86
		Grafik VI.15. Perbandingan NTP Bali dan Nasional	86
		Grafik VI.16. Perkembangan IPM Provinsi Bali	86
		Grafik VI.17. Perbandingan IPM Bali dan Nasional	86
		Grafik VII.1. Indeks Ekspektasi Konsumen	94
		Grafik VII.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2020	95
		Grafik VII.3. Skala <i>Likert</i> Investasi (<i>One Year Projection</i>)	96
		Grafik VII.4. Proyeksi Inflasi Bali Triwulan I- III 2020	98
		Grafik VII.3. Proyeksi Inflasi Bali 2020	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Permintaan (% <i>, yoy</i>)	4	Tabel IV.6. Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial	59
Tabel I.2. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Penawaran (% <i>, yoy</i>)	10	Tabel V.1. Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i> Provinsi Bali	67
Tabel II.1. Pagu Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2019-2020	22	Tabel V.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Wilayah Bali	67
Tabel II.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	23	Tabel V.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk	71
Tabel II.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	23	Tabel V.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km ²	72
Tabel II.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Tahun 2018-2019	23	Tabel V.5. Indikator <i>Banking Penetration</i>	72
Tabel II.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	24	Tabel V.6. Jumlah Gardu Tol Bali Mandara	73
Tabel II.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2018-2019	24	Tabel VI.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama	80
Tabel II.7. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	24	Tabel VI.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Utama yang Ditamatkan	81
Tabel II.8. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	25	Tabel VI.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	81
Tabel II.9. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	27	Tabel VI.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	82
Tabel II.10. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	28	Tabel VI.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribuan Orang)	83
Tabel II.11. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020	29	Tabel VI.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Ribuan Orang)	83
Tabel II.12. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019	30	Tabel VI.7. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2015 – 2019	84
Tabel II.13. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020	31	Tabel VII.1. <i>Outlook</i> Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Bali 2020-2021	96
Tabel II.14. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Tahun 2018-2019	32		
Tabel III.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	42		
Tabel III.2. <i>Ranking</i> Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Triwulan I 2020 (yoy)	42		
Tabel III.3. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	43		
Tabel III.4. <i>Ranking</i> Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan I 2020 (yoy)	43		
Tabel III.5. Kegiatan TPID Triwulan I 2020	46		
Tabel IV.1. DSR Rumah Tangga	55		
Tabel IV.2. Perkembangan Kredit KPR dan KPA	57		
Tabel IV.3. Perkembangan KKB dan Multiguna	57		
Tabel IV.4. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	58		
Tabel IV.5. Pangsa Kredit UMKM Spasial	59		

Halaman ini sengaja dikosongkan

Indikator Perekonomian Bali

PERTUMBUHAN EKONOMI

TW IV 2019
5,51% (yoy)

Pertumbuhan Ekonomi Bali pada triwulan I 2020 mengalami kontraksi ditengah pandemi COVID-19. Ekonomi Bali tumbuh -1,14% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51% (yoy)

TW I 2020
-1,14% (yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI

TW IV 2019
2,38% (yoy)

Inflasi Bali pada triwulan I 2020 meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,38 (yoy)

TW I 2020
3,04% (yoy)

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Angkatan Kerja (Juta Orang)

Februari 2019 Agustus 2019 Februari 2020

2,54 2,47 2,59



Kemiskinan (%)

September 2018 Maret 2019 September 2019

3,91 3,79 3,61



Pengangguran Terbuka (%)

Februari 2019 Agustus 2019 Februari 2020

1,19 1,52 1,21



Gini Ratio

September 2018 Maret 2019 September 2019

0,364 0,366 0,370



PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Inflow

4,58
Rp Triliun
TW IV 2019

5,76
Rp Triliun
TW I 2020

Outflow

5,84
Rp Triliun
TW IV 2019

4,02
Rp Triliun
TW I 2020

Net Inflow/ Outflow

1,25
Rp Triliun
TW IV 2019
Net Outflow

1,74
Rp Triliun
TW I 2020
Net Inflow

Nominal Kliring

14,16
Rp Triliun
TW IV 2019

12,15
Rp Triliun
TW I 2020

Volume Kliring

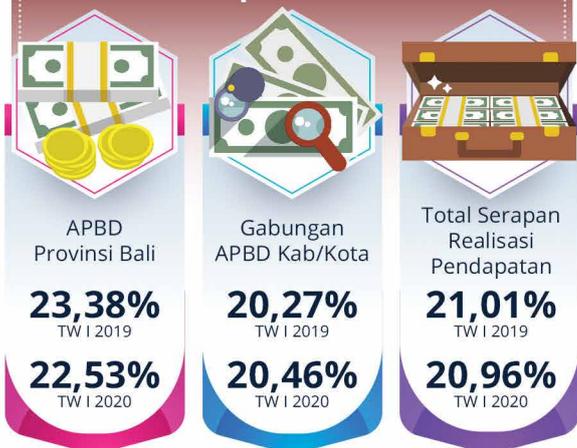
446
Ribu Lembar
TW IV 2019

380
Ribu Lembar
TW I 2020

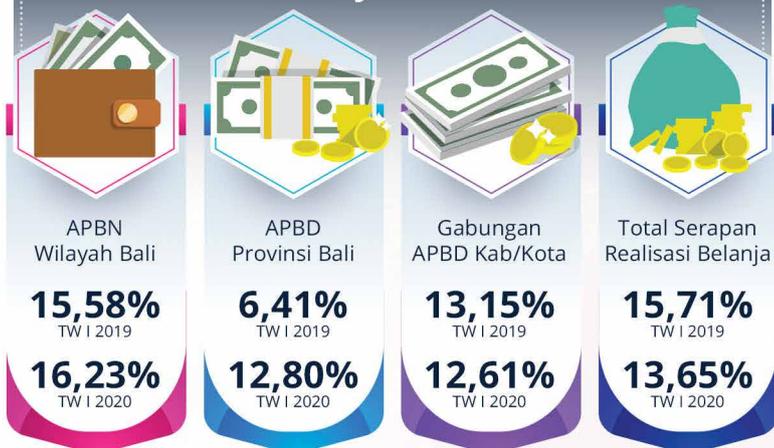


KEUANGAN PEMERINTAH

Serapan Realisasi Pendapatan Daerah



Serapan Realisasi Belanja Daerah



STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kredit Rumah Tangga (Pertumbuhan)

6,95% (yoy) **7,28%** (yoy)
TW IV 2019 TW I 2020

Kredit Rumah Tangga (NPL)

1,47% **1,79%**
TW IV 2019 TW I 2020

Kredit UMKM (Pertumbuhan)

6,12% (yoy) **6,79%** (yoy)
TW IV 2019 TW I 2020

Kredit UMKM (NPL)

2,75% **3,10%**
TW IV 2019 TW I 2020

Kredit Korporasi (Pertumbuhan)

5,73% (yoy) **6,96%** (yoy)
TW IV 2019 TW I 2020

Kredit Korporasi (NPL)

7,26% **7,31%**
TW IV 2019 TW I 2020

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Pertumbuhan Ekonomi

-9,54%
s.d -9,14%
(yoy)

TW II
2020

-9,49%
s.d -9,09%
(yoy)

TW III
2020

-6,9%
s.d -7,3%
(yoy)

Tahun
2020

Inflasi

3%±1%
(yoy)

TW II
2020

3%±1%
(yoy)

TW III
2020

3%±1%
(yoy)

Tahun
2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar -1,14% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 5,51% (yoy)

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2020

Di tengah pandemi COVID-19, kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 mengalami kontraksi. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar -1,14% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 5,51% (yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 2,97% (yoy). Dari sisi permintaan, penurunan kinerja ekonomi Bali bersumber dari kontraksi ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah serta melambatnya konsumsi rumah tangga (RT). Kinerja investasi juga menunjukkan kontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Kondisi ini merupakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan *travel restriction* dan/atau *lockdown*. Selanjutnya dari sisi penawaran, kontraksi kinerja ekonomi Bali bersumber dari lapangan usaha (LU) utama Bali yaitu LU penyediaan akomodasi dan makan-minum (akmamin), LU pertanian, LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU transportasi. Adanya pandemi COVID-19 menekan kinerja LU akmamin, LU perdagangan, serta LU transportasi. Selain itu, sejumlah proyek juga tertunda akibat protokol kesehatan *physical distancing* sehingga menekan kinerja LU konstruksi. Sementara itu, melambatnya sektor pertanian disebabkan oleh belum masuknya masa panen tanaman pangan (padi) pada triwulan I 2020.

PROSPEK EKONOMI TRIWULAN II 2020

Ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan tumbuh dalam kisaran -9,5% s.d 9,1% (yoy), terkontraksi semakin dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini seiring kebijakan antisipasi penyebaran COVID-19 yang semakin ketat dibanding dengan triwulan sebelumnya. Kebijakan yang awalnya hanya menutup sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok, kemudian berlanjut menjadi penutupan sementara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, kebijakan protokol kesehatan juga diberlakukan secara tegas seperti penutupan seluruh tempat tujuan wisata, pasar, dan pusat keramaian terkait kebijakan pencegahan COVID-19 termasuk kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota Denpasar sejak Mei 2020.

PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pagu anggaran perubahan belanja pemerintah di Wilayah Bali (APBD dan APBN) pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp40,42 triliun atau tumbuh 0,45% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,70% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pagu anggaran pendapatan daerah di Wilayah Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,42 triliun atau tumbuh terbatas 1,31% (yoy).

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun.

Selanjutnya, ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan tumbuh dalam kisaran -9,5%--9,1% (yoy), terkontraksi semakin dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun

APBN dan APBD provinsi mengalami peningkatan serapan belanja. Daerah tingkat II dengan serapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Bangli, sementara daerah dengan serapan belanja terendah adalah Kabupaten Gianyar.

Sejalan dengan kinerja belanja, kinerja Pendapatan Daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 12,72% (yoy). Tertahannya kinerja pendapatan pemerintah juga terkonfirmasi dari serapan (realisasi pendapatan terhadap pagu) yang tercatat sebesar 20,96% pada triwulan I tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 21,01%.

Realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 12,72% (yoy).

PERKEMBANGAN INFLASI

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 2,96% (yoy). Meningkatnya inflasi Bali pada triwulan I 2020 disebabkan oleh naiknya tekanan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy).

PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2020

Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu $3\% \pm 1\%$ (yoy). Perlambatan ini diperkirakan didorong oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai. Terhentinya industri pariwisata menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan pangan. Semakin terjaganya pasokan gula pasir dan turunnya harga minyak dunia juga dapat berdampak pada penurunan harga gula dan BBM.

Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu $3\% \pm 1\%$ (yoy).

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Bali pada triwulan I 2020 masih terjaga. Kondisi ini tercermin oleh terjaganya tingkat intermediasi perbankan yang diwarnai peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit. Penghimpunan DPK di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh sebesar 9,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,68% (yoy). Sementara itu, Penyaluran kredit pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh 7,36% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Kualitas kredit di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 sedikit menurun. Hal ini tercermin dari *Non performing loan* (NPL) Gross, yang meningkat pada triwulan I 2020 menjadi 3,80% dari 3,62% pada triwulan sebelumnya.

Penghimpunan DPK di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh sebesar 9,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,68% (yoy).

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2020 tumbuh 6,96% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy). Dari sisi penggunaan, meningkatnya kinerja penyaluran kredit korporasi nonkeuangan bersumber dari penyaluran kredit investasi. Berdasarkan jenis LU, meningkatnya kredit korporasi nonkeuangan

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2020 tumbuh 6,96%(yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73%(yoy).

terutama bersumber dari meningkatnya kredit LU akmamin dan konstruksi. Sejalan dengan itu, kualitas kredit korporasi nonkeuangan sedikit membaik. Pada triwulan I 2020, NPL kredit korporasi nonkeuangan tercatat sebesar 7,13%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya (7,26%).

Pada triwulan I 2020, kredit rumah tangga tumbuh 7,28%(yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,95% (yoy).

Pada triwulan I 2020, kredit rumah tangga tumbuh 7,28%(yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,95% (yoy). Peningkatan kredit rumah tangga bersumber terutama dari peningkatan kredit multiguna, seiring dengan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit tersebut. Risiko kredit RT masih terjaga cukup baik, tercermin dari tingkat NPL yang masih cukup rendah dan berada di bawah 5%. Namun demikian, NPL pada triwulan I 2020 sedikit meningkat (1,79%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,47%).

Pada triwulan I 2020 kredit UMKM tumbuh 6,79%(yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy).

Pada triwulan I 2020 kredit UMKM tumbuh 6,79%(yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari meningkatnya kredit UMKM LU industri pengolahan dan akmamin. Meskipun kredit UMKM tumbuh melambat, namun kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,10%, meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu (2,75%), namun masih berada di bawah 5%.

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow sebesar Rp1,74 triliun.

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow*¹ sebesar Rp1,74 triliun. Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya permintaan uang kartal pada periode laporan, pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun.

Perkembangan transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume.

Perkembangan transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan I 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 380 ribu lembar atau tumbuh -13,10 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -12,55% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp12,15 triliun atau tumbuh -3,57% (yoy) pada triwulan I 2020. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -3,00% (yoy). Demikian halnya dengan transaksi Bank Indonesia (BI-RTGS) juga mengalami perlambatan. Nominal RTGS tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 15,65% (yoy) pada triwulan I 2020. Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh dari 19,09 % (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi sebesar 1,49% (yoy).

Nominal transaksi KUPVA BB di Provinsi Bali pada Triwulan I 2020 tercatat tumbuh dari 19,09 % (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi sebesar 1,49% (yoy).

1 *Net inflow* merupakan kondisi di mana uang/uang-uang yang masuk ke kas Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding dengan uang yang keluar dari kas Bank Indonesia.

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Menurunnya kinerja perekonomian Bali berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal ini tercermin pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,19% (Februari 2019) menjadi 1,21% (Februari 2020). Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tengah menurunnya kesempatan kerja. TPAK tercatat meningkat dari 76,68% pada Februari 2019 menjadi 77,08% di Februari 2020. Sementara itu, indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 178 pada triwulan I 2019 menjadi 121 pada triwulan I 2020. Penurunan lebih dalam diprakirakan akan terjadi pada triwulan II 2020, sebagaimana terkonfirmasi pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Bali.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% pada Februari 2020.

Kondisi kesejahteraan di Provinsi Bali secara umum terjaga, namun terdapat indikasi penurunan pada periode berjalan. Angka Kemiskinan Provinsi Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61%, menurun dibanding dengan periode September 2018 yang sebesar 3,91%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan. Namun demikian, terjadi indikasi penurunan kesejahteraan sebagaimana tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) dari 104,31 pada triwulan IV 2019 menjadi 96,67 pada triwulan I 2020. Gini ratio Provinsi Bali yang mengalami peningkatan juga menjadi tantangan bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Bali.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode September 2019 menunjukkan penurunan dibanding dengan September 2018, sedangkan rasio gini dan NTP meningkat

PROSPEK EKONOMI BALI

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan berkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s.d -9% (yoy), sedikit membaik dibanding dengan prakiraan triwulan II 2020 yang sebesar -9,5 s.d 9% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh kontraksi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan berkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s/d -9% (yoy), sedikit membaik dibanding dengan prakiraan triwulan II 2020

PROSPEK INFLASI BALI

Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding dengan tahun 2019, dan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Kecukupan pasokan komoditas pokok dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID diprakirakan akan berkontribusi terhadap terkendalinya risiko inflasi tahun 2020.

Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding dengan tahun 2019, dan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy).

TABEL INDIKATOR TERPILIH

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI BALI

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL																
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)																
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	6,25	5,92	6,16	3,99	5,56	5,55	6,01	6,13	7,59	6,33	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	-1,14
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	4,65	3,80	-1,43	2,73	5,08	3,96	4,48	6,69	5,06	2,35	7,06	3,64	2,18	3,79	0,06
Pertambangan dan Penggalian	2,54	0,39	1,91	-10,49	-1,44	-6,26	-3,12	-4,00	3,44	-2,65	-4,10	-8,12	1,04	6,56	-1,23	3,24
Industri Pengolahan	3,58	-0,06	0,46	-0,69	0,80	1,36	5,46	6,73	9,16	5,67	9,60	7,20	4,32	6,30	6,83	-7,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	-0,16	8,40	13,50	5,48	4,90	6,52	0,50	-3,51	1,94	1,50	1,43	3,09	11,95	4,52	8,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,82	4,86	3,05	1,16	2,72	-1,88	2,92	2,14	4,87	2,03	6,04	4,09	6,22	7,30	5,91	8,42
Konstruksi	6,27	7,15	8,39	9,52	7,87	9,77	10,36	12,01	9,16	10,33	8,85	8,03	6,56	6,28	7,39	2,92
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,48	8,23	9,60	5,11	7,84	4,84	5,44	7,24	12,67	7,57	7,92	10,04	7,89	4,13	7,43	-1,67
Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,44	6,37	3,28	5,00	6,78	6,07	3,15	8,80	6,15	5,03	3,56	5,16	5,08	4,71	-6,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	9,73	10,59	6,35	9,03	6,35	6,16	4,25	8,43	6,27	4,55	3,07	5,54	6,03	4,81	-9,11
Informasi dan Komunikasi	8,14	8,31	7,85	8,09	8,10	8,87	8,47	7,63	6,12	7,74	5,99	6,21	8,23	7,77	7,06	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	6,34	0,70	-2,01	2,43	1,00	-0,23	3,15	3,84	1,93	6,89	8,97	8,73	10,47	8,78	7,35
Real Estate	3,67	4,28	4,50	4,92	4,34	1,43	3,20	5,51	6,78	4,26	8,22	5,61	5,26	2,72	5,39	3,02
Jasa Perusahaan	8,56	7,66	5,90	5,65	6,91	6,94	8,40	9,00	6,83	7,79	4,10	4,01	5,99	4,33	4,61	0,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	-5,07	-1,34	0,30	-1,60	0,81	5,48	7,36	2,76	4,19	12,10	3,16	-2,31	5,88	4,35	7,13
Jasa Pendidikan	7,30	8,11	5,24	7,44	7,00	9,02	8,44	7,98	4,31	7,38	3,23	3,91	5,62	7,06	4,98	-0,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	7,92	7,76	9,06	8,44	9,29	9,44	9,16	6,61	8,59	6,24	6,27	4,82	5,60	5,72	6,26
Jasa lainnya	9,57	8,26	7,52	6,18	7,85	7,03	8,77	9,08	8,97	8,47	7,39	6,35	8,01	7,49	7,31	-2,82
B. Berdasarkan Pengeluaran:	6,25	5,92	6,16	3,99	5,56	5,55	6,01	6,13	7,59	6,33	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	-1,14
1. Pengeluaran Konsumsi	6,57	1,74	4,32	3,89	4,22	3,88	5,67	6,95	4,06	4,74	8,56	5,62	4,87	6,58	6,36	2,25
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	4,78	3,73	4,47	3,22	4,02	3,21	4,55	5,39	6,93	5,00	6,29	4,99	6,35	5,70	5,83	2,90
1. b. Konsumsi LNPR	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,35	6,76	22,86	10,98	7,94	6,00	11,73	-4,67
1. c. Konsumsi Pemerintah	24,09	-8,36	4,05	5,96	5,28	8,58	11,72	14,78	-6,34	3,08	23,73	8,45	-2,55	10,40	8,50	-0,89
2. Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	7,12	6,68	4,79	-2,24	3,94	-1,58
2. a. PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	7,12	6,71	4,89	-2,16	3,99	-1,45
2. b. Perubahan Inventori	9,50	19,74	-1,84	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	-0,43	3,02	6,71	-0,46	-14,91	-19,15	-6,90	-26,97
3. Neraca Perdagangan Bersih	21,93	264,95	62,41	-81,94	71,86	12,10	9,18	-28,16	-1855,18	3,58	-22,26	-0,34	18,58	243,41	8,24	-40,56
3. a. Ekspor Luar Negeri	11,25	11,29	11,45	-5,03	7,09	-3,83	3,35	10,97	14,46	6,11	3,54	-4,93	0,33	-0,35	-0,44	-21,87
3. b. Impor Luar Negeri	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,66	6,04	-32,15	-27,80	-13,48	-38,81
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	7,77	-5,57	1,49	-8,29	-1,76	-14,00	0,81	13,24	-1,42	-0,10	9,27	-10,00	11,32	5,90	4,01	-9,35
C. Ekspor																
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	128,49	121,79	124,75	133,74	508,77	144,11	128,21	135,76	163,38	571,47	150,76	137,73	132,25	147,77	568,51	138,48
g Nilai Ekspor Nonmigas (% yoy)	5,66	-5,15	17,10	5,84	5,36	12,16	5,27	8,82	22,16	12,32	4,61	7,42	-2,59	-9,55	-0,52	-8,15
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	21,46	20,76	21,11	22,04	85,36	21,90	20,79	22,06	27,01	91,77	21,38	18,40	19,27	21,24	80,28	19,62
g Volume Ekspor Nonmigas (% yoy)	-75,53	-30,82	-0,56	-15,13	-48,23	2,08	0,15	4,49	22,58	7,50	-2,40	-11,46	-12,68	-21,39	-12,51	-8,20
D. Impor																
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	18,31	33,80	41,90	43,21	137,22	34,17	47,32	64,35	120,31	266,15	59,82	58,04	75,88	71,30	265,04	46,97
g Nilai Impor Nonmigas (% yoy)	-60,30	32,39	85,93	10,36	2,91	86,62	39,98	53,57	178,41	93,95	75,06	22,66	17,93	-40,74	-0,42	-21,48
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	1,58	2,15	1,42	1,55	6,70	6,17	1,45	2,03	2,05	11,70	2,32	2,38	3,16	10,98	18,84	2,24
g Volume Impor Nonmigas (% yoy)	-91,22	30,45	-16,27	-27,87	-71,41	291,26	-32,42	42,60	31,91	74,49	-62,38	63,45	56,27	435,50	61,10	-3,32
E. Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	4,40	4,03	2,68	3,32	3,32	3,10	3,47	3,60	3,13	3,13	1,85	2,14	2,54	2,38	2,38	3,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)																
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)																
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	50.366	52.624	55.138	54.908	213.036	55.464	57.575	60.009	60.744	233.792	60.121	62.160	64.756	65.561	252.598	60.602
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.116	7.376	7.643	7.647	29.782	7.714	7.887	8.196	8.414	32.211	8.090	8.634	8.706	8.745	34.175	8.283
Pertambangan dan Penggalian	530	531	535	513	2.109	541	563	564	539	2.207	524	522	576	578	2.200	546
Industri Pengolahan	3.224	3.185	3.217	3.276	12.902	3.377	3.462	3.537	3.659	14.036	3.769	3.771	3.746	3.953	15.238	3.530
Pengadaan Listrik dan Gas	118	127	133	141	518	134	141	138	140	553	139	145	144	160	588	151
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94	98	98	97	387	94	102	101	102	399	100	107	109	111	427	110
Konstruksi	4.460	4.629	4.828	5.130	19.047	5.122	5.347	5.686	5.803	21.958	5.792	5.982	6.235	6.314	24.323	6.070
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.339	4.445	4.642	4.560	17.987	4.700	4.806	5.086	5.226	19.819	5.141	5.363	5.582	5.543	21.628	5.191
Transportasi dan Pergudangan	4.685	5.075	5.567	5.220	20.547	5.347	5.631	5.878	5.920	22.777	5.802	5.963	6.373	6.431	24.569	5.489
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.796	12.425	13.215	12.604	50.040	13.018	13.481	14.021	14.025	54.545	13.923	14.274	15.269	15.281	58.747	13.217
Informasi dan Komunikasi	2.682	2.753	2.836	2.919	11.190	2.982	3.046	3.128	3.177	12.333	3.225	3.288	3.428	3.458	13.399	3.490
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.104	2.166	2.169	2.151	8.590	2.197	2.240	2.326	2.308	9.071	2.410	2.502	2.556	2.574	10.042	2.610
Real Estate	2.051	2.105	2.156	2.188	8.500	2.159	2.229	2.315	2.381	9.084	2.362	2.381	2.465	2.486	9.694	2.485
Jasa Perusahaan	539	548	562	583	2.233	598	610	623	633	2.465	633	646	673	678	2.629	660
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.195	2.574	2.784	2.939	10.493	2.491	2.922	3.091	3.050	11.554	2.846	3.089	3.107	3.349	12.392	3.167
Jasa Pendidikan	2.542	2.643	2.749	2.882	10.816	2.878	2.937	3.083	3.099	11.997	3.063	3.141	3.361	3.420	12.985	3.168
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.087	1.120	1.156	1.198	4.561	1.222	1.255	1.292	1.308	5.076	1.329	1.360	1.382	1.414	5.486	1.450
Jasa lainnya	804	823	848	860	3.335	890	917	943	958	3.708	974	993	1.043	1.065	4.075	985
B. Berdasarkan Pengeluaran:	50.366	52.624	55.138	54.908	213.036	55.464	57.575	60.009	60.744	233.792	60.121	62.160	64.756	65.561	252.598	60.602
1. Pengeluaran Konsumsi	29.093	31.257	32.281	34.706	127.337	31.369	34.376	36.029	37.284	139.058	34.840	37.066	38.536	40.545	150.986	36.836
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	25.043	25.455	25.728	25.926	102.153	26.786	27.735	28.443	28.799	111.762	29.141	29.763	30.984	31.253	121.140	31.171
1. b. Konsumsi LNPR	601	616	648	716	2.580	665	680	698	722	2.764	821	770	789	784	3.164	796
1. c. Konsumsi Pemerintah	3.449	5.186	5.905	8.063	22.604	3.919	5.962	6.888	7.763	24.531	4.878	6.534	6.763	8.508	26.683	4.869
2. Investasi	15.362	15.789	16.126	16.667	63.944	16.930	17.380	18.538	19.445	72.293	18.412	18.628	19.439	19.183	75.663	18.196
2. a. PMTB	15.205	15.633	15.958	16.498	63.293	16.757	17.206	18.361	19.278	71.602	18.235	18.458	19.307	19.073	75.073	18.087
2. b. Perubahan Inventori	157	157	169	169	651	173	175	177	167	691	178	170	132	110	590	110
3. Neraca Perdagangan Bersih	5.910	5.577	6.731	3.536	21.755	7.166	5.819	5.441	4.015	22.441	6.869	6.465	6.780	5.833	25.948	5.570
3. a. Ekspor Luar Negeri	21.183	22.431	22.991	20.034	86.639	21.205	24.123	26.794	24.660	96.782	22.579	23.129	27.067	24.484	97.260	19.438
3. b. Impor Luar Negeri	4.785	5.318	5.331	5.344	20.778	5.537	5.795	6.879	7.993	26.204	6.139	6.212	4.640	5.735	22.725	3.826
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-10.488	-11.535	-10.928	-11.154	-44.106	-8.502	-12.509	-14.474	-12.652	-48.137	-9.572	-10.451	-15.647	-12.916	-48.586	-10.041

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)																
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)																
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	34.941	35.956	37.159	36.878	144.933	36.881	38.117	39.437	39.675	154.110	39.097	40.284	41.542	41.861	162.784	38.652
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.792	4.938	5.051	5.040	19.822	5.036	5.134	5.277	5.377	20.824	5.154	5.496	5.469	5.495	21.614	5.157
Pertambangan dan Penggalian	378	380	383	338	1.481	355	368	368	350	1.441	340	339	372	373	1.424	351
Industri Pengolahan	2.317	2.274	2.286	2.301	9.178	2.348	2.398	2.440	2.512	9.698	2.574	2.571	2.545	2.670	10.360	2.369
Pengadaan Listrik dan Gas	75	77	81	85	318	79	82	81	82	324	80	84	83	92	339	86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Konstruksi	77	79	79	78	313	75	82	81	81	319	80	85	86	87	338	87
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	3.241	3.286	3.407	3.320	13.254	3.397	3.465	3.654	3.741	14.257	3.666	3.813	3.942	3.896	15.316	3.605
Transportasi dan Pergudangan	2.531	2.654	2.824	2.684	10.692	2.702	2.814	2.913	2.920	11.349	2.838	2.915	3.063	3.068	11.884	2.662
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.069	7.322	7.708	7.320	29.420	7.518	7.773	8.036	7.937	31.264	7.860	8.012	8.481	8.416	32.769	7.143
Informasi dan Komunikasi	2.441	2.490	2.554	2.620	10.106	2.657	2.701	2.749	2.781	10.888	2.816	2.869	2.976	2.997	11.657	3.025
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.508	1.547	1.536	1.506	6.097	1.523	1.543	1.584	1.563	6.214	1.628	1.682	1.723	1.727	6.760	1.748
Real Estate	1.662	1.683	1.707	1.726	6.778	1.686	1.737	1.801	1.843	7.067	1.824	1.835	1.896	1.893	7.448	1.879
Jasa Perusahaan	394	396	401	414	1.606	422	429	437	443	1.731	439	446	463	462	1.810	443
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa Pendidikan	1.844	2.054	2.131	2.196	8.225	1.859	2.167	2.288	2.256	8.570	2.084	2.235	2.235	2.389	8.943	2.232
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.915	1.950	2.023	2.097	7.985	2.088	2.114	2.185	2.187	8.574	2.155	2.197	2.308	2.342	9.002	2.149
Jasa lainnya	824	839	863	890	3.416	901	918	942	949	3.709	957	975	987	1.002	3.922	1.017
Jasa lainnya	572	579	593	600	2.345	613	630	647	654	2.543	658	670	699	702	2.729	639
B. Berdasarkan Pengeluaran:	34.941	35.956	37.159	36.878	144.933	36.881	38.117	39.437	39.675	154.110	39.097	40.284	41.542	41.861	162.784	38.652
1. Pengeluaran Konsumsi	21.417	22.692	23.354	24.809	92.273	22.249	23.979	24.977	25.816	97.021	24.154	25.327	26.194	27.514	103.189	24.697
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	18.725	19.028	19.232	19.205	76.191	19.327	19.894	20.269	20.535	80.025	20.542	20.886	21.556	21.705	84.689	21.139
1. b. Konsumsi LNPRT	409	418	437	482	1.747	443	458	479	484	1.864	545	508	517	513	2.083	519
1. c. Konsumsi Pemerintah	2.283	3.246	3.685	5.122	14.335	2.478	3.627	4.229	4.797	15.131	3.066	3.933	4.122	5.296	16.417	3.039
2. Investasi	11.308	11.630	11.837	12.087	46.863	12.148	12.355	13.047	13.534	51.084	13.012	13.180	13.672	13.231	53.095	12.807
2. a. PMTB	11.248	11.572	11.777	12.027	46.623	12.086	12.293	12.984	13.474	50.837	12.947	13.118	13.618	13.183	52.865	12.759
2. b. Perubahan Inventori	60	58	60	60	239	62	62	63	60	247	66	62	53	49	230	48
3. Neraca Perdagangan Bersih	2.216	1.633	1.968	-19	5.798	2.484	1.783	1.414	325	6.005	1.931	1.777	1.676	1.116	6.500	1.148
3. a. Ekspor Luar Negeri	13.965	14.512	14.672	12.875	56.025	13.431	14.998	16.282	14.737	59.448	13.907	14.259	16.336	14.686	59.187	10.865
3. b. Impor Luar Negeri	3.121	3.410	3.417	3.369	13.317	3.526	3.669	4.350	5.023	16.568	3.867	3.890	2.952	3.627	14.335	2.366
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-8.629	-9.468	-9.288	-9.524	-36.910	-7.421	-9.545	-10.518	-9.389	-36.874	-8.109	-8.591	-11.709	-9.943	-38.352	-7.351

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana (% yoy)	6,05	6,19	5,96	5,31	5,59	5,56
Tabanan (% yoy)	6,53	6,19	6,14	5,38	5,72	5,60
Badung (% yoy)	6,98	6,24	6,81	6,11	6,75	5,83
Gianyar (% yoy)	6,80	6,30	6,31	5,50	6,01	5,64
Klungkung (% yoy)	5,98	6,11	6,28	5,34	5,50	5,44
Bangli (% yoy)	5,83	6,16	6,24	5,35	5,50	5,47
Karangasem (% yoy)	6,01	6,00	5,92	5,08	5,48	5,50
Buleleng (% yoy)	6,96	6,07	6,02	5,40	5,62	5,55
Denpasar (% yoy)	7,00	6,14	6,51	6,05	6,43	5,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	9.020	10.198	11.168	12.116	13.143	14.162
Tabanan	15.066	16.996	18.630	20.377	22.139	23.886
Badung	37.273	42.429	47.208	52.344	57.799	62.795
Gianyar	17.909	20.140	22.113	24.224	26.488	28.581
Klungkung	5.676	6.426	7.112	7.785	8.463	9.120
Bangli	4.382	4.946	5.457	5.977	6.493	6.999
Karangasem	10.785	12.233	13.411	14.598	15.873	17.107
Buleleng	22.355	25.170	27.690	30.319	32.941	35.509
Denpasar	34.210	38.424	42.384	46.836	51.411	55.676
	156.676	176.964	195.174	214.575	234.750	253.836

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	7.135	7.576	8.028	8.452	8.925	9.421
Tabanan	11.908	12.645	13.421	14.142	14.952	15.789
Badung	27.458	29.170	31.157	33.052	35.279	37.336
Gianyar	14.269	15.169	16.125	17.005	18.030	19.047
Klungkung	4.536	4.813	5.116	5.388	5.684	5.993
Bangli	3.472	3.686	3.916	4.124	4.351	4.589
Karangasem	8.483	8.992	9.524	10.006	10.554	11.135
Buleleng	17.742	18.819	19.951	21.024	22.204	23.437
Denpasar	26.779	28.423	30.273	32.105	34.169	36.165

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit RT. Total (Rp triliun)	31,95	32,51	33,10	33,75	33,90	34,84	35,14	36,10	36,37
g Kredit RT. Total (% , yoy)	6,40	5,60	5,66	5,76	6,12	7,15	6,17	6,95	7,28
KPR (Rp triliun)	9,68	9,76	10,10	10,58	10,70	10,98	11,21	11,31	11,31
RT. KPR sd 21	0,71	0,70	0,72	0,69	0,69	0,69	0,70	0,71	0,70
RT. KPR sd 70	4,43	4,45	4,69	5,10	5,25	5,50	5,70	5,78	5,86
RT. KPR 70+	4,55	4,60	4,70	4,79	4,76	4,78	4,80	4,82	4,76
KPA (Rp triliun)	0,16	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11
RT. KPA sd 21	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
RT. KPA sd 70	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
RT. KPA 70+	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
RT. Ruko (Rp triliun)	0,57	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50
KKB (Rp triliun)	2,38	2,48	2,57	2,63	2,70	2,74	2,76	2,86	2,95
RT. KKB Roda 4	2,21	2,30	2,39	2,39	2,43	2,39	2,43	2,53	2,55
RT. KKB Roda 2	0,13	0,14	0,14	0,18	0,21	0,26	0,27	0,27	0,27
RT. KKB Roda 6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
RT. KKB Lainnya	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,12
RT. Multiguna (Rp triliun)	16,49	16,52	16,74	16,94	16,98	17,51	17,81	18,36	18,70
NPL Kredit RT (Gross %)	1,64	1,77	1,80	1,47	1,60	1,62	1,64	1,47	1,79

Sumber : LBU, Bank Indonesia

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit Korporasi nonkeuangan (Rp triliun)	27,65	27,13	26,86	29,59	29,02	31,23	31,03	31,29	31,04
g Kredit Korporasi nonkeuangan(% , yoy)	-0,43	-2,27	-2,74	6,59	4,96	15,14	15,51	5,73	6,96
Modal Kerja (Rp triliun)	10,13	9,59	9,55	11,16	10,58	10,76	9,86	10,00	9,27
g Modal Kerja (% , yoy)	-3,40	-7,44	-5,72	7,12	4,48	12,15	3,24	-10,41	-12,39
Investasi (Rp triliun)	17,46	17,50	17,29	18,39	18,40	20,44	21,14	21,25	21,74
g Investasi (% , yoy)	1,55	1,10	-0,78	6,22	5,36	16,76	22,26	15,53	18,14
NPL (Gross,%)	6,40	5,29	6,03	7,17	8,05	8,65	9,55	7,26	7,13

Sumber : LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM (LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Asset (Rp Triliun)	95,92	98,06	103,43	103,50	105,32	106,45	109,99	112,41	109,29	113,92	118,67	118,46	119,03
g Total Asset (% , yoy)	4,86	3,91	5,43	3,37	9,80	8,55	6,34	8,61	3,77	7,02	7,89	5,39	8,91
DPK (Rp Triliun) - DPK KCKCP	81,53	89,97	93,24	86,68	87,27	89,63	94,70	93,49	94,20	97,57	102,18	101,61	103,09
Giro (Rp Triliun)	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,92	15,69	17,12	15,82	15,84
Tabungan (Rp Triliun)	36,80	42,89	44,02	42,06	41,81	43,85	46,44	47,07	46,28	48,16	50,73	52,40	52,33
Deposito (Rp Triliun)	30,32	31,90	32,84	30,82	31,18	30,65	31,73	32,19	33,00	33,72	34,33	33,39	34,91
g DPK (% , yoy)	7,87	15,89	17,41	8,95	7,03	-0,38	1,57	7,86	7,94	8,86	7,89	8,68	9,44
g Giro(% , yoy)	3,62	8,33	9,66	4,74	-0,91	-0,38	0,95	3,08	4,53	3,75	3,55	11,21	6,17
g Tabungan(% , yoy)	8,71	20,59	21,25	9,82	13,61	2,24	5,50	11,91	10,68	9,82	9,24	11,33	13,08
g Deposito (% , yoy)	8,98	13,71	16,57	9,75	2,82	-3,89	-3,38	4,47	5,84	9,99	8,18	3,71	5,80
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Pro	88,89	90,35	90,89	91,97	92,21	92,51	95,24	97,06	97,14	100,91	101,97	103,46	104,29
Modal Kerja	31,61	32,21	31,90	32,48	32,55	32,08	33,57	34,76	33,55	34,16	33,53	33,57	33,23
Investasi	27,13	27,23	27,56	27,52	27,63	27,85	28,50	28,48	29,61	31,84	33,24	33,71	34,64
Konsumsi	30,15	30,91	31,43	31,98	32,03	32,58	33,17	33,83	33,98	34,91	35,19	36,17	36,42
g Kredit Umum (% , yoy)	7,37	6,23	4,88	3,72	3,74	2,39	4,78	5,53	5,34	9,08	7,06	6,59	7,36
g Modal Kerja (% , yoy)	5,87	2,39	0,49	2,80	2,95	-0,39	5,23	7,02	3,09	6,48	-0,12	-3,41	-0,96
g Investasi (% , yoy)	8,78	8,74	6,67	0,65	1,87	2,27	3,40	3,49	7,16	14,34	16,64	18,40	16,98
g Konsumsi (% , yoy)	7,72	8,25	8,07	7,53	6,25	5,40	5,53	5,78	6,07	7,15	6,10	6,93	7,18
Loan to Deposit Ratio (%)	109,02	100,43	97,49	106,11	105,67	103,22	100,57	103,82	103,12	103,43	99,79	101,82	101,16
NPL Gross (%)	3,74	3,67	3,67	3,62	4,12	3,54	3,56	3,74	4,03	4,38	4,52	3,62	3,80

Sumber : LBU, Bank Indonesia

DANA PERBANKAN BERDASARKAN KCKCP (BANK UMUM)

INDIKATOR	2016				2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp triliun)	75,57	77,61	79,39	79,53	81,57	83,21	87,61	86,73	87,32	89,69	94,76	93,61	94,32	97,70	102,32	101,76	103,24
Giro (Rp triliun)	13,90	14,00	14,92	13,16	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,93	15,69	17,13	15,83	15,85
Tabungan (Rp triliun)	33,85	35,57	36,30	38,29	36,83	38,11	40,58	42,09	41,84	43,89	46,48	47,14	46,35	48,24	50,82	52,49	52,42
Deposito (Rp triliun)	27,82	28,04	28,17	28,07	30,33	29,92	30,65	30,84	31,20	30,68	31,75	32,24	33,04	33,77	34,38	33,44	34,97

Sumber : LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM (LOKASI BANK)

Kabupaten/Kota	Indikator	2017				2018				2019				2020
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Jembrana	Kredit (Rp Triliun)	2,26	2,35	2,10	2,16	2,27	2,31	2,37	2,40	2,46	2,57	2,66	2,69	2,77
	DPK (Rp Triliun)	1,24	1,31	1,37	1,37	1,46	1,47	1,54	1,42	1,48	1,53	1,66	1,61	1,78
Tabanan	Kredit (Rp Triliun)	3,38	3,95	3,68	3,73	3,81	3,84	3,93	4,02	4,13	4,30	4,49	4,54	4,66
	DPK (Rp Triliun)	2,24	2,37	2,52	2,41	2,53	2,60	2,79	2,68	2,87	2,95	3,23	3,07	3,25
Badung	Kredit (Rp Triliun)	8,79	9,03	9,20	9,36	9,30	9,42	9,62	9,68	9,71	10,22	10,70	10,84	10,70
	DPK (Rp Triliun)	13,12	14,05	15,07	13,93	14,69	15,60	16,54	15,97	15,56	16,16	17,49	17,50	17,54
Gianyar	Kredit (Rp Triliun)	3,56	3,64	3,13	3,22	3,35	3,41	3,45	3,49	3,58	3,70	3,82	3,87	3,92
	DPK (Rp Triliun)	2,83	3,04	3,18	3,13	3,24	3,38	3,73	3,74	3,97	4,15	4,52	4,51	4,66
Klungkung	Kredit (Rp Triliun)	1,63	1,68	1,71	1,73	1,80	1,85	1,89	1,92	1,97	2,04	2,09	2,09	2,12
	DPK (Rp Triliun)	1,18	1,26	1,35	1,29	1,37	1,42	1,50	1,40	1,48	1,55	1,63	1,55	1,63
Bangli	Kredit (Rp Triliun)	1,65	1,68	1,70	1,73	1,79	1,82	1,85	1,87	1,91	1,98	2,04	2,03	2,05
	DPK (Rp Triliun)	0,86	0,98	1,10	1,02	1,12	1,22	1,35	1,12	1,14	1,15	1,36	1,31	1,32
Karangasem	Kredit (Rp Triliun)	2,80	2,85	3,10	3,03	3,03	3,05	3,09	3,09	3,12	3,23	3,32	3,32	3,35
	DPK (Rp Triliun)	1,62	1,68	1,80	1,95	2,00	2,07	2,17	2,13	2,25	2,36	2,54	2,45	2,62
Buleleng	Kredit (Rp Triliun)	5,05	5,23	5,90	5,99	5,98	6,04	6,14	6,10	6,19	6,46	6,66	6,67	6,68
	DPK (Rp Triliun)	3,33	3,54	3,90	3,90	3,94	4,02	4,32	4,21	4,24	4,42	4,63	4,58	4,76
Denpasar	Kredit (Rp Triliun)	39,98	40,84	41,35	42,09	41,93	42,19	43,17	44,11	44,17	45,33	45,89	46,28	46,47
	DPK (Rp Triliun)	55,16	54,98	57,32	57,74	56,98	57,91	60,81	60,94	61,33	63,43	65,27	65,18	65,68

Sumber : LBU, Bank Indonesia

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK - BANK UMUM)

Kredit UMKM	2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit UMKM (Rp Triliun)	31,84	33,13	33,27	34,15	34,60	35,44	35,92	36,47	36,60	38,10	38,95	38,71	39,09
g Kredit UMKM (% yoy)	14,20	11,18	8,43	7,30	8,66	6,96	7,95	6,81	5,79	7,51	8,46	6,12	6,79
Mikro (Triliun)	5,56	5,83	6,12	6,47	6,88	7,20	7,39	7,49	7,73	8,07	8,34	8,10	8,65
Kecil (Triliun)	12,17	12,64	12,78	13,02	13,19	13,41	13,42	13,33	13,55	14,14	14,76	14,96	15,00
Menengah (Triliun)	14,11	14,67	14,37	14,66	14,53	14,82	15,11	15,65	15,33	15,89	15,86	15,65	15,44
NPL (%)	2,38	4,01	3,03	2,82	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13	3,25	3,12	2,75	3,10

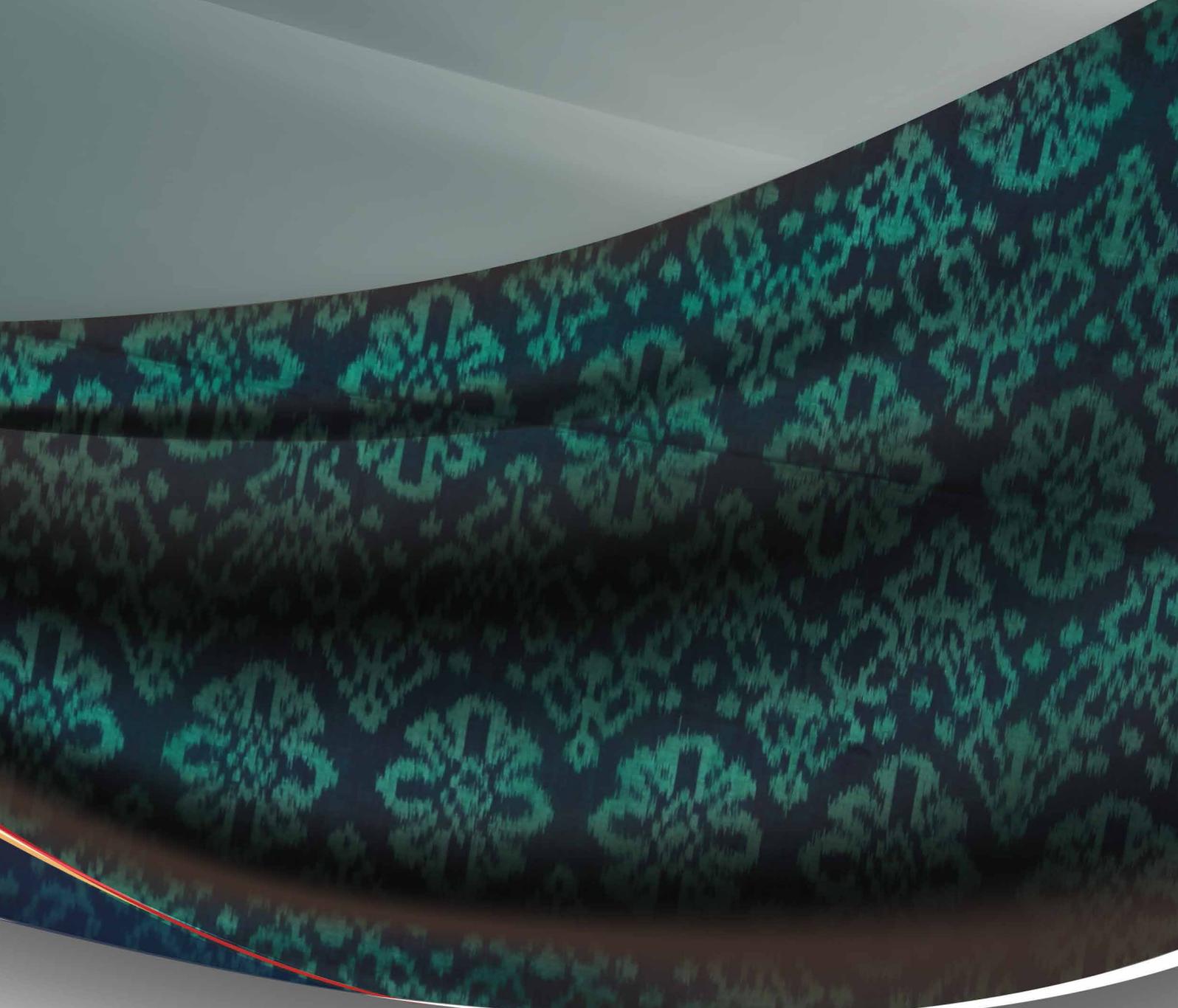
Sumber : LBU, Bank Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN (TUNAI - NONTUNAI)

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Transaksi Tunai													
Inflow (Rp Triliun)	4,58	3,88	4,93	3,58	4,50	5,21	4,65	4,16	6,76	5,57	4,48	4,58	5,76
Outflow (Rp Triliun)	3,97	5,82	3,60	4,42	3,45	6,56	4,74	5,70	3,51	6,41	4,74	5,84	4,02
Kliring													
Nom. Kliring (Rp triliun)	16,27	13,37	15,80	15,08	13,64	13,84	15,85	14,60	12,60	11,95	13,51	14,16	12,15
Vol. Kliring (ribu lembar)	622	540	609	569	538	534	582	510	437	413	444	446	380
RTGS													
Nom. RTGS (Rp triliun)	3,11	3,55	3,74	3,27	3,24	4,64	3,62	4,46	3,16	9,52	36,08	34,59	31,94
Vol. RTGS (lembar)	3.451	3.517	3.914	3.740	3.608	3.763	4.179	3.748	3.971	5.821	22.275	23.034	19.729
Tolakan Cek/BG													
Nominal Tolakan Cek/BG (Rp miliar)	423	202	187	197	169	175	163	167,45	146	141	122	131,43	126,76
Volume Tolakan Cek/BG (ribu lembar)	7,90	7,50	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,14	3,85	4,01	4,15	3,86

Sumber : Bank Indonesia





BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

- Kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 ditengah pandemi COVID-19 mengalami kontraksi. Ekonomi Bali dengan *output rill* sebesar Rp38,65 triliun tercatat tumbuh sebesar -1,14% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 5,51% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama, sebesar 2,97% (yoy).
- Ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diprakirakan tumbuh dalam kisaran -9,5% s.d -9,1% (yoy), terkontraksi semakin dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini didasarkan pada pertimbangan kebijakan antisipasi penyebaran COVID-19 yang semakin memburuk dibanding dengan triwulan sebelumnya

1.1. KONDISI UMUM

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 di tengah pandemi COVID-19 mengalami kontraksi. Dari sisi permintaan, penurunan kinerja ekonomi Bali bersumber dari kontraksi ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah serta melambatnya konsumsi rumah tangga (RT). Sementara itu, kinerja investasi masih kontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya meskipun sedikit membaik. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan travel restriction dan/atau lockdown. Selanjutnya dari sisi penawaran, kontraksi kinerja ekonomi Bali bersumber dari lapangan usaha (LU) utama Bali yaitu LU penyediaan akomodasi dan makan-minum (akmamin), LU pertanian, LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU transportasi. Adanya pandemi COVID-19 menekan kinerja LU akmamin, LU perdagangan, serta LU transportasi. Selain itu, sejumlah proyek juga tertunda dengan dilakukannya protokol kesehatan physical distancing di tengah pandemi COVID-19 sehingga menekan kinerja LU konstruksi. Selain itu, belum masuknya masa panen tanaman pangan (padi) juga menekan kinerja LU pertanian pada triwulan I 2020.

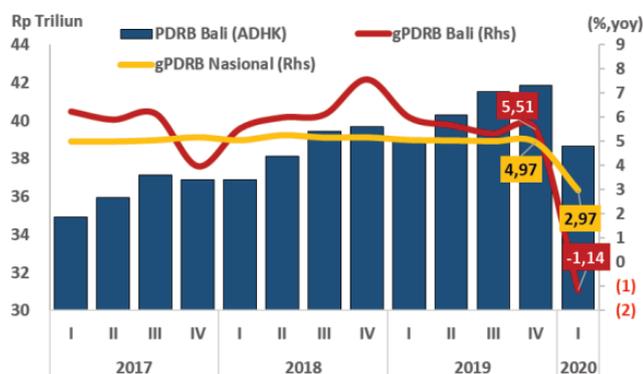
Ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan tumbuh dalam kisaran -9,5% s.d -9,1% (yoy), terkontraksi semakin dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini didasarkan pada pertimbangan kebijakan antisipasi penyebaran COVID-19 yang semakin ketat dibanding dengan triwulan sebelumnya. Kebijakan yang awalnya hanya menutup sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok, kemudian berlanjut menjadi penutupan sementara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, kebijakan protokol kesehatan juga dilakukan secara tegas seperti penutupan seluruh tempat tujuan wisata, pasar, dan pusat keramaian terkait kebijakan pencegahan COVID-19 termasuk kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota Denpasar sejak Mei 2020.

1.2. KINERJA PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali pada triwulan I 2020 mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19. Ekonomi Bali dengan *output rill* sebesar Rp38,65 triliun tercatat tumbuh sebesar -1,14% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 5,51% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama, sebesar 2,97% (yoy). Pangsa ekonomi Bali terhadap nasional di triwulan I 2020 sebesar 1,54%, sedikit lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (1,61%).

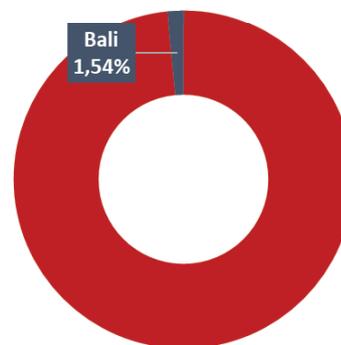
Dari sisi permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan bersumber dari kontraksi ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah serta

melambatnya kinerja konsumsi RT. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menurun signifikan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terutama terjadi sejak bulan Februari 2020 setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali ini kemudian menekan kinerja komponen ekspor luar negeri. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2020 terkontraksi karena menunggu kepastian postur anggaran yang baru (realokasi dan *refocusing* anggaran¹ untuk penanganan COVID-19). Kemudian, kinerja konsumsi RT tertahan seiring dengan kinerja pariwisata yang menurun. Selain itu, kinerja investasi



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik I.1. Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik I.2. Pangsa Ekonomi Bali Terhadap Nasional

1 Pemerintah Pusat melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Pada awal April 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur perubahan postur dan rincian APBN 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19.

masih kontraksi sebagaimana di triwulan sebelumnya meskipun sedikit membaik. Masih kontraksinya kinerja investasi ini disebabkan oleh tertundanya pengerjaan sejumlah proyek akibat protokol kesehatan yaitu *social distancing* di tengah pandemi COVID-19. Kinerja impor juga terus berkontraksi seiring dengan melambatnya kinerja pariwisata.

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Bali bersumber dari menurunnya kinerja beberapa lapangan usaha utama (LU), yaitu LU penyediaan akomodasi makan dan minum (akmamin), LU pertanian, LU perdagangan, LU konstruksi, serta LU transportasi. LU akmamin mengalami kontraksi pada triwulan laporan disebabkan oleh kinerja pariwisata yang menurun seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok menurun signifikan pada triwulan I 2020. Hal ini kemudian juga berdampak pada kinerja LU transportasi pada triwulan laporan. Selain itu, kunjungan wisatawan domestik juga mulai tertahan sejak triwulan I 2020 terutama sejak mulai diumumkan kasus positif COVID-19 pertama yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Kinerja LU pertanian juga melambat disebabkan oleh belum masuknya masa panen tanaman pangan. Musim panen padi baru mulai pada bulan April 2020. Kinerja LU perdagangan juga kontraksi seiring dengan menurunnya kinerja pariwisata Bali ditengah pandemi COVID-19. Selain itu, kinerja LU konstruksi juga melambat seiring dengan tertundanya pengerjaan sejumlah proyek dengan adanya protokol kesehatan *social distancing*. Pengerjaan penyelesaian beberapa proyek pembangunan hotel di Kabupaten Badung tertunda menunggu pandemi COVID-19 berakhir.

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan masih kontraksi, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I 2020. Hal ini seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin memburuk di triwulan II 2020 sehingga berbagai negara semakin intensif menerapkan *travel restriction* dan/ atau *lockdown*. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sudah mulai melakukan penutupan sementara per April 2020. Kemudian, Pemerintah Daerah Bali menerapkan kebijakan pencegahan COVID-19 dengan cara penutupan bandara, tempat wisata, serta pusat keramaian sejak Mei 2020. Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan II 2020 terutama bersumber dari melambatnya komponen konsumsi RT, investasi, dan ekspor luar negeri. Namun demikian, kinerja komponen belanja

pemerintah diperkirakan terakselerasi dibanding dengan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan II 2020 dari sisi penawaran diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU utama ekonomi Bali yaitu LU akmamin, LU konstruksi, serta LU perdagangan besar dan eceran.

Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan II 2020 bersumber dari melambatnya kinerja konsumsi RT, investasi, dan ekspor luar negeri. Kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2020 melambat terutama disebabkan oleh tertahannya pendapatan masyarakat seiring tertahannya kinerja pariwisata akibat kebijakan antisipasi COVID-19 *outbreak* sehingga sejumlah negara masih melakukan kebijakan *travel restriction* dan *lockdown*. Penurunan kinerja konsumsi RT yang lebih dalam tertahan oleh adanya perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 serta THR juga ikut menahan penurunan kinerja konsumsi RT yang lebih dalam. Masih berlangsungnya kebijakan *travel restriction* dan *lockdown* oleh sejumlah negara akibat pandemi COVID-19 juga akan menahan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, sehingga ekspor luar negeri diperkirakan juga akan kontraksi. Risiko semakin dalamnya perlambatan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali juga diperkirakan akan menahan ekspor barang luar negeri Bali.

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan II 2020 bersumber dari melambatnya kinerja hampir seluruh LU utama kecuali LU pertanian. Kinerja LU akmamin diperkirakan akan masih kontraksi di triwulan II 2020, lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya kebijakan *travel restriction* oleh Indonesia dan sejumlah negara asal wisatawan mancanegara. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai mulai melakukan penutupan sementara layanan untuk penerbangan komersial domestik maupun internasional per 25 April 2020. Selanjutnya, tertahannya kinerja pariwisata berdampak pada tertahannya kinerja LU perdagangan. Penurunan kinerja LU perdagangan yang lebih dalam tertahan oleh adanya perayaan HBKN yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan tertundanya penyelesaian sejumlah proyek hotel di Kabupaten Badung dengan adanya protokol *physical distancing*, berdampak pada turunya kinerja LU konstruksi. Disisi lain, kinerja LU pertanian diperkirakan membaik pada triwulan II 2020 seiring dengan masuknya masa panen tanaman pangan. Tanaman padi telah memasuki masa panen sejak April 2020 dan diperkirakan berlangsung hingga Juni 2020.

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PERMINTAAN

Kontraksi kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 dari sisi permintaan bersumber dari pertumbuhan negatif kinerja ekspor luar negeri, investasi dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, kinerja konsumsi RT masih dapat tumbuh positif meski melambat dibanding dengan periode sebelumnya.

1.3.1. Konsumsi

Komponen konsumsi pada periode laporan tumbuh 2,25% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,58% (yoy), bersumber dari kontraksi konsumsi pemerintah serta melambatnya konsumsi RT. Selain itu, kinerja konsumsi LNPRT juga mengalami kontraksi pada triwulan laporan.

Konsumsi Swasta: Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT)

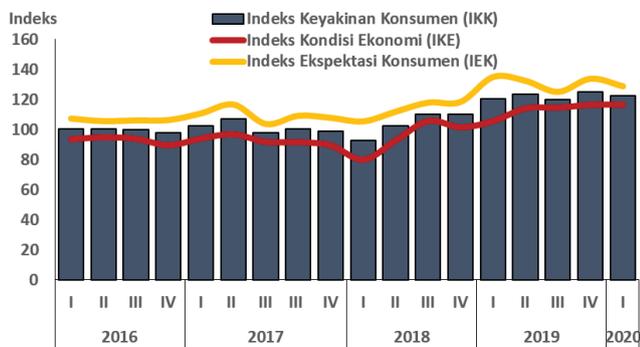
Kinerja konsumsi swasta yaitu konsumsi RT dan konsumsi LNPRT tertahan pada triwulan laporan. Konsumsi RT tumbuh 2,90% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,70% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT turun dari 6,00% (yoy) menjadi -4,67% (yoy). Perlambatan kinerja konsumsi RT pada triwulan laporan disebabkan oleh tertahannya daya beli seiring

dengan penurunan kinerja pariwisata di tengah pandemi COVID-19.

Perlambatan kinerja konsumsi RT pada triwulan I 2020 terkonfirmasi dari hasil survei konsumen dan survei penjualan eceran (SPE). Indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen dalam survei konsumen pada triwulan I 2020 lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya meskipun masih optimis (diatas 100). Hasil SPE juga menunjukkan terjadinya kontraksi total penjualan pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Sejumlah jenis barang yang menunjukkan kontraksi penjualan yaitu perlengkapan RT, pakaian jadi, serta barang kerajinan dan mainan.

Selain itu, kontraksi kinerja konsumsi RT pada triwulan I 2020 juga terkonfirmasi dari kinerja impor barang konsumsi dan kredit konsumsi. Impor barang konsumsi tumbuh sebesar -24,63% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya sebesar 19,17% (yoy). Kredit konsumsi juga melambat pada triwulan laporan dari 6,06% (yoy) menjadi 5,75% (yoy) pada triwulan I 2020.

Kinerja komponen konsumsi RT pada triwulan II 2020 diperkirakan melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik I.3. Hasil Survei Konsumen



Sumber : Bank Indonesia

Grafik I.4. Hasil Survei Penjualan Eceran

Tabel I.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Permintaan (% , yoy)

Komponen	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020 I
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi	7,02	1,94	4,22	3,97	4,22	4,50	4,53	6,17	3,77	4,74	8,56	5,62	4,87	6,58	6,36	2,25
Kons.RT	4,77	3,71	4,44	3,19	4,02	3,19	4,52	5,36	6,90	5,00	6,29	4,99	6,35	5,70	5,83	2,90
Kons.LNPRT	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,54	6,76	22,86	10,98	7,94	6,00	11,73	(4,67)
Kons. Pemerintah	29,07	(7,01)	3,59	6,47	5,28	14,23	3,94	10,03	(7,57)	3,08	23,73	8,45	(2,55)	10,40	8,50	(0,89)
Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	7,12	6,68	4,79	(2,24)	3,94	(1,58)
PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	7,12	6,71	4,89	(2,16)	3,99	(1,45)
Perubahan Inventori	9,50	19,74	(1,84)	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	(0,43)	3,02	6,71	(0,46)	(14,91)	(19,15)	(6,90)	(26,97)
Ekspor LN	11,25	11,29	11,45	(5,03)	7,09	(3,83)	3,35	11,67	15,15	6,45	3,54	(4,93)	0,33	(0,35)	(0,44)	(21,87)
Impor LN	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,66	6,04	(32,15)	(27,80)	(13,48)	(38,81)
Net Ekspor antar daerah	16,99	255,01	64,58	(69,37)	68,28	6,66	26,36	(18,36)	(1.320,68)	10,73	9,27	(10,00)	11,32	5,90	4,01	(9,35)
PDRB	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	(1,14)

Sumber: BPS, diolah

meningkatnya risiko penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat kebijakan *travel restriction* dan/atau *lockdown* oleh negara asal wisatawan. Berdasarkan data dari Angkasa Pura 1, kedatangan penumpang di pintu gerbang internasional Ngurah Rai pada 1 April - 25 Mei tumbuh -99,26% dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan kinerja konsumsi RT yang lebih dalam tertahan oleh adanya perayaan HBKN yaitu Ramadhan dan Idul Fitri serta adanya pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 serta THR.

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan I 2019, kinerja konsumsi pemerintah mengalami kontraksi setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar -0,89% (yoy), menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,40% (yoy). Penurunan kinerja konsumsi pemerintah tersebut disebabkan belanja yang tidak optimal di triwulan I 2020 saat menunggu kepastian postur anggaran baru. Penyusunan postur anggaran baru dilakukan seiring adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

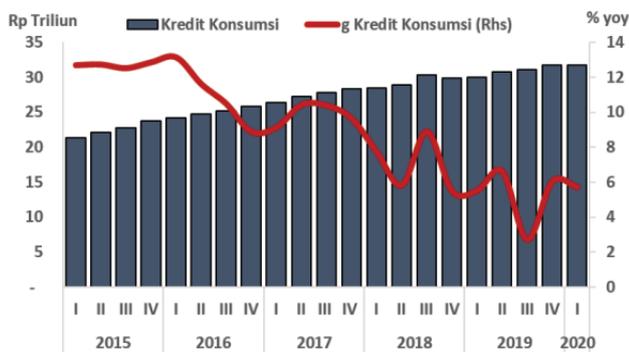
Penurunan kinerja konsumsi pemerintah terkonfirmasi dari penurunan belanja APBD 9 kabupaten/kota di Bali.

Realisasi belanja APBD 9 kabupaten/kota tumbuh -11,64% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (yoy). Namun demikian, penurunan kinerja konsumsi pemerintah lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi belanja APBD Provinsi Bali yang tumbuh 101,81% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding dengan triwulan sebelumnya, 8,67%.

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2020 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal itu didorong oleh peningkatan belanja bantuan sosial untuk penanganan dampak COVID-19. Pemerintah pusat meningkatkan belanja untuk program bantuan sosial baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program bantuan sembako. Selain itu, realisasi belanja di triwulan II 2020 diperkirakan akan lebih optimal seiring dengan telah disahkannya postur anggaran baru per April 2020 untuk *refocusing* dan realokasi penanganan dampak COVID-19.

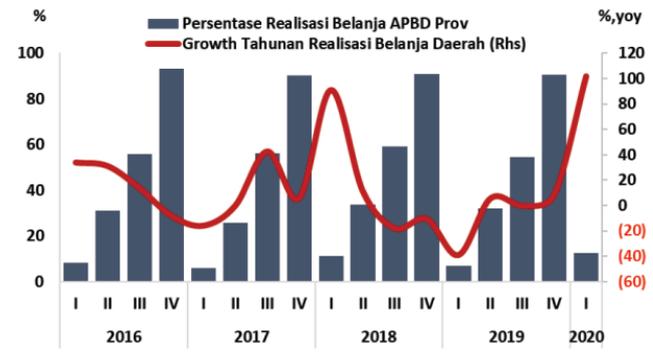
1.3.2. Investasi

Kinerja komponen investasi pada triwulan I 2020 masih mengalami kontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan I 2020 tumbuh -1,58% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh -2,24% (yoy).



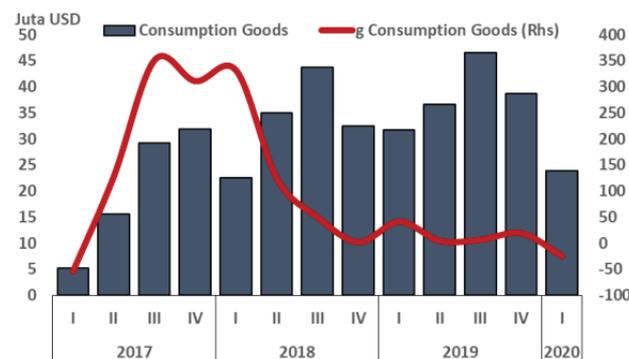
Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik I.5. Perkembangan Kredit Konsumsi



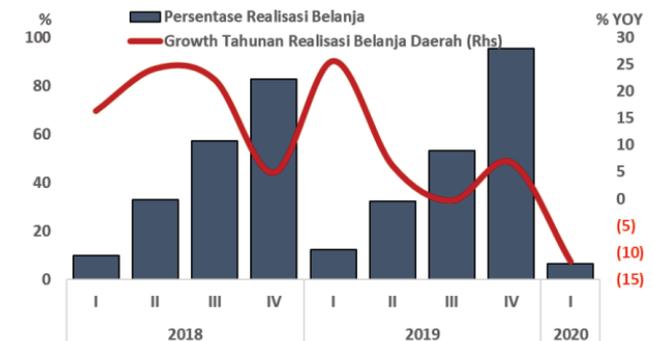
Sumber: DJPBN Prov. Bali

Grafik I.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali



Sumber : Bea dan Cukai, diolah

Grafik I.6. Perkembangan Impor Barang Konsumsi



Sumber: BPKAD Kab/Kota, Bali

Grafik I.8. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kab/Kota di Bali

Kontraksi kinerja investasi sejak triwulan IV 2019 disebabkan oleh tertundanya penyelesaian sejumlah proyek. Penyelesaian pembangunan beberapa hotel di Kabupaten Badung yang awalnya diundur ke semester II 2020 karena adanya penyesuaian desain kembali tertunda dengan adanya pandemi COVID-19. Selain itu, pembangunan *Rapid Exit Taxiway* Sisi Timur yang awalnya ditargetkan selesai di triwulan IV 2019 menjadi ditunda menunggu penyelesaian perpanjangan *runway*.

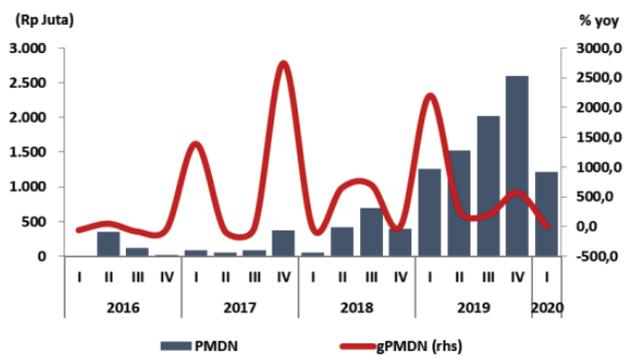
Kinerja investasi yang masih kontraksi pada triwulan laporan terkonfirmasi dari realisasi belanja modal baik yang menggunakan APBD Provinsi Bali maupun APBN. Realisasi belanja modal yang menggunakan APBD Provinsi Bali tumbuh -96,92% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (25,06%). Begitu juga dengan realisasi belanja modal yang menggunakan APBN, tumbuh 16,37% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (39,68%).

Kinerja investasi yang masih kontraksi juga terkonfirmasi dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), kredit investasi, serta hasil liaison Bank Indonesia. Realisasi PMDN pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar -3,35% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (566%). Kredit investasi juga

tercatat tumbuh melambat pada triwulan laporan, dari 22,48% (yoy) menjadi 16,46% (yoy). Sejalan dengan itu, hasil liaison Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa *likert* investasi pada triwulan I 2020 lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya.

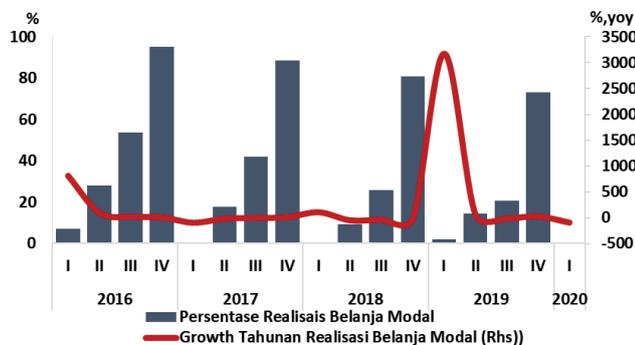
Kinerja investasi pada triwulan II 2020 diperkirakan lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja investasi diperkirakan masih akan tumbuh kontraksi pada triwulan II 2020 seiring dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 sehingga beberapa proyek investasi masih akan tertahan. Penyelesaian proyek perhotelan di Kabupaten Badung diperkirakan masih akan tertahan seiring dengan dilakukan protokol *physical distancing* ditengah pandemi COVID-19.



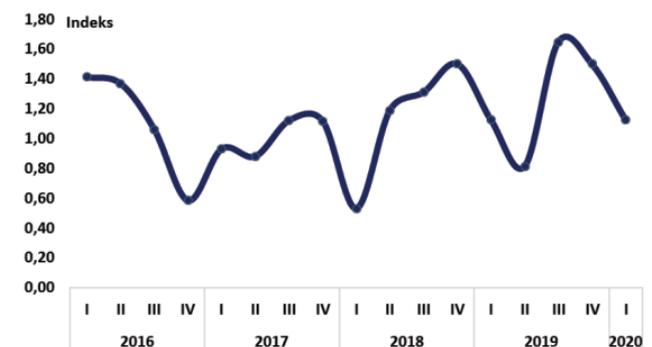
Sumber: BKPM

Grafik I.11. Perkembangan Realisasi PMDN



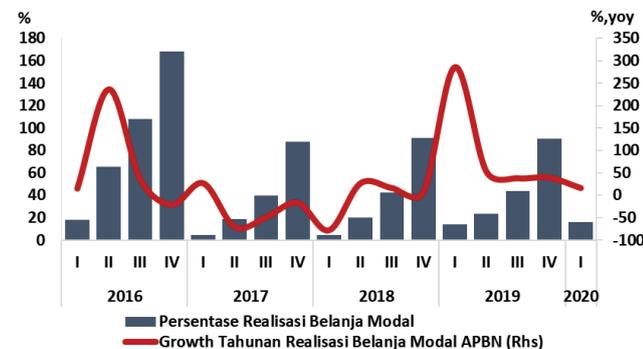
Sumber: BPKAD Provinsi Bali

Grafik I.9. Perkembangan Realisasi Belanja Modal APBD Provinsi Bali



Sumber: Liaison, Bank Indonesia

Grafik I.12. Likert Investasi, Liaison



Sumber: DJPb Kanwil Bali

Grafik I.10. Perkembangan Realisasi Belanja Modal APBN di Bali



Sumber: LBU, Bank Indonesia

Grafik I.13. Perkembangan Kredit Investasi

1.3.3. Ekspor Barang dan Jasa

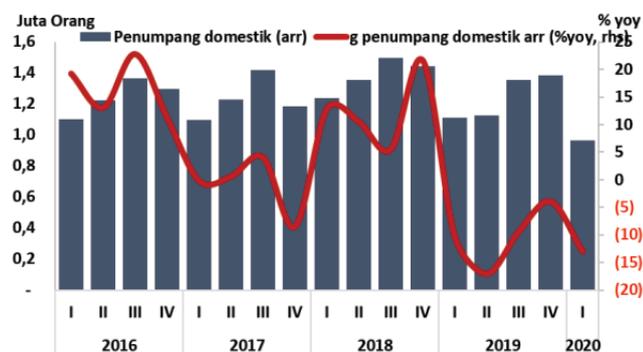
Kinerja ekspor luar negeri Bali berkontraksi makin dalam pada triwulan laporan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali tumbuh -21,87% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh -0,35% (yoy). Menurunnya kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor jasa seiring dengan menurunnya kinerja pariwisata Bali. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sudah mulai menurun sejak triwulan I 2020 sebagai dampak mulai merebaknya virus COVID-19 di dunia sejak akhir tahun 2019. Sejak awal tahun 2020 sejumlah negara melakukan *travel restriction* bahkan *lockdown*. Sementara itu, Indonesia melakukan penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok per Februari 2020. Selain itu, kunjungan wisatawan domestik juga mulai tertahan sejak triwulan I 2020 terutama sejak mulai diumumkan kasus positif COVID-19 pertama yaitu pada tanggal 2 Maret 2020.

Kontraksi kinerja ekspor luar negeri pada triwulan laporan terkonfirmasi dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, kedatangan penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai, serta kedatangan penumpang melalui kapal pesiar di pelabuhan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada triwulan

I 2020 tumbuh -21,82% (yoy), lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,69%. Selain itu, kedatangan wisatawan domestik yang tergambar dari kedatangan penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai juga menurun menjadi -12,99% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-3,95%). Sementara itu, kedatangan penumpang kapal pesiar di pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menurun, tumbuh -83,92% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (21,28%).

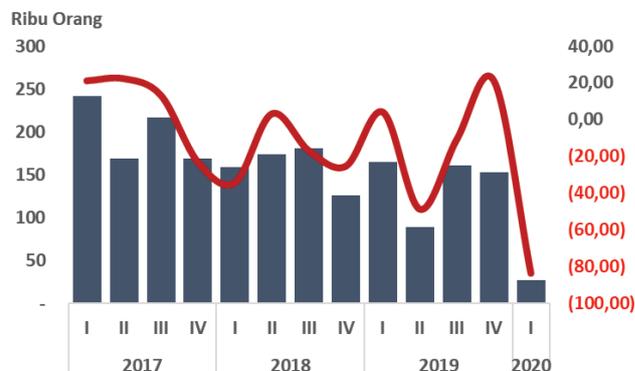
Sementara itu, ekspor barang Bali pada triwulan I 2020 masih berkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Ekspor barang Bali tumbuh -8,16% (yoy), sedikit membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya (-9,55%). Kontraksi ekspor barang Bali tersebut bersumber dari beberapa negara mitra dagang utama. Kinerja ekspor barang yang masih kontraksi dipengaruhi oleh terganggunya distribusi perdagangan dunia dan menurunnya permintaan di tengah pandemi COVID-19. Kinerja ekspor barang Bali terkonfirmasi dari hasil liaison oleh Bank Indonesia. *Likert scale* penjualan ekspor hasil liaison pada triwulan I 2020 menunjukkan penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Ekspor barang Bali ke AS, Tiongkok, dan Australia masih kontraksi seperti triwulan sebelumnya. Ekspor



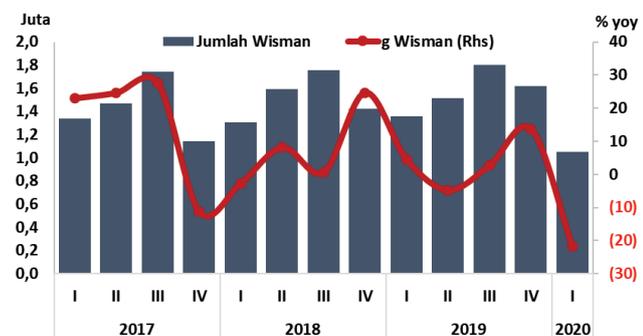
Sumber: Angkasa Pura I, diolah

Grafik I.14. Perkembangan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Ngurah Rai



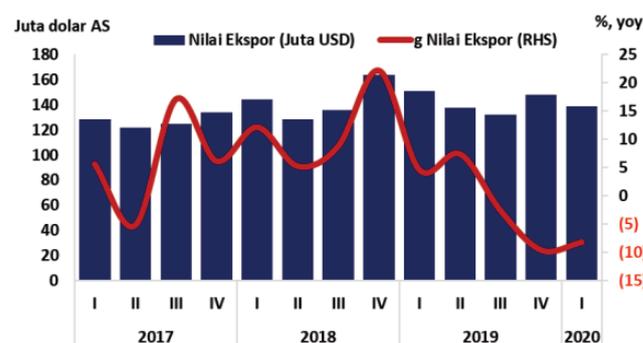
Sumber: PT. Pelindo III, diolah

Grafik I.16. Jumlah Kedatangan Penumpang Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang



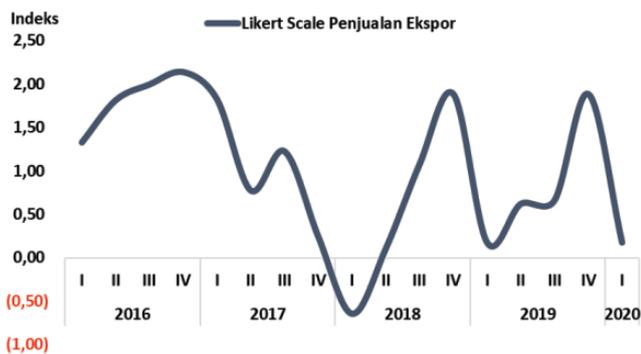
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.15. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali



Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik I.17. Perkembangan Ekspor Barang Bali

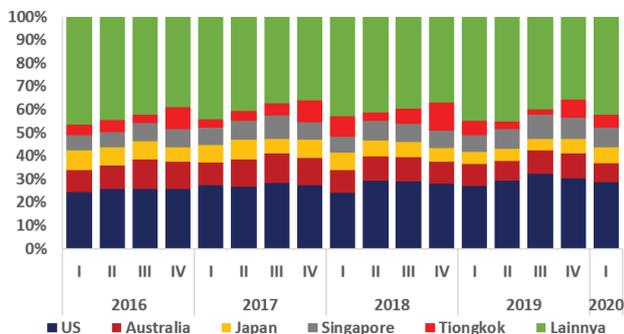


Sumber: Liaison, Bank Indonesia

Grafik I.18. Likert Scale Penjualan Ekspor

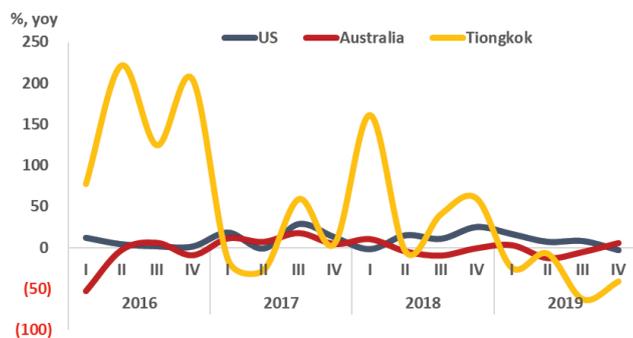
barang Bali ke AS tumbuh -1,69% (yoy) pada triwulan I 2020, sebagaimana triwulan sebelumnya yang juga kontraksi (-2,77%). AS menjadi pasar ekspor Bali untuk produk perikanan, olahan kayu, dan tekstil. Selain itu, ekspor barang Bali ke Tiongkok tumbuh -16,87% (yoy), masih kontraksi seperti triwulan sebelumnya (-41,54%;yoy). Tiongkok menjadi pasar ekspor Bali untuk komoditas perikanan dan olahan kayu. Sejalan dengan itu, ekspor barang ke Australia tumbuh 5,52% (yoy) menjadi -20,87% (yoy) pada triwulan I 2020.

Ekspor perikanan, pakaian jadi, dan perhiasan masih kontraksi pada triwulan laporan. Ekspor perikanan (pangsa 25,27%) tumbuh -2,61% (yoy), sebagaimana



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik I.19. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama



Sumber: Bea dan Cukai

Grafik I.20. Pertumbuhan Nilai Ekspor 3 Negara Tujuan Utama

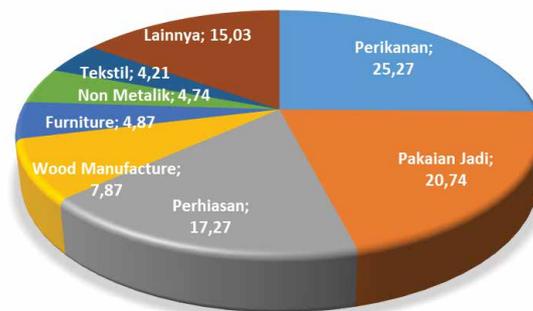
triwulan sebelumnya yang juga kontraksi (-15,53%). Sejalan dengan itu, ekspor pakaian jadi (pangsa 20,74%) terkontraksi lebih dalam pada triwulan laporan, dari -1,82 (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi -6,58% (yoy) pada triwulan laporan. Selain itu, ekspor perhiasan (pangsa 17,27%) juga masih tumbuh kontraksi pada triwulan laporan (-2,23%;yoy).

Ekspor luar negeri Bali pada triwulan II diprakirakan akan masih kontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Kontraksi tersebut bersumber dari kinerja ekspor jasa yang diprakirakan akan masih kontraksi seiring dengan kinerja pariwisata yang masih tertahan.

Kinerja pariwisata Bali pada triwulan II diprakirakan akan masih tertahan disebabkan oleh pertumbuhan negatif kunjungan wisatawan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kinerja ekspor barang juga akan masih tertekan seiring permintaan dari negara mitra dagang yang menurun sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi serta gangguan distribusi barang di tengah pandemi COVID-19.

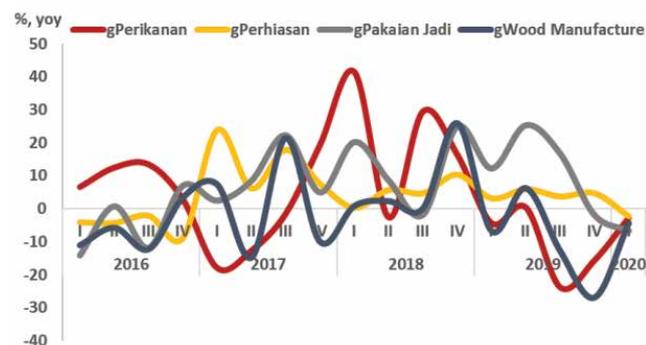
1.3.4. Impor Barang dan Jasa

Tekanan impor pada triwulan I 2020 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Impor tumbuh -38,81% (yoy) pada triwulan I 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-27,80%;yoy).



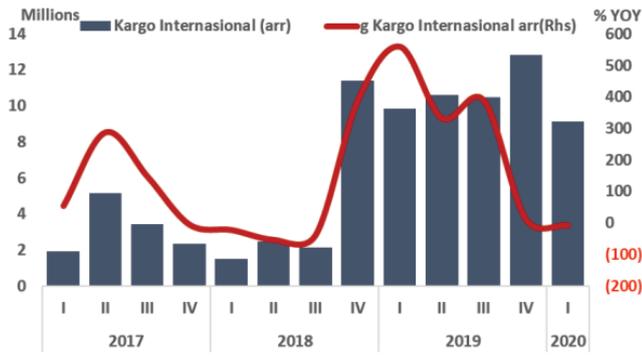
Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik I.21. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama



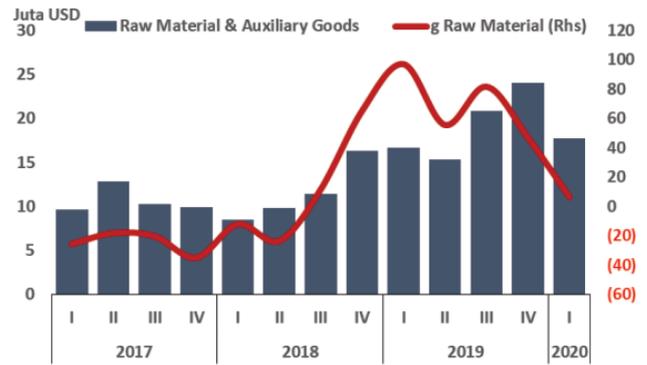
Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik I.22. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama



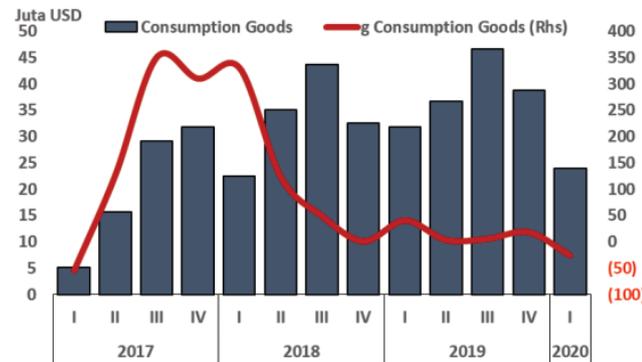
Sumber: PT. AP I, diolah

Grafik I.23. Perkembangan Kedatangan Kargo Internasional di Bandara Ngurah Rai



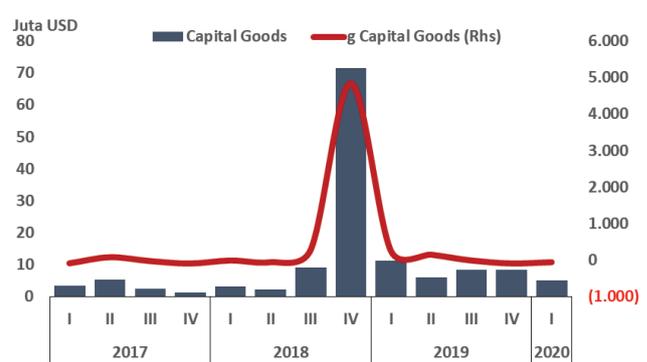
Sumber: Bea Cukai

Grafik I.25. Perkembangan Impor Barang Setengah Jadi



Sumber: Bea Cukai

Grafik I.24. Perkembangan Impor Barang Konsumsi



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.26. Perkembangan Impor Barang Modal

Penurunan tekanan impor ini sejalan dengan penurunan kinerja pariwisata yang menyebabkan penurunan permintaan kebutuhan produk-produk makanan impor untuk hotel dan restoran. Penurunan tekanan impor terkonfirmasi dari kedatangan kargo internasional di Bandara Ngurah Rai yang pada triwulan I 2020 tumbuh -6,92% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (12,45%;yoy).

Penurunan tekanan impor terjadi pada impor barang konsumsi serta barang setengah jadi. Impor barang konsumsi tumbuh -24,63% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (19,17%). Sejalan dengan itu, impor barang setengah jadi tumbuh 6,52% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (46,93%;yoy). Sementara itu, impor barang modal masih tumbuh kontraksi sebesar -53% (yoy), sedikit membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya -88,03% (yoy).

Kinerja impor Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan juga masih akan berkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Kondisi ini seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan permintaan barang impor. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali juga berpotensi menekan permintaan barang impor dari hotel dan restoran untuk barang-barang *food and beverages*. Disamping itu, terbatasnya

kegiatan konstruksi di triwulan II 2020 juga diperkirakan menjadi sumber kontraksi impor.

1.4. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan I 2020 bersumber dari menurunnya kinerja LU utama Bali yaitu LU akmamin, LU pertanian, LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU transportasi. Kinerja LU akmamin yang berkontraksi disebabkan oleh kinerja pariwisata yang menurun seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Kinerja LU lainnya seperti LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU transportasi juga dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Sementara itu, kinerja LU pertanian melambat pada triwulan I 2020 seiring dengan belum masuknya masa puncak panen tanaman padi. Perkembangan struktur ekonomi Bali pada triwulan I 2020 masih didominasi 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: 1) penyediaan akomodasi makan dan minum (pangsa 21,81%); 2) pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 13,67%); 3) konstruksi (pangsa 10,02%); 4) transportasi (pangsa 9,06%); 5) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (pangsa 8,57%). Kondisi ini tidak berbeda dibanding dengan triwulan sebelumnya.

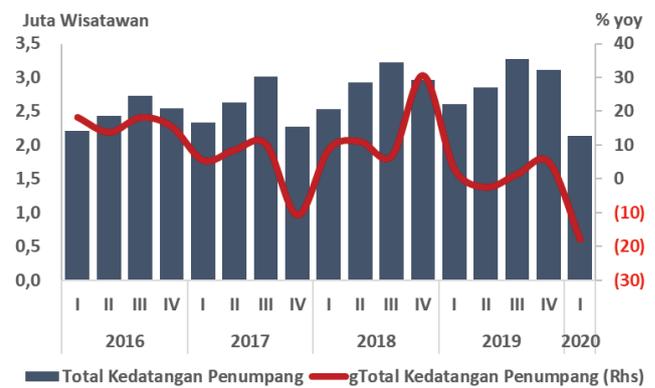
1.4.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum

Pada triwulan I 2020, kinerja LU akmamin mengalami kontraksi, menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU akmamin pada triwulan laporan tumbuh -9,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh 6,03% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga menekan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah negara menerapkan kebijakan *travel restriction* dan/atau *lockdown* sehingga menahan kunjungan wisata. Indonesia menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok per Februari 2020 sehingga menekan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok sebagai salah satu pasar utama. Selain itu, kunjungan wisatawan negara lain juga mulai menurun sejak triwulan I 2020 dengan adanya COVID-19 *Outbreak*. Sejalan dengan hal tersebut, kunjungan wisatawan domestik juga mulai tertahan sejak triwulan I 2020, terutama sejak mulai diumumkan kasus positif COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020.

Kinerja LU akmamin yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2020 terkonfirmasi oleh pertumbuhan negatif kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh -21,82% (yoy) pada triwulan I 2020, menurun dibanding

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,69% (yoy). Penurunan terutama terjadi pada kunjungan wisatawan mancanegara pasar utama yaitu Australia, Tiongkok, dan Indonesia. Kunjungan wisatawan dari Australia tumbuh -9,61% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,68% (yoy). Sementara itu, kunjungan wisatawan Tiongkok dan India masing-masing tumbuh -64% (yoy) dan -19,75% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-9,21% dan 18,26%;yoy).

Kontraksi LU akmamin pada triwulan I 2020 terkonfirmasi dari kedatangan penumpang di



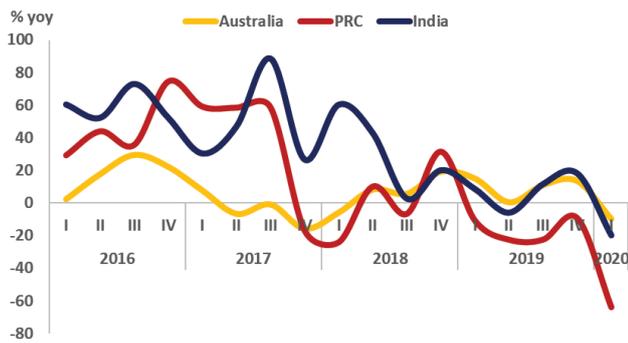
Sumber : Dinas Pariwisata Prov. Bali, diolah

Grafik I.27. Kedatangan Penumpang di Bandara Ngurah Rai

Tabel 1.2. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Penawaran (% , yoy)

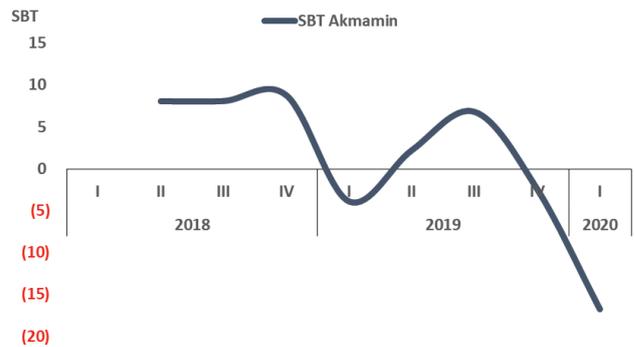
Lapangan Usaha	2017				2017	2018				2019				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,31	4,88	4,05	(1,37)	2,88	4,71	2,95	3,72	6,92	2,35	7,06	3,64	2,18	0,06
Pertambangan dan Penggalian	2,54	0,39	1,91	(10,49)	(1,44)	(6,26)	(3,12)	(4,00)	3,44	(4,10)	(8,12)	1,04	6,56	3,24
Industri Pengolahan	3,58	(0,05)	0,65	(0,66)	0,86	1,32	5,66	6,72	9,16	9,60	7,20	4,32	6,30	(7,95)
Pengadaan Listrik, Gas	0,40	(0,16)	8,40	13,50	5,48	4,90	6,52	0,50	(3,51)	1,50	1,43	3,09	11,95	8,07
Pengadaan Air	1,82	4,86	3,05	1,16	2,72	(1,88)	2,92	2,14	4,87	6,04	4,09	6,22	7,30	8,42
Konstruksi	6,41	7,29	8,02	8,94	7,69	9,04	9,48	11,77	9,40	8,85	8,03	6,56	6,28	2,92
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,38	8,12	9,64	5,28	7,84	5,20	6,52	7,82	12,34	7,92	10,04	7,89	4,13	(1,67)
Transportasi dan Pergudangan	5,24	6,10	6,00	2,65	4,99	6,72	6,10	2,96	8,79	5,03	3,56	5,16	5,08	(6,21)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	9,73	11,18	6,65	9,25	6,64	6,41	4,41	8,26	4,55	3,07	5,54	6,03	(9,11)
Informasi dan Komunikasi	8,19	8,36	7,58	8,42	8,14	9,21	8,80	7,96	6,12	5,99	6,21	8,23	7,77	7,41
Jasa Keuangan	5,06	6,34	0,70	(2,01)	2,43	1,06	(0,31)	3,29	3,84	6,89	8,97	8,73	10,47	7,35
Real Estate	2,56	3,42	4,03	5,06	3,78	2,38	3,91	5,73	6,44	8,22	5,61	5,26	2,72	3,02
Jasa Perusahaan	8,56	7,66	5,90	5,65	6,91	6,94	8,40	9,00	6,83	4,10	4,01	5,99	4,33	0,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,10)	(5,06)	(1,34)	0,33	(1,59)	0,95	6,33	8,52	3,23	12,10	3,16	(2,31)	5,88	7,13
Jasa Pendidikan	7,30	8,11	5,24	7,44	7,00	9,25	9,30	8,84	4,31	3,23	3,91	5,62	7,06	(0,27)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	7,92	7,76	9,06	8,44	9,29	9,44	9,16	6,61	6,24	6,27	4,82	5,60	6,26
Jasa lainnya	9,57	8,26	7,52	6,68	7,98	7,53	9,29	9,59	8,97	7,39	6,35	8,01	7,49	(2,82)
PDRB	6,24	5,97	6,23	4,01	5,59	5,62	6,11	6,24	7,59	6,01	5,69	5,34	5,51	(1,14)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



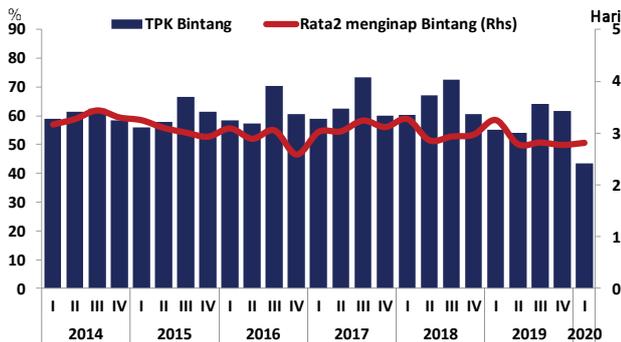
Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik I.28. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan 3 Negara Utama



Sumber : SKDU, Bank Indonesia

Grafik I.30. Perkembangan Kegiatan Usaha Akmamin



Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik I.29. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Bandara Ngurah Rai serta kedatangan penumpang di pelabuhan. Total kedatangan penumpang (domestik dan internasional) di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2020 tumbuh -17,95% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,015 (yoy). Selain itu, kedatangan penumpang kapal pesiar di Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menurun, dari 21,28% pada triwulan IV 2019 menjadi -83,92% (yoy).

Kinerja LU akmamin pada triwulan I 2020 juga terkonfirmasi dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) serta hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). TPK hotel bintang di Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 43,56%, menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 61,77%. Selain itu, perkembangan kegiatan usaha LU akmamin menurut hasil SKDU juga menunjukkan penurunan dari -2,42% menjadi -16,77%.

Memasuki triwulan II 2020, kinerja LU akmamin diperkirakan akan tetap mengalami kontraksi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh memburuknya perkembangan penyebaran COVID-19 sehingga sejumlah negara menerapkan kebijakan *travel restriction* dan/atau *lockdown*. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sudah

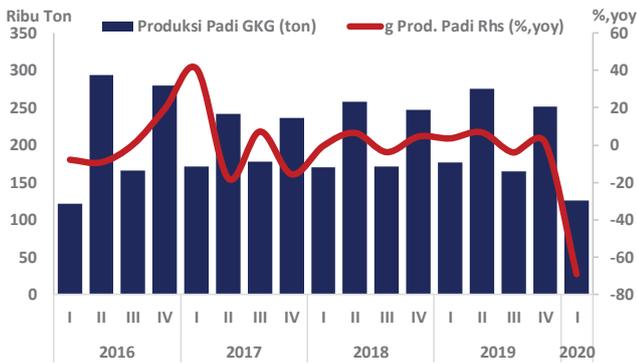
mulai melakukan penutupan sementara layanan untuk penerbangan komersial domestik maupun internasional per 25 April 2020. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada memburuknya kinerja ekspor barang seiring dengan menurunnya kinerja ekonomi negara mitra dagang sehingga menekan permintaan serta gangguan distribusi barang.

1.4.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

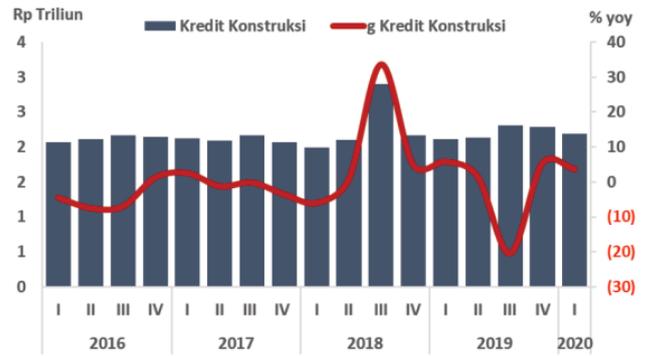
Kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha pertanian tercatat tumbuh 0,06% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18% (yoy). Penurunan kinerja LU pertanian disebabkan oleh belum masuknya masa panen tanaman pangan yaitu padi. Daerah sentra produksi padi di Bali seperti di Tabanan baru akan memasuki masa panen di awal triwulan II 2020.

Kinerja LU pertanian pada triwulan I 2020 yang melambat terkonfirmasi dari produksi padi, Nilai Tukar Petani (NTP), serta hasil SKDU. Produksi padi (gabah kering giling) pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh -69,22% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,59% (yoy). Selain itu, indikator NTP juga menunjukkan penurunan, terutama indeks NTP tanaman pangan yaitu dari 103,75 menjadi 101,17 pada triwulan I 2020. Sejalan dengan itu, perkembangan kegiatan usaha LU pertanian (SKDU) menunjukkan penurunan dari 4,25% pada triwulan IV 2019 menjadi -6,27% pada triwulan laporan.

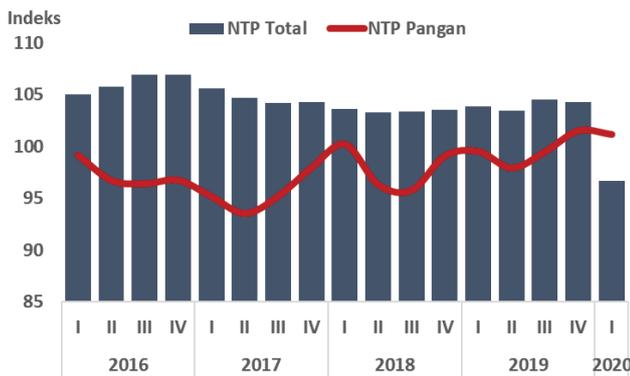
Kinerja LU pertanian pada triwulan II 2020 diperkirakan terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja LU pertanian



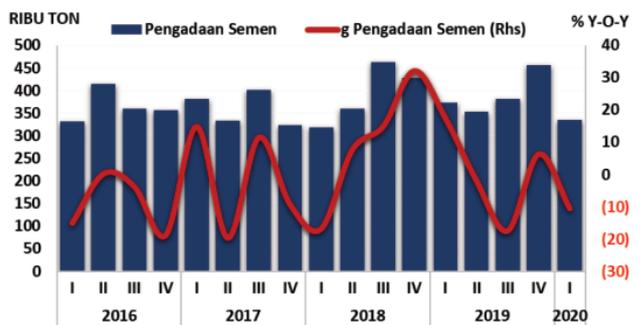
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Bali
Grafik I.31. Perkembangan Produksi Padi



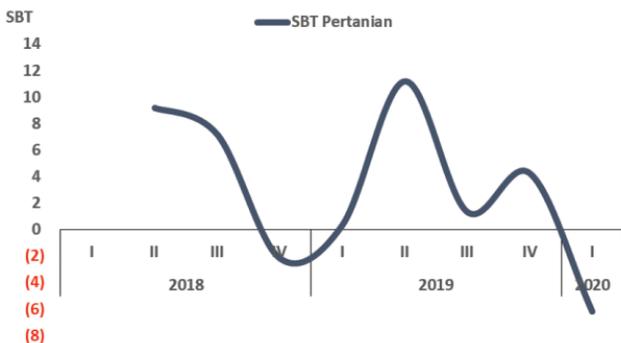
Sumber: LBU, Bank Indonesia
Grafik I.34. Perkembangan Kredit Konstruksi



Sumber : BPS Provinsi Bali
Grafik I.32. Nilai Tukar Petani



Sumber : PT. Semen Indonesia
Grafik I.35. Perkembangan Penjualan Semen



Sumber: SKDU, Bank Indonesia
Grafik I.33. Perkembangan Kegiatan Usaha Pertanian

pada triwulan II 2020 diperkirakan terutama bersumber dari kinerja tanaman pangan. Hal ini seiring dengan masuknya masa puncak panen padi di sentra produksi padi seperti Kabupaten Tabanan yang berlangsung April-Juni 2020.

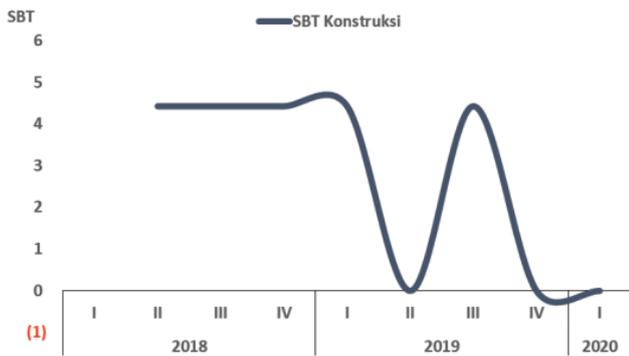
1.4.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU konstruksi pada triwulan laporan menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh 2,92% (yoy), melambat dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,28% (yoy). Perlambatan kinerja LU ini seiring dengan

tertundanya penyelesaian pengerjaan sejumlah proyek karena adanya protokol kesehatan *social distancing* di tengah pandemi COVID-19. Penyelesaian beberapa proyek pembangunan hotel di Kabupaten Badung tertunda menunggu pandemi COVID-19 berakhir. Sebelumnya, proyek pembangunan beberapa hotel di Kabupaten Badung yang ditargetkan selesai pada triwulan IV 2019, juga tertunda penyelesaiannya karena adanya perubahan desain. Selain itu, proyek pengembangan Bandara Ngurah Rai berupa *Rapid Exit Taxiway* sisi timur juga ditunda menunggu perpanjangan *runway*.

Kinerja LU konstruksi yang melambat pada triwulan I 2020 terkonfirmasi dari kinerja kredit konstruksi, penjualan semen serta hasil SKDU. Kredit konstruksi pada triwulan I 2020 tumbuh 3,68% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy). Penjualan semen pada triwulan I 2020 tumbuh -10,41% (yoy), melambat dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,37% (yoy). Selain itu, perkembangan kegiatan usaha LU konstruksi hasil SKDU juga menunjukkan stagnan sejak triwulan sebelumnya.

Kinerja LU konstruksi pada triwulan II 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi. Kontraksi



Sumber : SKDU, Bank Indonesia

Grafik I.36. Perkembangan Kegiatan Usaha Konstruksi

kinerja LU konstruksi pada triwulan II 2020 diprakirakan disebabkan oleh masih tertundanya penyelesaian sejumlah proyek hotel di Kabupaten Badung dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 sehingga masih menjalankan protokol *physical distancing*. Namun demikian, sejumlah proyek infrastruktur pemerintah (*Shortcut* Jalan Singaraja-Mengwitani, Bendungan Sidan) masih tetap berlanjut.

1.4.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan laporan tumbuh kontraksi, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU perdagangan tumbuh -1,67% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,13% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja pariwisata Bali seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan ke Bali. Hal ini kemudian berdampak pada tertahannya konsumsi RT sehingga menekan aktivitas perdagangan.

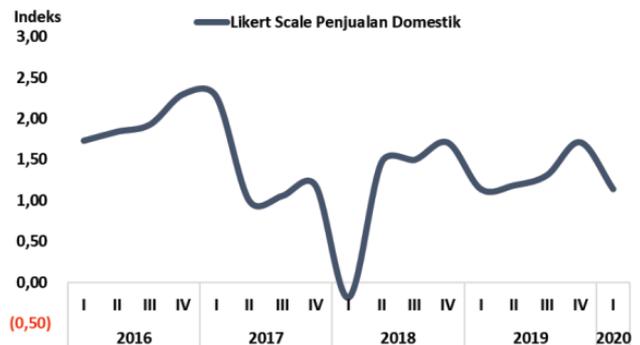
Perlambatan kinerja LU perdagangan terkonfirmasi dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), hasil liaison dan hasil SKDU. Total penjualan tumbuh -8,77% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,05% (yoy). Perlambatan penjualan tersebut disebabkan oleh perlambatan penjualan beberapa jenis barang yaitu perlengkapan RT, barang kerajinan, serta pakaian jadi. Hasil liaison Bank Indonesia juga menunjukkan *likert scale* penjualan domestik yang menurun dari 1,71 pada triwulan IV 2019 menjadi 1,14 pada triwulan laporan. Selain itu, hasil perkembangan kegiatan usaha dalam hasil SKDU juga menunjukkan penurunan dari 1,33% menjadi -5,30% pada triwulan laporan.

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran pada



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia

Grafik I.37. Perkembangan Kegiatan Usaha Perdagangan



Sumber : Liaison, Bank Indonesia

Grafik I.38. Likert Scale Penjualan Domestik

triwulan II 2020 diprakirakan akan mengalami kontraksi yang lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin tertahannya kinerja pariwisata seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin turun di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya COVID-19 *outbreak*, Pemerintah Daerah Bali melaksanakan kebijakan pencegahan COVID-19 dengan cara penutupan Bandara, tempat wisata, serta pusat-pusat keramaian sejak Mei 2020 sehingga ikut menekan aktivitas perdagangan. Sementara itu, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh adanya perayaan HBKN yaitu Ramadhan dan Idul Fitri serta pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 serta pembayaran THR.

1.4.5. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU transportasi tercatat kontraksi pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU transportasi tumbuh -6,21% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,08% (yoy). Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja pariwisata seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan ke Bali di tengah pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat negara-negara menjalankan kebijakan *travel restriction*

dan/atau *lockdown*, termasuk Indonesia. Pada bulan Februari 2020, Indonesia membuat kebijakan pelarangan penerbangan dari dan ke Tiongkok.

Kinerja LU transportasi yang kontraksi pada triwulan laporan terkonfirmasi oleh kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai, kedatangan kargo, serta hasil SKDU. Total kedatangan penumpang (domestik dan internasional) di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan I 2020 tumbuh -17,95% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,01% (yoy). Selain itu, kedatangan kargo domestik di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2020 tumbuh -35% (yoy), lebih rendah

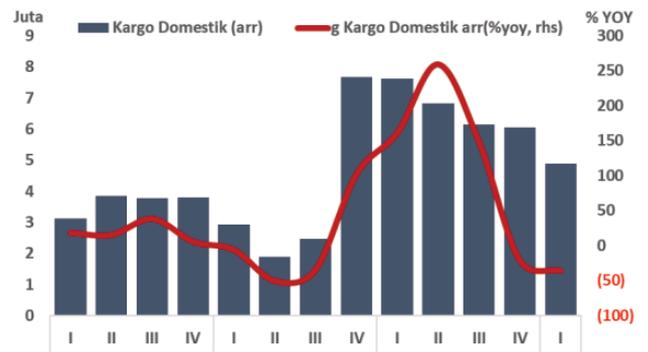
dibanding dengan triwulan sebelumnya (-21,02%;yoy). Sejalan dengan itu, perkembangan kegiatan usaha transportasi hasil SKDU menunjukkan penurunan dari 1,98% menjadi -5,94%.

Kinerja LU transportasi pada triwulan II 2020 diperkirakan akan berkontraksi lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 di triwulan II 2020 yang semakin parah dibanding dengan triwulan sebelumnya sehingga berbagai negara semakin intensif menerapkan kebijakan *travel restriction* dan *lockdown*.



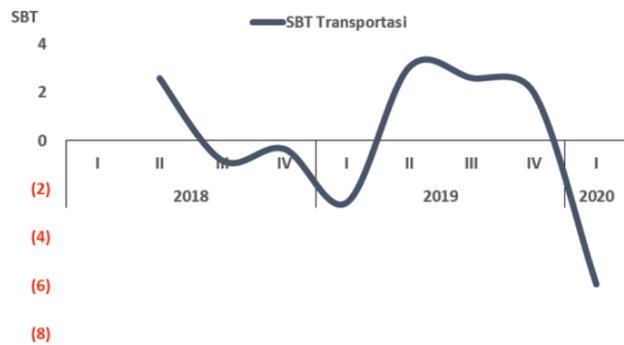
Sumber : PT AP I, diolah

Grafik I.39. Perkembangan Kedatangan Penumpang Bandara Ngurah Rai



Sumber: PT. AP I

Grafik I.41. Kedatangan Kargo Domestik di Bandara Ngurah Rai



Sumber : SKDU, Bank Indonesia

Grafik I.40. Perkembangan Kegiatan Usaha Transportasi

Halaman ini sengaja dikosongkan



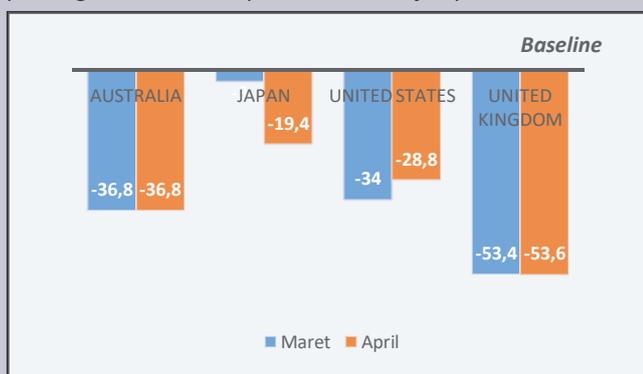
BOKS 1

ANALISIS *POTENTIAL IMPACT* PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN BALI DENGAN MENGGUNAKAN *COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODEL*

I. Latar Belakang

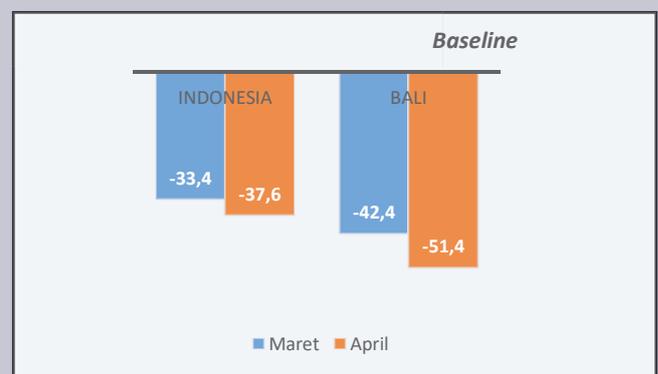
Penyebaran COVID-19 secara global telah menyebabkan disrupsi pada rantai kegiatan perekonomian. Secara global, mayoritas negara-negara di dunia menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas (*lockdown*) sebagai respon pencegahan terhadap memburuknya pandemi. Hal ini

juga terjadi pada negara-negara mitra dagang utama Bali. Secara nasional, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan perlintasan orang dari dan ke Indonesia dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹ untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Bali juga menerapkan kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Kegiatan



Sumber : Google Mobility Report, diolah

Gambar I.1. Kontraksi Mobilitas² di Negara Mitra Dagang Utama Bali periode Maret & April 2020



Sumber : Google Mobility Report, diolah

Gambar I.2. Kontraksi Mobilitas di Indonesia & Provinsi Bali periode Maret & April 2020

1 Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi di Indonesia
 2 Kontraksi mobilitas dari *baseline* merupakan rata-rata dari penurunan mobilitas mengunjungi *retail and recreation, grocery and pharmacy, parktransit station, workplaces.*

Masyarakat (PKM). Berkurangnya aktivitas di luar rumah pada periode Maret dan April 2020 tercermin pada grafik berikut.

Kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian (World Bank, 2020). *World Economic Outlook-IMF* memprediksi perekonomian dunia akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3% (yoy) pada 2020. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan mengalami kontraksi 5,9%, Euro Area diperkirakan berkontraksi 7,5%, sementara perekonomian *emerging and developing* Asia diperkirakan masih akan tumbuh positif meski melambat. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memprediksi perlambatan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2020. Perekonomian Bali diperkirakan juga terdampak oleh COVID-19. Penurunan kinerja ekonomi global dan nasional, serta kebijakan pembatasan sosial diperkirakan akan menyebabkan kontraksi perekonomian Bali pada tahun 2020.

II. Metodologi

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Bali diestimasi dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE). Model ini adalah model ekonomi yang mewakili perekonomian nasional yang dilandasi perilaku ekonomi mikro yang rinci, dan terdiri dari sistem n persamaan non-linear dengan n variabel endogen serta sejumlah variabel eksogen. Sistem persamaan tersebut berfungsi menentukan harga dan kuantitas komoditas dan input (termasuk input primer misalnya, tenaga kerja, modal, dan lahan serta input antara).

Persamaan dalam model merupakan representasi dari perilaku optimal agen ekonomi yang rasional. Dalam hal ini produsen dan konsumen berinteraksi dalam ekonomi pasar yang kompetitif. Interaksi ini

membentuk permintaan dan penawaran komoditas yang dipertemukan di pasar yang dimodelkan sebagai sebuah ekuilibrium, keseimbangan atau *market-clearing*.

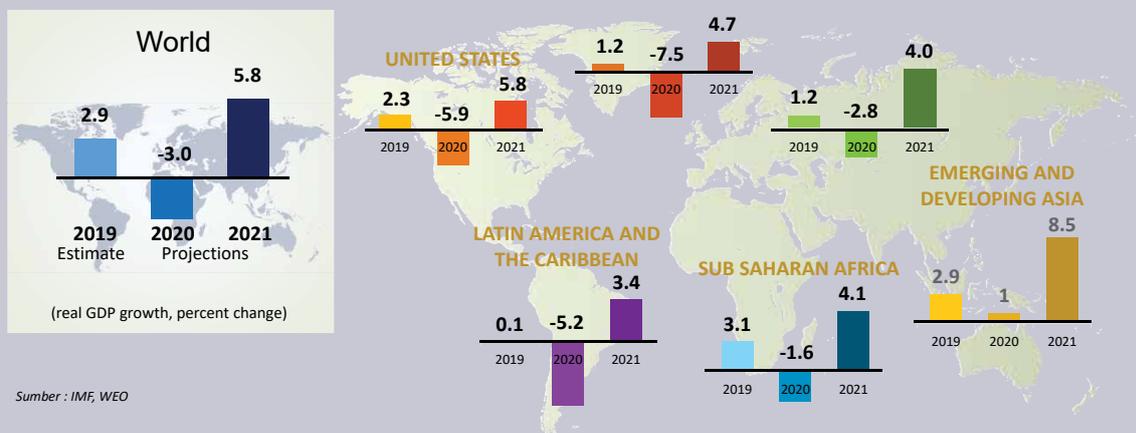
Model CGE yang digunakan dalam perhitungan adalah model antar-daerah yang bersifat *bottom-up* (ekonomi nasional merupakan agregasi dari ekonomi sub-nasional). Tidak seperti jenis model multi-wilayah yang bersifat *top-down*, dengan model *bottom-up*, setiap komoditas, tak terkecuali, memiliki persamaan ekuilibrium (*market-clearing*) sendiri-sendiri untuk masing-masing daerah. Dengan demikian, harga untuk masing-masing komoditas berbeda di setiap daerah. Salah satu kegunaannya, kita dapat memformulasikan *shock* yang sifatnya spesifik di daerah tertentu.

III. Dampak Potensial Terhadap Perekonomian Bali

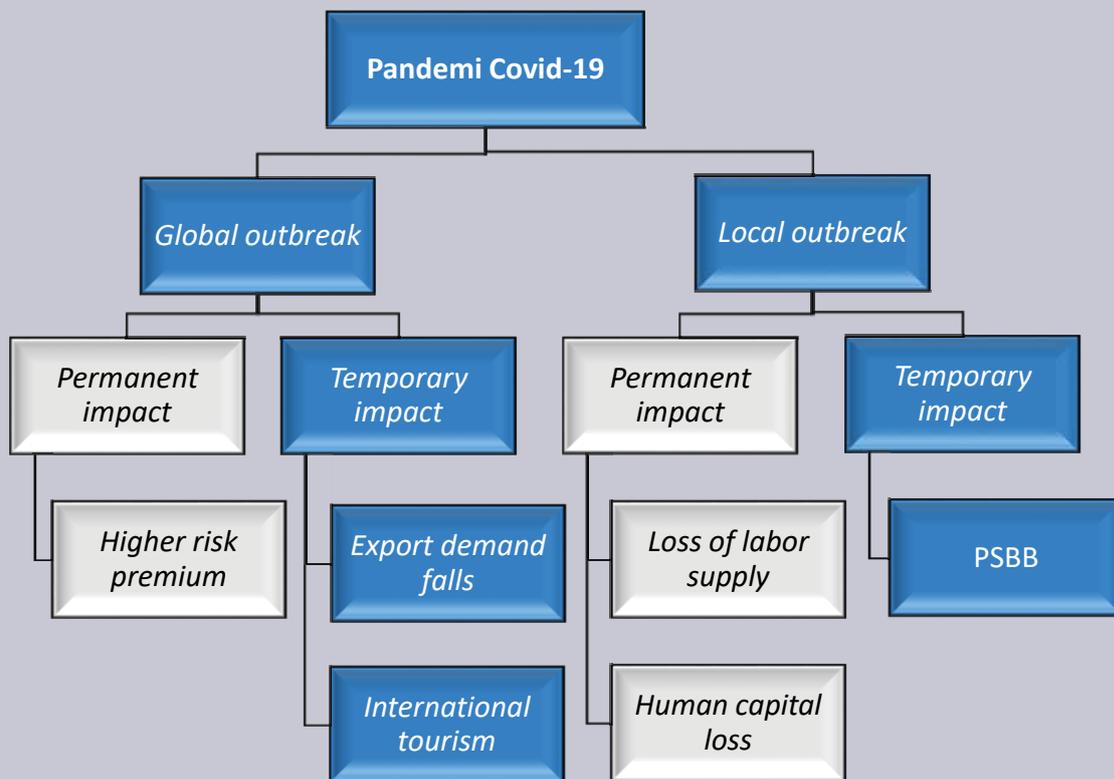
Transmisi dampak pandemi COVID-19 didekati dengan menggunakan mekanisme (i) Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan internasional (ii) Penurunan dari aktivitas pariwisata internasional (iii) Disrupsi produksi sebagai dampak dari karantina, *social distancing*, dan berbagai pembatasan mobilitas sebagai dampak dari respon terhadap pandemi. Estimasi dilakukan pada transmisi *temporary impact* sebagaimana tercermin pada bagan berikut.

Dampak COVID-19 terhadap kinerja ekspor Bali diestimasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$e_i = \sum_c S_{ic} g_c$$
, dimana e_i adalah persentase penurunan ekspor komoditi i sebagai dampak dari pandemi, S_{ic} adalah *share* dari negara c terhadap ekspor komoditi i dari Indonesia, dan g_c penurunan pertumbuhan ekonomi negara c sebagai dampak dari pandemi. Hasil simulasi model menunjukkan kontribusi perlambatan



Gambar Boks I.3. Outlook Perekonomian Dunia



Gambar Boks I.4. Mekanisme Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Bali

perekonomian Bali sebagai dampak COVID-19 melalui jalur ekspor adalah sebesar -1,9% s.d -2,3% ppt³ dari *baseline*.

Dampak COVID-19 melalui jalur *international tourism* diestimasi berdasarkan 2 skenario, yakni *moderate* dan *severe*. Pada skenario *moderate*, kunjungan wisman tahun 2020 diasumsikan akan berkontraksi sebesar 60%, sehingga perekonomian akan berkontraksi sebesar -7.3. s/d -7.9 ppt dari *baseline*. Pada skenario *severe*, kontraksi kunjungan wisman diasumsikan akan berkontraksi sebesar 80%, sehingga perekonomian akan berkontraksi sebesar 9,8% s/d 10,2% dari *baseline*.

Dampak COVID-19 melalui disrupsi produksi sebagai dampak dari karantina, *social distancing*, dan berbagai pembatasan mobilitas diestimasi dengan menggunakan 2 skenario, yakni apabila diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa, dan di seluruh Indonesia. Dengan skenario PSBB hanya dilakukan di Pulau Jawa, hasil estimasi model menyebutkan dampaknya adalah sebesar -3,8% ppt. Sementara itu, apabila PSBB dilakukan di seluruh Indonesia, maka dampaknya akan lebih besar, yakni sebesar -6,1 ppt.

Berdasarkan estimasi diatas, jalur *international tourism*

memberikan dampak terbesar terhadap perekonomian Bali. Hal ini sejalan dengan perkiraan *World Tourism Organization* bahwa sektor pariwisata akan terkena dampak terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Besarnya dampak tersebut juga tidak lepas dari dominasi peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali.

IV. Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun strategi pemulihan pariwisata di era pandemi, selaras dengan strategi pemulihan pariwisata nasional. Pandemi COVID-19 menimbulkan disrupsi pada dunia pariwisata dan preferensi/perilaku wisatawan. Wisatawan akan mengedepankan aspek *Cleanliness Hygiene and Safety* (CHS), atau yang sering kita sebut sebagai kondisi "New Normal". Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuat strategi Pemulihan Pariwisata Indonesia melalui program CHS Pariwisata Indonesia. Untuk Program CHS Pariwisata Indonesia, Kemenparekraf juga telah menentukan 3 daerah prioritas termasuk Bali. Saat ini Bali tengah mempersiapkan protokol kesehatan di setiap lini sektor pariwisata dan pendukungnya. Dengan demikian, diharapkan pariwisata dapat pulih kembali seiring dengan terkendalinya penanganan COVID-19.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH

- Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun.
- Kinerja Pendapatan Daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 12,72% (yoy).

2.1. GAMBARAN UMUM

Pagu anggaran² perubahan belanja pemerintah di Wilayah Bali (APBD dan APBN) pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp40,42 triliun atau tumbuh 0,45% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,70% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pagu anggaran pendapatan daerah di Wilayah Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,42 triliun atau tumbuh terbatas 1,31% (yoy).

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya serapan belanja daerah di tingkat kabupaten/kota, sementara APBN dan APBD provinsi mengalami peningkatan serapan belanja. Daerah tingkat II dengan serapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Bangli, sementara daerah dengan serapan belanja terendah adalah Kabupaten Gianyar.

Sejalan dengan kinerja belanja, kinerja pendapatan daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 12,72% (yoy). Tertahannya kinerja pendapatan pemerintah juga terkonfirmasi dari serapan (realisasi pendapatan terhadap pagu) yang tercatat sebesar 20,96% pada triwulan I tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 21,01%.

2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH BALI

Pagu anggaran perubahan belanja pemerintah di Wilayah Bali (APBD dan APBN) pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp40,42 triliun atau tumbuh 0,45% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,70% (yoy) dengan nominal Rp40,25 triliun. Komposisi pagu anggaran belanja terdiri atas anggaran kementerian dan lembaga vertikal (APBN) sebesar Rp11,28 triliun (pangsa 27,91%), anggaran (APBD-P) Provinsi Bali sebesar Rp7,20 triliun (18,01%) dan anggaran gabungan (APBD-P) kabupaten/kota³ sebesar Rp21,86 triliun (54,08%). Perlambatan pagu anggaran belanja pemerintah, sejalan dengan terbatasnya pertumbuhan pagu anggaran pendapatan pemerintah pada periode yang sama.

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun. Penurunan realisasi belanja tersebut, terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan realisasi belanja di kategori APBD kabupaten/kota yang tercatat sebesar -3,01% pada tahun 2020.

Serapan (persentase realisasi terhadap pagu) belanja pemerintah juga menunjukkan penurunan pada triwulan I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Serapan belanja pemerintah tercatat sebesar 13,65% pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan I tahun 2019 (15,71%). Perlambatan ini terutama bersumber dari penurunan serapan belanja untuk kategori APBD kabupaten/kota.

Tabel II.1. Pagu Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2019-2020

KATEGORI	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2019 (%yoy)	PAGU BELANJA (APBD & APBN) TAHUN 2020 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2020 (%yoy)
APBN	11.421	9,26	11.283	-1,21
APBD Provinsi	7.201	9,18	7.281	1,10
APBD Kabupaten/Kota	21.623	-4,00	21.864	1,12
TOTAL	40.245	1,70	40.428	0,45

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

- 2 Data Pagu merupakan Pagu APBD-P 2020 sebelum dilakukannya *Reposturing* Anggaran
- 3 Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

Tabel II.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW I 2019 (% ,yoy)	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2020 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW I 2020 (% ,yoy)
APBN	1.779	16,42	1.831	15,24
APBD Provinsi	462	-38,81	932	101,79
APBD Kabupaten/Kota	2.843	25,67	2.757	-3,01
TOTAL	5.048	11,78	5.520	8,58

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel II.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Wilayah Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2019 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2020 (%)
APBN	15,58	16,23
APBD Provinsi	6,41	12,80
APBD Kabupaten/Kota	13,15	12,61
TOTAL	15,71	13,65

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel II.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Tahun 2018-2019

KATEGORI	PAGU PENDAPATAN (APBD) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2019 (% ,yoy)	PAGU PENDAPATAN (APBD) TAHUN 2020 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2020 (% ,yoy)
APBD Provinsi	6.499	4,82	6.606	1,64
APBD Kabupaten/Kota	20.571	-0,79	20.819	1,21
TOTAL	27.070	0,51	27.425	1,31

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

Penurunan serapan anggaran belanja pemerintah pada triwulan I tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan tertundanya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disamping itu, Pemerintah Daerah juga menunggu keputusan terkait postur anggaran yang baru, sehingga sejumlah program ditangguhkan pelaksanaannya.

Pagu anggaran pendapatan daerah di Wilayah Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,42 triliun atau tumbuh terbatas 1,31% (yoy). Anggaran tersebut terdiri

atas anggaran Provinsi Bali sebesar Rp6,60 triliun (pangsa 24,09%) dan anggaran gabungan kabupaten/kota⁴ sebesar Rp20,81 triliun (pangsa 75,91%). Pertumbuhan pagu pendapatan terutama terjadi di kabupaten/kota, sementara pagu provinsi mengalami kontraksi.

Sejalan dengan kinerja belanja, kinerja pendapatan daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan I tahun

4 Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali.

Tabel II.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW I 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW I 2019 (%yoy)	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2020 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW I 2020 (%yoy)
APBD Provinsi	1.519	11,24	1.488	-2,05
APBD Kabupaten/Kota	4.169	11,14	4.259	2,16
TOTAL	5.688	12,72	5.747	1,03

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

Tabel II.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Wilayah Bali Tahun 2018-2019

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW I 2019 (%)	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW I 2020 (%)
APBD Provinsi	23,38	22,53
APBD Kabupaten/Kota	20,27	20,46
TOTAL	21,01	20,96

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

2019 yang sebesar 12,72% (yoy). Tertahannya kinerja pendapatan pemerintah juga terkonfirmasi dari serapan (realisasi pendapatan terhadap pagu) yang tercatat sebesar 20,96% pada triwulan I tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 21,01%.

Realisasi pendapatan yang terbatas tersebut bersumber dari penurunan realisasi APBD provinsi, sementara APBD kabupaten/kota cenderung stabil. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya realisasi komponen Dana Perimbangan, sejalan dengan melambatnya realisasi DAK. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi komponen retribusi daerah juga mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan oleh penurunan kegiatan pariwisata sebagai dampak COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk memperbaiki realisasi pendapatan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan mulai tanggal 21 April 2020 s/d 28 Agustus 2020 pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2.3. APBD PROVINSI BALI

Anggaran pemerintah Provinsi Bali (APBD-P) pada tahun 2020 kembali mengalami defisit, yaitu

Tabel II.7. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	2019				2020			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW IV (%yoy)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW IV (%yoy)
PENDAPATAN DAERAH	6499	1519	23,38	11,24	6606	1488	22,53	-2,05
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3763	784	20,83	6,83	3762	1044	27,74	33,17
DANA PERIMBANGAN	2662	701	26,34	14,92	2787	445	15,95	-36,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	74	34	46,57	56,02	56	0,00	0,00	-100,00
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	7201	462	6,41	-38,81	7281	932	12,80	101,79
SURPLUS (DEFISIT)	-702	1058	-150,58	73,08	-675	556	-82,39	-47,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

sebesar Rp 675 miliar. Kebijakan defisit anggaran ini mencerminkan strategi kebijakan fiskal pemerintah daerah yang ekspansif untuk mendukung peningkatan investasi dan konsumsi. Kebijakan ini diharapkan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Target pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi dalam anggaran perubahan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019.

2.3.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat Rp1,4 triliun atau terkontraksi sebesar 2,05% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding dengan realisasi triwulan I tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,24% (yoy) dengan nominal Rp1,5 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi komponen Dana Perimbangan dan komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara, komponen PAD tetap mengalami peningkatan.

Kondisi ini juga tercermin pada terbatasnya persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pagu (serapan). Persentase serapan pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar 22,53%, lebih rendah dibandingkan dengan

serapan triwulan I tahun 2019 sebesar 23,38%. Kondisi ini dipengaruhi oleh terhambatnya serapan realisasi Dana Perimbangan, karena terhentinya pengadaan DAK Fisik pada Maret 2020 yang disebabkan oleh rencana realokasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, dari sisi komponen PAD mengalami peningkatan yang bersumber dari penerimaan pajak dan bea kendaraan bermotor. Namun demikian, realisasi retribusi daerah yang termasuk pada komponen PAD menurun, sebagai dampak menurunnya aktivitas sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,04 triliun, atau meningkat 33,17% (yoy) lebih tinggi dibanding dengan realisasi triwulan I tahun 2019 yang meningkat 6,83% (yoy). Sejalan dengan itu serapan komponen ini juga meningkat, yaitu 27,74%, lebih tinggi dibanding dengan triwulan I 2019 yang sebesar 20,83%. Membaiknya capaian PAD tersebut, terutama bersumber dari peningkatan capaian komponen pajak daerah⁵. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya serapan pendapatan pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor. Mengacu pada strukturnya, komponen pajak daerah masih tetap mendominasi PAD

Tabel II.8. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

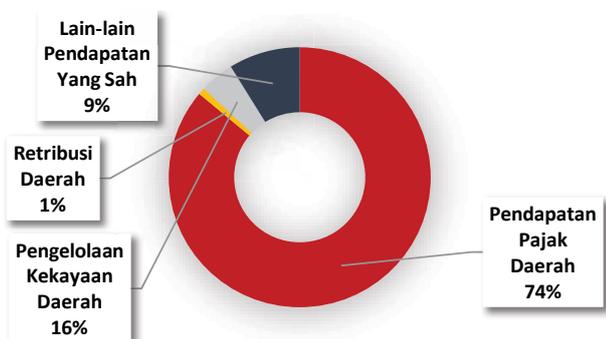
KATEGORI	2019				2020			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%;yoy)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%;yoy)
PENDAPATAN DAERAH	6499	1519	23,38	11,24	6606	1488	22,53	-2,05
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3763	784	20,83	6,83	3762	1044	27,74	33,17
- Pendapatan Pajak Daerah	3235	716	22,15	8,68	3265	773	23,68	7,93
- Retribusi Daerah	50	8	15,32	-15,85	49	5,42	11,01	-28,98
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	171	0	0,00	0,00	166	176	105,58	0,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	307	60	19,47	-8,65	282	90	31,79	50,06
DANA PERIMBANGAN	2662	701	26,34	14,92	2787	445	15,95	-36,60
-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	186	37	20,08	-13,64	150	0,55	0,37	-98,52
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1326	442	33,33	8,59	1344	442	32,88	0,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1150	222	19,29	38,76	1292	2,00	0,15	-99,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	74	34	46,57	56,02	56	0,00	0,00	-100,00
- Pendapatan Hibah	6	0,26	4,69	-80,53	5,39	0,00	0,00	-100,00
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	68	34	50,00	64,90	51	0,00	0,00	-100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

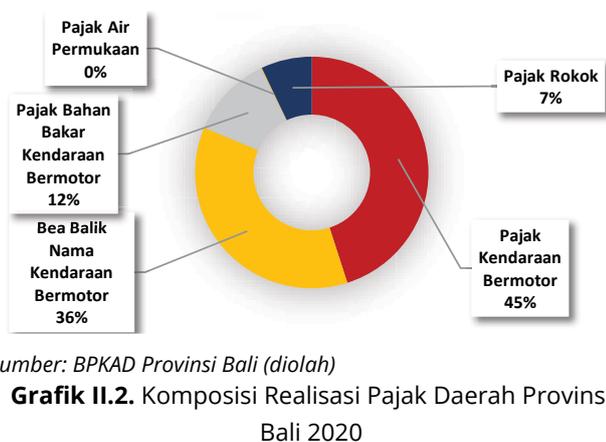
5 Serapan pajak daerah pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar 23,68%, meningkat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 22,15%.

Provinsi Bali dengan pangsa 74,02%, selanjutnya diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah 15,88%, komponen lain-lain pendapatan yang sah 8,98% dan retribusi daerah 1,12%, selengkapnya pada grafik (II.1). Namun demikian, serapan retribusi daerah mengalami kontraksi sebagai dampak menurunnya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19.

Realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,77 triliun atau dengan serapan 23,68%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan serapan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 22,15%. Meningkatnya serapan realisasi pajak daerah, tidak terlepas dari meningkatnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah, khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Kondisi ini dipengaruhi oleh tumbuh signifikannya penjualan kendaraan baru pada triwulan I tahun 2020⁶. Berdasarkan strukturnya, komponen pajak daerah didominasi oleh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (pangsa 45%), sejalan dengan terus bertambahnya kendaraan bermotor di Bali (sebagai daerah wisata). Selanjutnya diikuti oleh pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (pangsa 36%) dan pajak bahan bakar kendaraan (pangsa 12%), selengkapnya pada grafik II.2.



Sumber: BPKAD Provinsi Bali (diolah)
Grafik II.1. Komposisi Realisasi PAD Provinsi Bali 2020



Sumber: BPKAD Provinsi Bali (diolah)
Grafik II.2. Komposisi Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bali 2020

Meningkatnya serapan pendapatan pajak daerah pada triwulan I 2020, dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk diantaranya upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Beberapa faktor tersebut meliputi :

- Dikeluarkannya kebijakan kerja sama penghimpunan pajak kendaraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Pelaksanaan kegiatan samsat keliling secara rutin dan reguler secara berkesinambungan
- Dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas dan pencapaian target pengelolaan keuangan daerah, termasuk komponen pendapatan daerah melalui penerapan elektronifikasi penerimaan pajak daerah dan jenis transaksi lainnya melalui kerja sama dengan pihak perbankan.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2020 menunjukkan peningkatan, terkonfirmasi oleh meningkatnya pangsa PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada triwulan I tahun 2020, pangsa PAD mencapai 70,13% terhadap pendapatan daerah, meningkat dibanding dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 51,59%. Meningkatnya rasio DDF pada periode laporan ditopang oleh meningkatnya realisasi PAD, sejalan dengan meningkatnya serapan pajak daerah.

Komponen Dana Perimbangan

Realisasi komponen dana perimbangan pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,44 triliun atau terserap 15,95%, lebih rendah dibanding dengan serapan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 26,34% dengan nominal sebesar Rp0,70 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh rendahnya serapan komponen dana bagi hasil pajak, khususnya dari bagi hasil pajak penghasilan yang menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020, sehingga berdampak terhadap setoran Pajak Penghasilan (PPH) badan usaha dan pribadi yang menurun. Sementara komponen DAU dapat terserap secara optimal, sedangkan komponen DAK mengalami penurunan karena dihentikannya proses pengadaan DAK Fisik oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19, oleh sebab itu realisasi DAK mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2020. Komposisi dana perimbangan masih didominasi oleh DAU (pangsa 99,43%).

6 Penjualan kendaraan baru di Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat tumbuh sebesar 18,68% (yoy) dengan jumlah kendaraan mencapai 51.719 unit.

Anggaran DAU sangat penting bagi daerah, karena dana yang bersumber dari APBN ini merupakan bagian dari perwujudan desentralisasi daerah. Selain itu, DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (horizontal) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU tersebut didasarkan atas *fiscal gap*⁷ dan alokasi dasar⁸. Sementara itu, komponen DAK ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik (DAK fisik) dan dalam mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik (DAK nonfisik).

2.3.2. Realisasi Belanja Dan Transfer Di Provinsi Bali

Realisasi belanja dan transfer di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,93 triliun atau dengan serapan 12,80%. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan serapan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 6,41% atau dengan nilai nominal Rp0,46 triliun. Bila dianalisis lebih lanjut, komponen dengan serapan realisasi tertinggi pada periode laporan adalah komponen belanja tak terduga, yaitu sebesar 30,62%, capaian ini lebih tinggi dibanding dengan triwulan I tahun 2019 (0,00%). Komponen lainnya dengan serapan yang tinggi adalah belanja operasi, yaitu sebesar 19,24%, meningkat dibandingkan dengan serapan triwulan I tahun 2019 yaitu sebesar 10,41%. Sementara itu serapan belanja modal tercatat sangat rendah yaitu sebesar 0,35% lebih

rendah dibanding dengan triwulan I 2019 (1,99%) menjadi faktor penyebab tertahannya serapan dan realisasi belanja dan transfer daerah. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2020, sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial untuk penanganan COVID-19.

Belanja Operasi

Peningkatan serapan belanja operasi pada triwulan I tahun 2020, terutama didorong oleh meningkatnya serapan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Serapan belanja barang dan jasa (pangsa 66,42%) pada periode laporan tercatat sebesar 31,38%, meningkat dibanding dengan serapan pada triwulan I tahun 2019 yang sebesar 6,90%. Peningkatan ini terutama didukung oleh meningkatnya serapan peningkatan pengadaan jasa komunikasi, pengadaan barang untuk menunjang di dalam bidang pendidikan, serta bidang kesehatan di Wilayah Bali dalam penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, serapan belanja pegawai (pangsa 32,40%) didorong oleh meningkatnya serapan untuk belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS.

Belanja Modal

Komponen belanja modal pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp3,01 miliar atau terserap 0,35%, lebih rendah dibanding dengan serapan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 1,99% atau dengan nominal

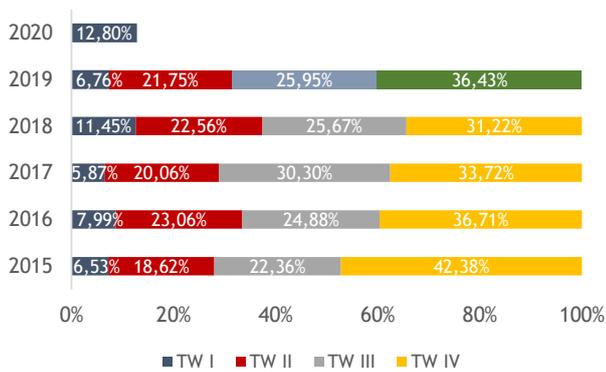
Tabel II.9. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	2019				2020			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%;yoy)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%;yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	7201	462	6,41	-38,81	7281	932	12,80	101,79
BELANJA DAERAH	5005	456	9,11	-10,31	5543	905	16,32	98,48
BELANJA OPERASI	4233	441	10,41	-13,20	4664	897	19,24	103,57
- Belanja Pegawai	1700	234	13,76	-5,51	1738	291	16,73	24,33
- Belanja Barang dan Jasa	1453	100	6,90	12,72	1899	596	31,38	494,48
- Belanja Hibah	1066	107	10,00	-37,81	1023	11	1,04	-90,06
- Belanja Subsidi	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Sosial	4	0,17	4,03	41,67	4,00	0,00	0,00	-100,00
BELANJA MODAL	760	15	1,99	3191,30	865	3,01	0,35	-80,13
BELANJA TAK TERDUGA	12	0,00	0,00	-100,00	15	4,59	30,62	0,00
BELANJA TRANSFER	2196	6,02	0,27	-97,56	1737	27	1,57	352,81

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

7 *Fiscal gap* adalah kebutuhan fiskal, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (PAD dan DBH).

8 Alokasi dasar dihitung berdasarkan atas jumlah gaji pegawai negeri sipil



Sumber : BPKAD Provinsi Bali (diolah)

Grafik II.3. Serapan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Bali Per Triwulan (2015-2020)



Sumber : BPKAD Provinsi Bali

Grafik II.4. Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Provinsi Bali (2016-2020)

Rp15,1 miliar. Tidak optimalnya capaian realisasi belanja modal tersebut, terutama yang disebabkan oleh adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang kemudian menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian beberapa kegiatan dan program, sehingga mempengaruhi tahapan dan *progress* belanja modal. Di samping itu, pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa proyek tidak dapat terealisasi.

Tabel II.10. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Pagu APBD P 2019 (Rp Miliar)				Growth 2019 (%yoy)				Pagu APBD 2020 (Rp Miliar)				Growth 2020 (%yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	950	917	321	2188	11,12	0,92	5,53	5,82	942	910	363	2215	-0,86	-0,76	13,10	1,23
Kabupaten Tabanan	398	1092	510	2000	1,19	1,15	7,16	2,63	450	1174	491	2115	13,00	7,53	-3,70	5,76
Kabupaten Klungkung	226	709	303	1239	48,27	4,23	15,85	13,14	249	719	281	1249	10,14	1,35	-7,27	0,84
Kabupaten Karangasem	221	1016	409	1646	-5,64	6,57	9,27	5,39	259	1035	339	1633	17,30	1,88	-17,18	-0,79
Kabupaten Gianyar	1031	966	377	2374	27,98	2,66	23,49	15,70	1230	954	365	2549	19,26	-1,23	-3,17	7,36
Kabupaten Badung	5313	610	406	6329	-20,56	6,53	31,13	-16,39	5303	600	399	6302	-0,18	-1,65	-1,80	-0,42
Kabupaten Buleleng	444	1333	638	2415	18,00	4,96	24,80	11,94	402	1333	585	2320	-9,48	-0,01	-8,25	-3,93
Kabupaten Bangli	136	749	339	1224	12,67	6,06	1,41	5,41	165	760	275	1200	21,17	1,44	-18,87	-1,99
Kabupaten Jembrana	135	712	309	1156	3,60	3,01	3,49	3,20	142	722	372	1236	5,29	1,36	20,50	6,93
Total	8.854	8.105	3.612	20.571	-9,24	3,86	13,77	-0,79	9.142	8.207	3.470	20.819	3,25	1,26	-3,92	1,21

Sumber : BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

2.4. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH BALI

2.4.1. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran perubahan pendapatan gabungan kabupaten/kota pada tahun 2020 tercatat sebesar **Rp20,81 triliun** atau tumbuh **1.21% (yoy)**. Nilai pagu ini lebih tinggi dibanding dengan pagu pendapatan 2019 yang terkontraksi sebesar **0,79% (yoy)**, dengan nominal **Rp20,57 triliun**. Peningkatan pagu pendapatan daerah tersebut, terutama disebabkan oleh capaian realisasi pendapatan daerah yang meningkat pada tahun 2019, khususnya komponen PAD, sebagai akibat meningkatnya pendapatan pajak daerah. Kondisi ini menyebabkan pemda menyusun pagu anggaran pendapatan daerah yang lebih optimis. Sejalan dengan itu, perkembangan kunjungan wisman sepanjang tahun 2019 menyebabkan beberapa pemda meningkatkan target anggaran pendapatan dalam APBD perubahan.

2.4.2. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi gabungan pendapatan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar **Rp4,25 triliun**, tumbuh **2,16% (yoy)**. Capaian ini lebih rendah dibanding dengan peningkatan pada triwulan I tahun 2019 yang sebesar **13,26% (yoy)**, dengan nominal **Rp4,16 triliun**. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya realisasi komponen pendapatan daerah terutama pada komponen dana perimbangan dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Kondisi ini merupakan dampak dari berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pandemi COVID-19 salah satunya menghentikan seluruh kegiatan DAK Fisik yang menyebabkan tertahannya realisasi dana perimbangan. Sementara itu, komponen PAD mengalami

peningkatan capaian pada triwulan I 2020 sebesar 34,34% lebih tinggi dari sebelumnya 16,49% pada triwulan I 2019. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mendorong optimalisasi pendapatan, termasuk dengan mendorong kemudahan pembayaran pajak, perluasan wajib pajak serta mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi pada triwulan I tahun 2020 adalah Kabupaten Badung, yaitu sebesar 25,89% (yoy), dengan nilai nominal Rp1,28 triliun. Peningkatan capaian ini terutama dikontribusikan oleh peningkatan signifikan komponen PAD. Realisasi PAD tercatat tumbuh sebesar 29,79% (yoy). Kondisi tersebut didorong oleh program dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan penghimpunan pajak dan retribusi daerah. Beberapa program tersebut meliputi:

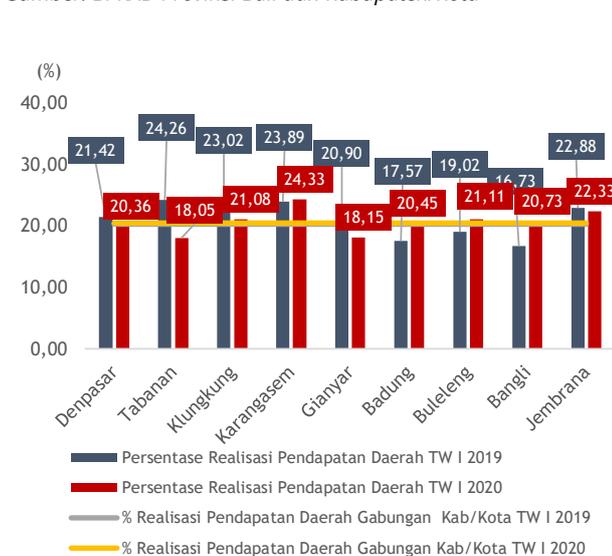
- Mengintensifkan optimalisasi dan penagihan pajak, khususnya untuk wajib pajak yang masih memiliki pajak tertunggak.
- Melakukan *update database* secara berkala.
- Mengintensifkan sosialisasi dengan pelaku usaha hotel dan restoran, dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak secara tepat waktu.
- Pendataan wajib pajak baru, baik yang telah berizin maupun belum berizin serta pendataan ulang wajib pajak yang lahannya telah beralih fungsi.
- Perluasan pembayaran pajak melalui sistem *online* dan upaya peningkatan transaksi nontunai dalam penghimpunan pendapatan daerah, berkeja sama dengan lembaga perbankan.

Sejalan dengan itu, meningkatnya realisasi komponen lain-lain pendapatan yang sah terutama didorong oleh meningkatnya realisasi komponen dana bagi hasil pajak dan dana penyesuaian otonomi khusus.

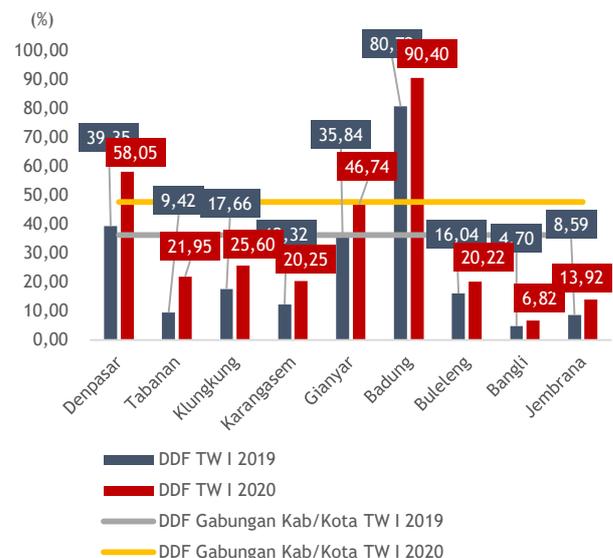
Tabel II.11. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Realisasi TW I 2019 (Rp Miliar)				Growth TW I 2019 (%yoy)				Realisasi TW I 2020 (Rp Miliar)				Growth TW I 2020 (%yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	184	268	16	469	8,95	12,66	199,07	13,61	262	174	15	451	41,94	-35,07	-6,86	-3,78
Kabupaten Tabanan	46	328	112	485	-40,63	15,05	29,06	8,19	84	298	0,00	382	83,28	-9,09	-100,00	-21,31
Kabupaten Klungkung	50	211	24	285	45,87	1,93	-45,75	0,00	67	195	0,50	263	33,92	-7,49	-97,87	-7,63
Kabupaten Karangasem	48	302	43	393	34,93	17,19	-37,35	8,72	80	267	50	397	66,14	-11,76	17,73	1,03
Kabupaten Gianyar	178	282	36	496	39,37	4,90	16,07	16,00	216	246	0,00	463	21,57	-12,71	-100,00	-6,79
Kabupaten Badung	897	167	48	1.112	20,03	22,16	464,78	24,57	1165	123	0,50	1.288	29,79	-26,03	-98,95	25,89
Kabupaten Buleleng	74	339	47	459	0,88	2,74	20,61	4,01	99	339	51	490	34,38	0,14	9,81	6,61
Kabupaten Bangli	10	195	0,00	205	13,18	43,24	-100,00	31,85	17	203	29	249	76,03	3,85	0,00	21,41
Kabupaten Jembrana	23	217	25	264	-0,88	5,01	-4,75	3,47	38	199	39	276	69,11	-8,13	53,06	4,35
Total	1.510	2.309	350	4.169	16,49	11,77	9,84	13,26	2.029	2.045	185	4.259	34,34	-11,43	-47,06	2,16

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota



Sumber : BPKAD Prov. Bali & 9 Kabupaten/Kota, diolah
Grafik II.5. Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2020



Sumber : BPKAD Prov. Bali & 9 Kabupaten/Kota, diolah
Grafik II.6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2020

Selanjutnya, daerah dengan peningkatan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Tabanan. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan pajak dan tertahannya realisasi retribusi daerah. Penurunan realisasi pajak daerah dipengaruhi oleh melambatnya kunjungan wisatawan domestik⁹ dan wisatawan mancanegara yang kemudian berdampak pada menurunnya setoran pajak dari pelaku usaha hotel dan restoran. Sementara itu, tertahannya realisasi retribusi daerah disebabkan oleh sedang dilakukannya pembangunan Pasar Kediri sejak tahun 2019, sehingga selama proses pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi daerah. Sejalan dengan itu, tertahannya kunjungan wisatawan berdampak terhadap penurunan penghimpunan retribusi daerah terutama di Wilayah Tanah Lot.

Selanjutnya bila ditinjau dari sisi serapan pendapatan, pada triwulan I tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 20,46%, sedikit meningkat dibanding dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 20,27%. Peningkatan ini terutama bersumber dari meningkatnya capaian serapan pendapatan daerah di 3 daerah (grafik II.5), terutama peningkatan capaian serapan komponen PAD. Secara spesifik, daerah dengan capaian serapan tertinggi pada triwulan I tahun 2020 adalah Kabupaten Karangasem (24,33%), meningkat dibanding dengan triwulan I tahun 2019 (23,89%). Capaian ini ditopang oleh tumbuh dan berkembangnya jumlah restoran, baik yang konvensional maupun modern, sehingga mendorong meningkatnya jumlah wajib pajak. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui:

- Implementasi program tim intensifikasi pajak daerah

secara berkesinambungan

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak secara kontinu
- Implementasi dan pengembangan transaksi *online* dalam pembayaran pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.

Sementara itu, kabupaten dengan capaian serapan pendapatan terendah pada periode laporan (grafik II.5) adalah Kabupaten Tabanan (18,05%), meskipun lebih baik dibanding dengan serapan triwulan I tahun 2019 (24,26%). Kondisi ini disebabkan terutama dipengaruhi oleh tertahannya kinerja pariwisata pada triwulan I tahun 2020, sejalan melambatnya kunjungan wisman. Kondisi ini memberikan dampak pada penurunan tingkat penghunian kamar hotel dan lama tinggal wisatawan di hotel berbintang serta turunnya kunjungan wisatawan pada DTW yang ada di Kabupaten Tabanan, sehingga memberikan pengaruh pada tertahannya serapan PAD.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 (grafik II.6). Kondisi tersebut didukung oleh semua daerah yang menunjukkan peningkatan rasio kemandirian fiskal pada periode laporan. Sementara itu, bila dianalisis lebih lanjut hanya 2 daerah yang memiliki nilai DDF lebih dari 50%, yaitu Kabupaten Badung sebesar 90,40% dan Kota Denpasar sebesar 58,05%. Kondisi ini menunjukkan telah berkurangnya ketergantungan fiskal kabupaten/kota di Wilayah Bali terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, yaitu komponen dana perimbangan. Daerah dengan nilai DDF terendah adalah Kabupaten Bangli (6,82%).

Tabel II.12. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019

Daerah Tingkat II	Pagu Belanja APBD P 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2019 (%; yoy)				Pagu Belanja APBD P 2020 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2020 (%; yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	1.932	348	207	2.487	3,84	14,69	2,59	5,13	1.940	290	198	2.428	0,40	-16,79	-4,34	-2,40
Kabupaten Tabanan	1.528	420	270	2.218	1,96	-11,06	10,83	0,16	1.601	294	285	2.180	4,80	-30,11	5,50	-1,73
Kabupaten Klungkung	997	138	124	1.259	7,13	-15,78	6,69	3,98	1.032	190	132	1.354	3,54	37,43	6,91	7,59
Kabupaten Karangasem	1.343	204	213	1.760	10,01	9,27	11,72	10,13	1.378	227	109	1.713	2,60	10,97	-48,79	-2,65
Kabupaten Gianyar	1.808	275	306	2.389	14,59	-14,62	16,98	10,53	1.732	977	332	3.040	-4,22	255,54	8,42	27,26
Kabupaten Badung	4.514	864	1.170	6.548	-10,94	-47,60	-18,58	-19,70	4.036	1.255	1.011	6.302	-10,59	45,28	-13,59	-3,76
Kabupaten Buleleng	1.852	342	262	2.456	5,92	43,80	9,65	10,37	1.736	351	260	2.347	-6,28	2,69	-0,67	-4,43
Kabupaten Bangli	852	199	211	1.262	10,60	-9,84	-22,68	-0,17	883	150	201	1.234	3,67	-24,74	-4,91	-2,25
Kabupaten Jemberana	864	241	139	1.244	7,70	-38,70	2,97	-6,48	954	175	136	1.266	10,41	-27,12	-1,81	1,79
Total	15.691	3.031	2.902	21.623	1,37	-23,24	-6,32	-4,00	15.292	3.908	2.664	21.864	-2,54	28,93	-8,18	1,12

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

⁹ Kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat 1,05 juta orang atau terkontraksi sebesar 21,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang tumbuh 3,03% (yoy) dengan jumlah 1,34 juta orang.

2.4.3. Pagu Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran belanja perubahan gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp21,86 triliun atau tumbuh 1,12% (yoy). Target ini lebih tinggi dibanding dengan target anggaran gabungan tahun 2019 yang berkontraksi sebesar 4,0% (yoy), dengan nominal Rp21,62 triliun.

Peningkatan target anggaran belanja tersebut, didasarkan dengan meningkatnya target anggaran pendapatan daerah pada periode yang sama. Bila dianalisis lebih lanjut, peningkatan target belanja daerah terutama disebabkan oleh meningkatnya target anggaran belanja untuk komponen belanja modal. Sementara itu pagu belanja operasi dan belanja transfer peningkatannya tertahan. Penurunan target belanja tersebut juga disebabkan oleh penyesuaian anggaran belanja yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan nilai nominal yang lebih rendah (menurun).

2.4.4. Realisasi Belanja Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi belanja gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,75 triliun, mengalami kontraksi sebesar 3,01% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2019 yang meningkat sebesar 25,67% (yoy), dengan nominal Rp2,84 triliun.

Kondisi ini disebabkan oleh tertahannya peningkatan realisasi belanja operasi dan belanja modal. Sementara realisasi belanja transfer, mengalami peningkatan dibanding dengan triwulan I tahun 2019. Realisasi belanja transfer tumbuh lebih tinggi, sehingga menahan dalamnya perlambatan realisasi belanja daerah. Sejalan dengan itu, penurunan realisasi belanja daerah yang lebih dalam di 4 daerah juga menjadi penyebab tertahannya realisasi belanja daerah pada triwulan I tahun 2020.

Serapan belanja gabungan kabupaten/kota pada triwulan I tahun 2020 mencapai 12,61%, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 13,15%. Penurunan ini terutama didorong oleh menurunnya serapan belanja pada 4 daerah, termasuk Badung dan Gianyar yang merupakan daerah dengan pagu anggaran belanja terbesar untuk daerah tingkat II di Wilayah Bali.

Secara spesifik, daerah dengan capaian serapan belanja tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Bangli (15,49%), sementara yang terendah adalah Kabupaten Gianyar (9,68%). Tingginya serapan realisasi belanja Kabupaten Bangli tersebut didukung oleh upaya percepatan tahapan dan realisasi belanja yang dilakukan oleh OPD, untuk mendorong peningkatan peran sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi belanja daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli terhadap capaian realisasi belanja, juga ikut mendukung tingginya capaian serapan tersebut. Sementara itu, rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kabupaten Gianyar disebabkan oleh masih relatif kecilnya serapan belanja modal. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya realisasi pendapatan daerah, sehingga menyebabkan Pemkab. Gianyar melakukan upaya efisiensi belanja, khususnya yang terkait dengan komponen belanja modal.

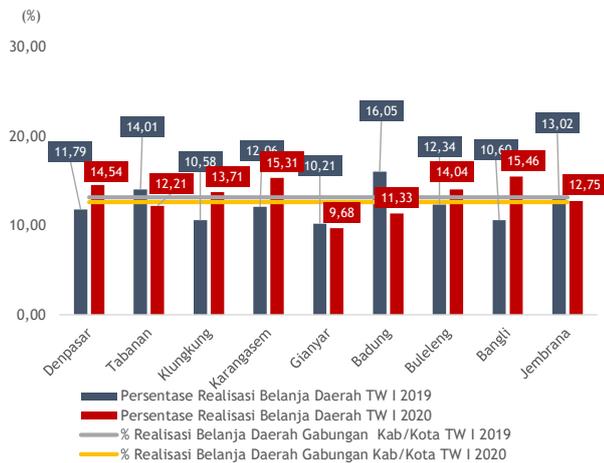
2.4.5. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Realisasi belanja APBN di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau dengan serapan mencapai 16,23%. Realisasi ini meningkat dibanding dengan serapan belanja APBN pada triwulan I tahun 2019 yang tercatat 15,90%, dengan nominal Rp1,77 triliun. Capaian ini didorong oleh peningkatan serapan belanja pegawai, barang dan

Tabel II.13. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Realisasi TW I 2019 (Rp Miliar)				Growth TW I 2019 (%yoy)				Realisasi TW I 2020 (Rp Miliar)				Growth TW I 2020 (%yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	270	0,2	23	293	26,71	33,53	312,70	33,87	264	0,8	88	353	-2,36	256,37	289,68	20,37
Kabupaten Tabanan	203	3,4	104	311	-20,48	72,82	96,32	0,10	234	0,9	31	266	15,31	-74,76	-70,09	-14,34
Kabupaten Klungkung	130	0,1	3	133	447,27	-76,41	-97,74	-4,24	143	2,4	40	186	9,98	1.556,63	1.439,16	39,46
Kabupaten Karangasem	175	0,7	37	212	4,43	-35,44	227,81	18,03	190	0,3	72	262	8,29	-54,56	98,13	23,54
Kabupaten Gianyar	201	0,8	42	244	-9,75	-95,61	6,23	-13,12	219	13	63	294	8,72	1.463,28	50,41	20,66
Kabupaten Badung	716	211	123	1.051	55,95	1.251,30	-0,75	75,30	551	65	99	714	-23,11	-69,31	-20,19	-32,03
Kabupaten Buleleng	247	0,9	56	303	4,78	-43,62	86,08	13,58	230	18	81	329	-6,66	1.816,72	46,12	8,68
Kabupaten Bangli	113	0,0	21	134	39,38	-100,00	-33,72	18,80	121	0	70	191	7,43	0,00	231,55	42,61
Kabupaten Jembrana	127	0,3	35	162	9,83	-97,00	24,58	5,01	138	2,3	21	161	8,62	594,87	-38,54	-0,31
Total	2.183	217	443	2.843	23,02	332,07	1,17	25,67	2.090	102	565	2.757	-4,25	-53,07	27,70	-3,01

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota



Sumber : BPKAD Provinsi Bali & Kabupaten/kota, (diolah)
Grafik II.7. Serapan Belanja 9 Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2019-2020

modal. Peningkatan realisasi APBN tersebut, terutama dipengaruhi oleh upaya kementerian dan lembaga vertikal untuk mempercepat proses dan tahapan realisasi belanja dalam rangka mendorong peran fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk melalui percepatan realisasi pembangunan infrastruktur.

Percepatan ini terutama pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, yang melakukan tahapan pengadaan sejak akhir tahun 2018. Kondisi ini tercermin dari peningkatan yang signifikan terhadap realisasi belanja modal pada triwulan I tahun 2020 yang meningkat 16,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 sebesar 12,61% (yoy). Sejalan dengan itu, pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan juga mendorong peningkatan serapan belanja tersebut. Kondisi ini semakin optimal seiring dimasukkannya kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagai salah satu komponen indikator kinerja pegawai.

Bila dianalisis lebih dalam, realisasi belanja APBN pada triwulan I 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,23% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding dengan realisasi belanja pada triwulan I tahun 2019 yang sebesar 15,90% (yoy). Secara spesifik, komponen dengan peningkatan terendah adalah belanja barang yang meningkat 15,55% (yoy), sejalan dengan tertahannya peningkatan pagu anggaran pada tahun 2020.

Tabel II.14. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Tahun 2018-2019

Jenis Belanja	Tahun 2019			Growth Realisasi (%yoy)	Tahun 2020			Growth Realisasi (%yoy)
	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW I (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)		Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW I (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	
Pegawai	4.302	865	20,12	1,95	4.444	742	16,70	-14,26
Barang	4.272	585	13,69	5,87	4.170	649	15,55	10,87
Modal	2.596	327	12,61	10,09	2.652	434	16,38	32,63
Bantuan Sosial	16	1	5,81	14,89	17	6	35,28	555,10
Total	11.186	1.779	15,90	4,65	11.283	1.831	16,23	2,93

Sumber: DJPBN Wilayah Bali

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 2,96% (yoy).
- Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diperkirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, dan masih berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu $3\% \pm 1\%$ (yoy). Perlambatan ini diperkirakan didorong oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai.

GAMBARAN UMUM

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 2,96% (yoy). Meningkatnya inflasi Bali pada triwulan I 2020 disebabkan oleh naiknya tekanan harga terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga.

Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diprakirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, dan masih berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu $3\% \pm 1\%$ (yoy). Perlambatan ini diprakirakan didorong oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai. Terhentinya industri pariwisata menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan pangan. Semakin terjaganya pasokan gula pasir dan turunnya harga minyak dunia juga dapat berdampak pada penurunan harga gula dan BBM.

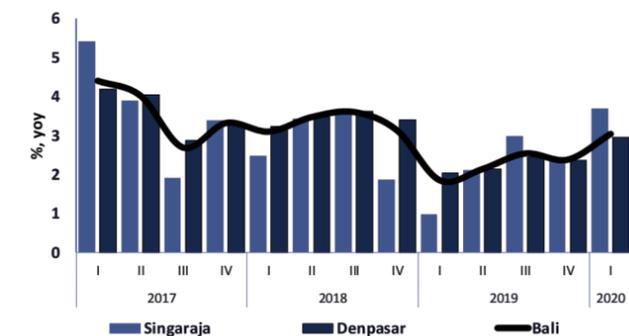
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Triwulan I 2020

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan triwulan sebelumnya (2,38%, yoy). Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya harga cabai merah, emas perhiasan, cabai rawit, rokok putih, dan jeruk. Hari Raya Kuningan, Galungan, dan Nyepi yang jatuh bersamaan pada triwulan I menyebabkan peningkatan permintaan tanaman hortikultura dan buah-buahan yang signifikan. Di sisi lain, pasokan tanaman hortikultura, terutama cabai merah dan cabai rawit, menurun seiring dengan dimulainya musim tanam. Selanjutnya, terhambatnya kegiatan ekonomi dunia sebagai dampak

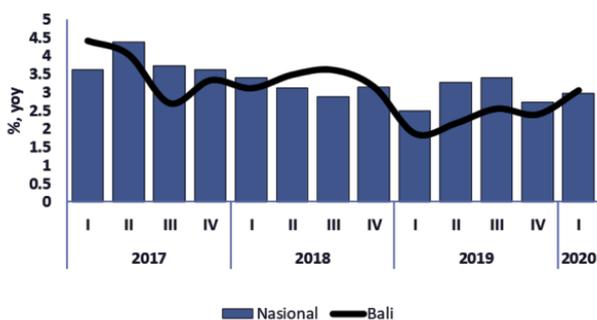
penyebaran COVID-19 menyebabkan harga emas sebagai salah satu *safe haven* meningkat. Lebih lanjut, keputusan pemerintah untuk meningkatkan cukai rokok mendorong kenaikan harga seluruh jenis rokok pada Januari 2020. Namun demikian, peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh turunnya tarif angkutan udara, harga bensin, dan daging ayam ras. Insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong wisatawan ke 10 tujuan wisata utama menyebabkan turunnya tarif angkutan udara. Selanjutnya, perlambatan ekonomi dunia juga berdampak pada penurunan permintaan *crude oil*, yang pada akhirnya menurunkan harga BBM nonsubsidi. Adapun penurunan harga daging ayam ras disebabkan oleh turunnya permintaan dari industri pariwisata.

Meningkatnya inflasi Bali pada triwulan I 2020 disebabkan oleh naiknya tekanan harga untuk sebagian kelompok komoditas, dengan peningkatan tertinggi berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan RT. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pasokan seiring dengan musim tanam dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap peralatan rumah tangga. Secara spasial, peningkatan inflasi terjadi di semua kota pembentuk inflasi Bali (Denpasar dan Singaraja) dengan nilai inflasi tercatat masing-masing 2,94% (yoy) dan 3,69% (yoy) di triwulan I 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,43% (yoy) dan 2,45% (yoy).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.1. Inflasi Kota di Bali (%yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (%yoy)

Tracking Inflasi Triwulan II 2020

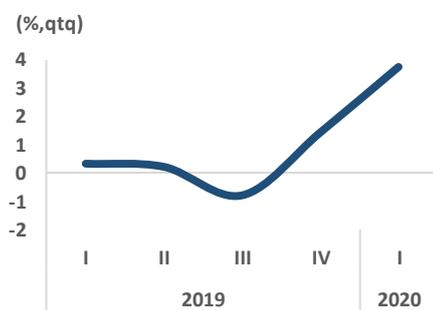
Pada April 2020, Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm), berbeda arah dibandingkan dengan Nasional yang mencatat inflasi sebesar 0,08% (mtm). Secara tahunan inflasi April tercatat sebesar 2,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Nasional sebesar 2,67% (yoy). Menurunnya inflasi disebabkan oleh turunnya harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih. Penurunan harga daging ayam ras, cabai merah, dan

telur ayam ras disebabkan oleh penurunan permintaan yang signifikan akibat terhentinya industri pariwisata seiring menyebarnya COVID-19. Di sisi lain, produktivitas peternakan ayam di Bali semakin meningkat, terlihat dari tingkat kematian ayam yang mendekati 0%, serta dimulainya musim panen untuk komoditas cabai. Kondisi *oversupply* ini menyebabkan harga ketiga komoditas tersebut turun. Selanjutnya, pembatasan penerbangan di Provinsi Bali akibat semakin luasnya penyebaran COVID-19 menyebabkan penurunan tekanan harga angkutan udara. Adapun penurunan harga bawang putih dikarenakan oleh telah tibanya impor bawang putih. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya harga bawang merah, sawi putih, udang basah, vitamin, dan gula pasir. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan turunnya kuantitas panen untuk bawang merah dan sawi putih, sedangkan dimulainya musim gelombang tinggi menyebabkan nelayan mengalami kesulitan untuk melaut dan berdampak pada harga udang. Kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 menyebabkan permintaan vitamin meningkat signifikan dan mendorong tekanan harga. Sedangkan kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh distribusi yang belum merata.

Secara spasial, penurunan inflasi pada April 2020 bersumber dari kedua kota sampel perhitungan inflasi. Kota Denpasar mencatat deflasi 0,32% (mtm) atau inflasi 2,53% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat deflasi 0,37% (mtm) atau inflasi 2,70% (yoy). Inflasi di Kota Denpasar dan Singaraja masing-masing tercatat berada pada urutan ke-15 dan ke-10 terendah di Indonesia. Komoditas penyumbang terjadinya deflasi di Denpasar adalah daging ayam ras, tarif angkutan udara, cabai merah, telur ayam ras, dan minyak goreng. Adapun faktor penahan deflasi yang lebih tinggi disebabkan oleh naiknya inflasi beberapa komoditas meliputi: bawang merah, sawi putih, dan vitamin. Di Singaraja, deflasi disumbang oleh komoditas daging ayam ras, canang sari, cabai merah, telur ayam ras, dan pisang. Sementara itu, komoditas yang mengalami peningkatan harga di Singaraja antara lain adalah bawang merah, cabai rawit, dan kacang panjang.

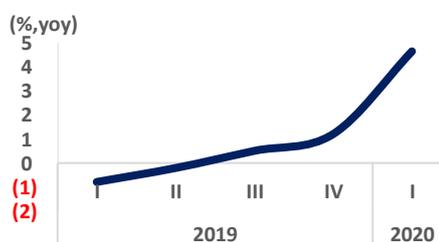
Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diprakirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, dan berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu 3%±1% (yoy). Perlambatan ini diprakirakan didorong oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai. Terhentinya industri pariwisata menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan pangan. Semakin terjaganya pasokan gula pasir dan turunnya harga minyak dunia juga dapat berdampak pada penurunan harga gula dan BBM. Namun demikian, rendahnya harga dan

permintaan komoditas dapat berisiko menjadi disinsentif bagi petani. Menyikapi risiko dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga melalui implementasi program kerja strategis. Upaya pengendalian inflasi akan difokuskan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam rangka menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* komoditas. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar juga akan dilanjutkan, sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga. Selain itu, TPID juga menyiapkan program Lumbung Pangan sebagai wadah untuk menghubungkan petani dengan konsumen.



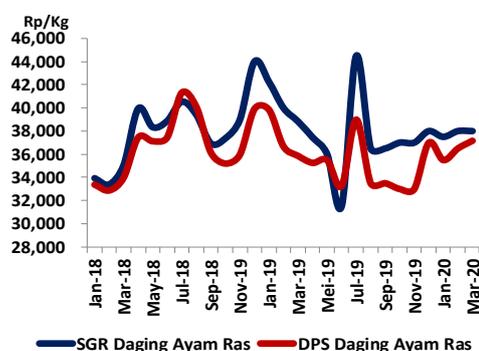
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali



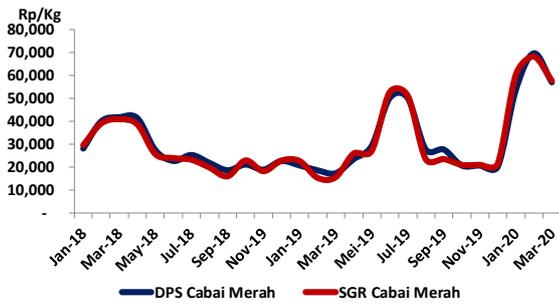
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.4. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali



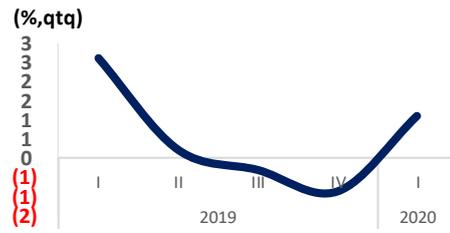
Sumber : www.Sigapura.org, diolah

Grafik III.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/Kg)



Sumber : www.Sigapura.org, diolah

Grafik III.6. Perkembangan Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

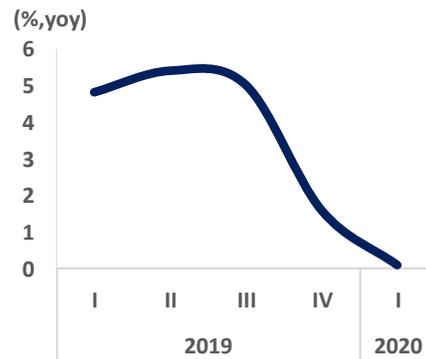
Peningkatan inflasi Bali pada triwulan I 2020 terjadi pada sebagian kelompok barang, dengan peningkatan terbesar terjadi pada makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan RT.

a) Kelompok Bahan Makanan, Minuman, dan Tembakau

Secara triwulanan, tekanan harga kelompok bahan makanan naik menjadi 4,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,22% (yoy). Peningkatan harga utamanya terlihat untuk komoditas cabai merah, cabai rawit, rokok putih, jeruk, mangga, dan pisang. Peningkatan harga cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh naiknya permintaan sejalan dengan perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi yang jatuh pada bulan Februari dan Maret. Selain itu, pasokan tanaman hortikultura terbatas pada triwulan I seiring dengan baru dimulainya musim tanam. Selanjutnya, permintaan untuk jeruk, mangga, dan pisang meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan bahan banten sebagai bagian dari upacara keagamaan pada Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Adapun peningkatan harga rokok putih disebabkan oleh naiknya cukai rokok pada Januari 2020.

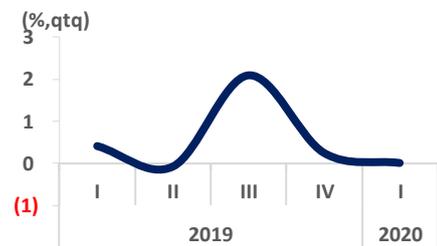
b) Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan I 2020 tekanan harga kelompok pakaian dan alas kaki tercatat sebesar 0,11% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,61% (yoy). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga baju kaus berkerah pria, celana pendek pria, blus wanita, dan sepatu olahraga pria. Penurunan inflasi pada kelompok barang ini disebabkan oleh penurunan penjualan, utamanya akibat berkurangnya turis yang menjadi salah satu pasar utama industri pakaian dan alas kaki di Bali.



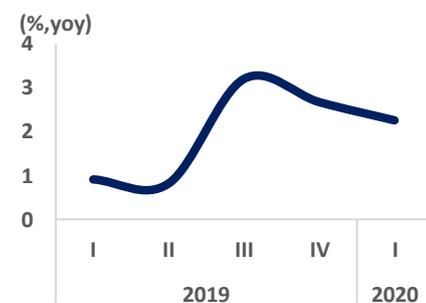
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.8. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali



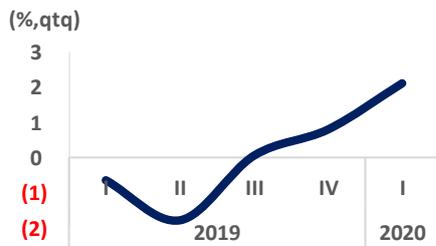
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali



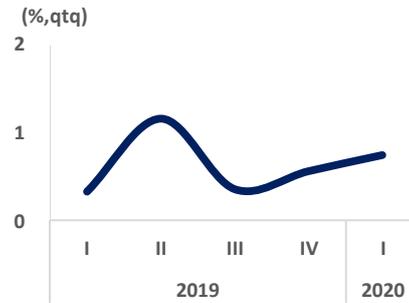
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali



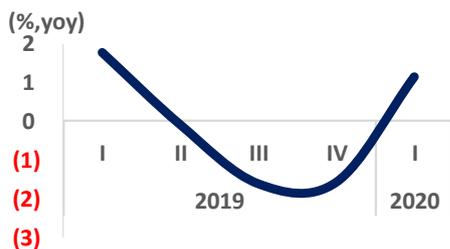
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.12. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

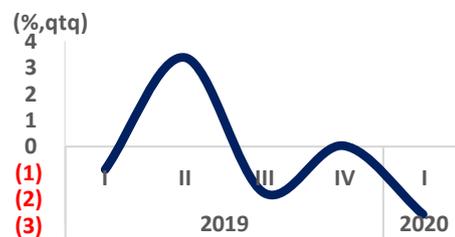
Grafik III.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali

c) *Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar*

Secara triwulanan, tekanan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar melambat dari 2,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,25% (yoy) pada periode laporan. Perlambatan ini disebabkan oleh perlambatan harga sewa rumah dan tukang bukan mandor. Penurunan harga sewa rumah sejalan dengan turunnya permintaan untuk sewa rumah akibat berhentinya industri pariwisata di Bali. Adapun kebutuhan terhadap tukang bukan mandor juga menurun sejalan dengan penundaan sektor konstruksi di Bali seiring dengan penurunan pembangunan proyek pemerintah maupun swasta.

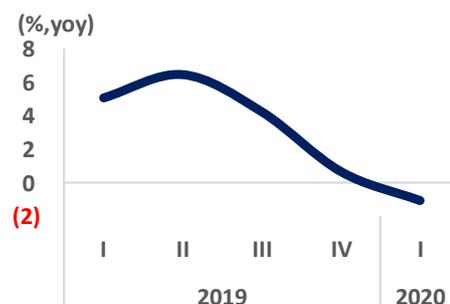
d) *Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT*

Pada triwulan I 2020, secara tahunan tekanan harga kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan RT meningkat dari -1,57% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 1,15% (yoy) pada triwulan I 2020. Meningkatnya tekanan harga kelompok ini disebabkan oleh naiknya tekanan harga sabun detergen bubuk, penyegar ruangan, dan sabun cair/cuci piring. Peningkatan harga dari ketiga



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.15. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.16. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali

komoditas ini disebabkan oleh peningkatan pembelian masyarakat akibat kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19.

e) Kelompok Kesehatan

Pada triwulan I 2020, kenaikan harga kelompok kesehatan tercatat sebesar 2,84% (yoy), meningkat dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,41% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya harga obat dengan resep, vitamin, tarif laboratorium, dan tarif dokter spesialis. Peningkatan tekanan harga untuk kelompok barang ini konsisten dengan kondisi saat ini, di mana sektor kesehatan berada dalam *full capacity* untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Adapun peningkatan harga vitamin disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan dari masyarakat sebagai langkah antisipatif mencegah penularan COVID-19.

f) Kelompok Transportasi

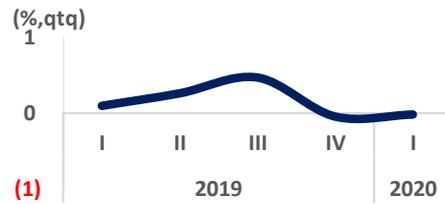
Dibandingkan dengan triwulan IV 2019, tekanan harga kelompok transportasi pada triwulan I 2020 turun menjadi -1,04% (yoy) dari sebelumnya 0,69% (yoy). Turunnya tekanan harga kelompok ini disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara, harga bensin, dan biaya pengiriman barang. Penurunan tarif angkutan udara disebabkan oleh insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatnya wisatawan ke 10 tujuan utama pariwisata di Indonesia. Tren penurunan harga minyak dunia menyebabkan penurunan harga BBM nonsubsidi, dan pada akhirnya menurunkan biaya transportasi, di antaranya biaya pengiriman barang.

g) Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tekanan harga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara triwulanan melandai dari 0,74% (yoy) menjadi 0,63% (yoy) pada triwulan I 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh turunnya harga televisi berwarna dan telepon seluler. Penurunan harga pada kelompok barang ini pada umumnya disebabkan oleh turunnya penjualan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi.

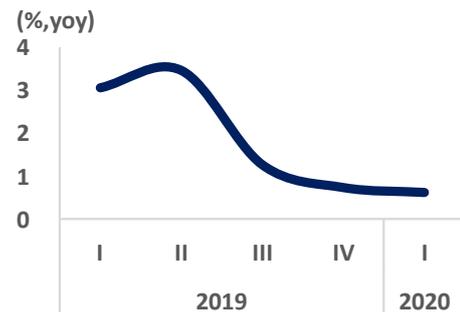
h) Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tekanan harga kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya secara triwulanan meningkat dari 2,18% (yoy) menjadi 3,20% (yoy) pada triwulan I 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh naiknya tekanan harga buku tulis bergaris, pulpen, pensil, dan kertas HVS. Perubahan lokasi kerja dan sekolah yang dilakukan dari rumah (*work from home*) menyebabkan permintaan untuk alat tulis meningkat signifikan.



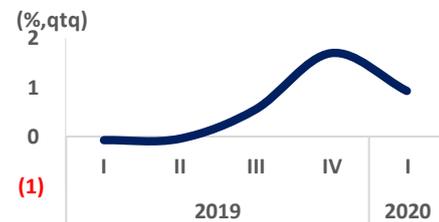
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%qtq)



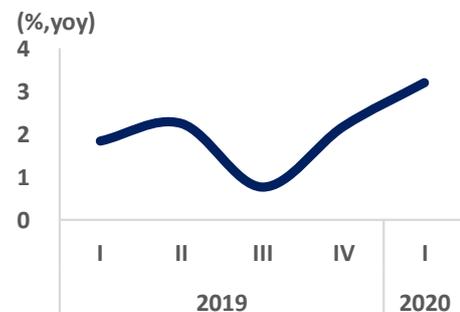
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%yoy)



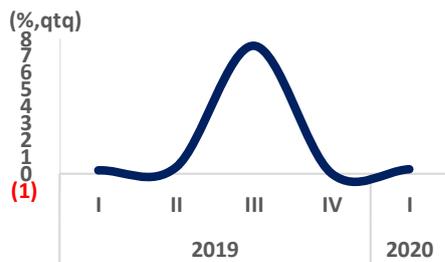
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.19. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%qtq)



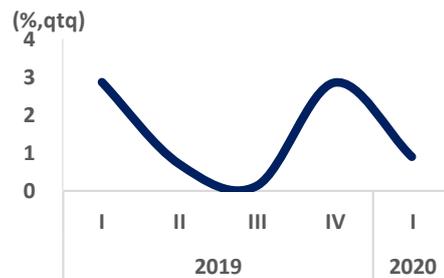
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%yoy)



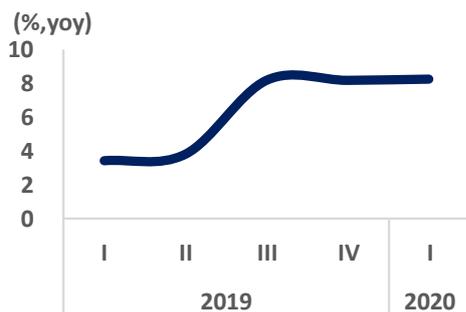
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.21. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,qtq)



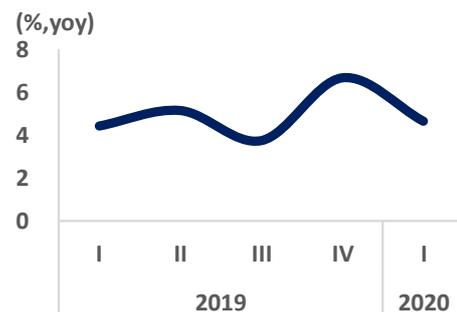
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.23. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,qtq)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,yoy)

i) Kelompok Pendidikan

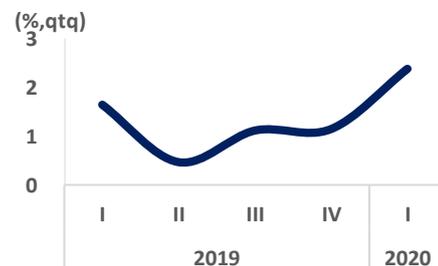
Dibandingkan dengan triwulan IV 2019, tekanan harga kelompok pendidikan pada triwulan I 2020 meningkat menjadi 8,25% (yoy) dari sebelumnya 8,18% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya biaya kursus bahasa asing dan kelompok bermain. Peningkatan harga ini sejalan dengan pola tahunannya.

j) Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tekanan harga untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 4,63% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,68%, yoy). Melambatnya inflasi disebabkan oleh melandainya tekanan harga sebagian besar komoditas di dalam kelompok ini, seperti nasi dengan lauk, soto, gado-gado, dan sebagainya. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan pergerakan dan terhentinya industri pariwisata akibat penyebaran COVID-19.

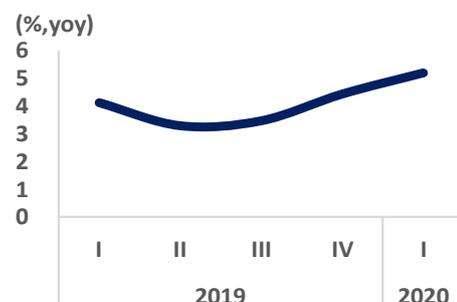
k) Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,41%,



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.25. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,qtq)



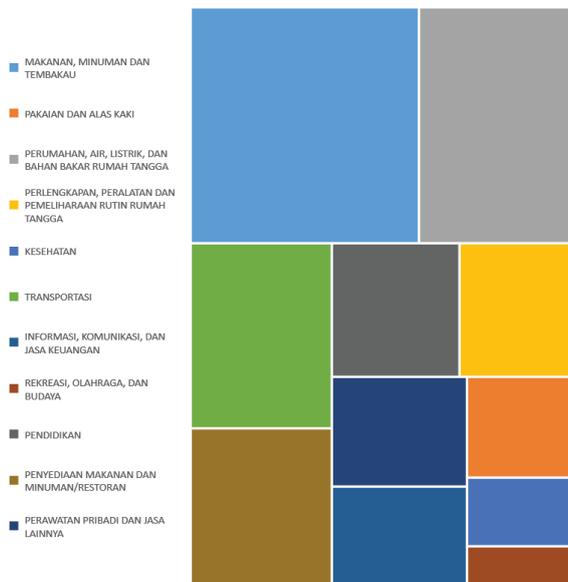
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,yoy)

yoy). Meningkatnya harga emas perhiasan, sabun mandi cair, pembalut wanita, dan pasta gigi merupakan beberapa penyebab utama peningkatan tersebut. Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan naiknya harga emas dunia, sedangkan peningkatan tekanan inflasi sabun mandi cair, pembalut wanita, dan pasta gigi sejalan dengan *panic buying* masyarakat yang sempat terjadi pada awal triwulan I 2020.

3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Dimulai pada 1 Januari 2020 terdapat penambahan cakupan komoditas perhitungan inflasi di Bali di 2



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.27. Bobot Tahun Dasar (2018=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.28. Bobot Tahun Dasar (2018=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

(dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2018, karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.

a) Kota Denpasar

Berdasarkan tren perkembangan inflasi Kota Denpasar, inflasi pada triwulan I 2020 melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara bulanan, yaitu dari 0,79% (mtm) pada triwulan IV 2019 menjadi 0,11% (mtm) pada triwulan laporan.

Tabel III.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2020	
	TW I	
	ytd	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	3.72	4.60
Pakaian dan Alas Kaki	0.95	(0.65)
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Ba	0.00	2.34
Perlengkapan, Peralatan dan Pemelaha	2.15	0.75
Kesehatan	0.49	1.96
Transportasi	(2.74)	(1.50)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuar	0.01	0.80
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.00	2.94
Pendidikan	0.27	8.54
Penyediaan Makanan dan Minuman/Re	0.96	4.90
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2.58	5.19
UMUM	0.74	2.94

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel III.2. Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Triwulan I 2020 (yoy)

No	Komoditas	%	No	Komoditas	%
Januari					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Rawit	0.39	1	Angkutan Udara	-0.35
2	Cabai Merah	0.31	2	Daging Ayam Ras	-0.23
3	Emas Perhiasan	0.15	3	Canang Sari	-0.20
4	Rokok Putih	0.09	4	Bensin	-0.15
5	Rokok Kretek Filter	0.09	5	Kemeja Pendek Katun	-0.03
Februari					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Merah	0.92	1	Angkutan Udara	-0.16
2	Cabai Rawit	0.73	2	Bensin	-0.15
3	Emas Perhiasan	0.20	3	Daging Ayam Ras	-0.15
4	Canang Sari	0.10	4	Tomat	-0.02
5	Bawang Putih	0.10	5	Buah Naga	-0.01
Maret					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Merah	0.53	1	Angkutan Udara	-0.27
2	Emas Perhiasan	0.25	2	Bensin	-0.13
3	Cabai Rawit	0.18	3	Daging Ayam Ras	-0.11
4	Jeruk	0.12	4	Daging Babi	-0.05
5	Mangga	0.11	5	Ikan Tongkol Diawetkan	-0.03

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Namun demikian, secara tahunan inflasi tercatat meningkat, yaitu menjadi 2,94% (yoy) dari 2,43% (yoy) pada triwulan IV 2019. Peningkatan tekanan harga tahunan terjadi di sebagian kelompok komoditas, dengan peningkatan terbesar terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Peningkatan tekanan harga kelompok ini terjadi seiring dengan meningkatnya tekanan harga sub-kelompok makanan serta rokok dan tembakau.

Di Denpasar, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah cabai merah (andil 0,53%), emas perhiasan (andil 0,25%), cabai rawit (andil 0,18%), jeruk (andil 0,12%), mangga (andil 0,11%), dan rokok putih (andil 0,09%). Peningkatan harga ini disebabkan oleh

Tabel III.3. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2020	
	TW I	
	ytd	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	3.82	4.91
Pakaian dan Alas Kaki	1.94	4.46
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	(0.01)	1.59
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Ru	1.87	3.83
Kesehatan	2.10	7.77
Transportasi	(1.36)	2.71
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0.27)	(0.66)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.49	5.02
Pendidikan	0.00	4.47
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.25	2.10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.06	5.04
Umum	1.17	3.69

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel III.4. Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan I 2020 (yoy)

No	Komoditas	%	No	Komoditas	%
Januari					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Merah	0.59	1	Daging Ayam Ras	-0.29
2	Cabai Rawit	0.38	2	Bensin	-0.13
3	Sabun Detergen	0.23	3	Beras	-0.13
4	Rokok Kretek Filter	0.13	4	Ikan Tongkol	-0.08
5	Obat dengan Resep	0.11	5	Kangkung	-0.05
Februari					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Merah	2.00	1	Bensin	-0.12
2	Cabai Rawit	0.57	2	Beras	-0.12
3	Rokok Putih	0.26	3	Daging Ayam Ras	-0.09
4	Rokok Kretek Filter	0.24	4	Ikan Tongkol	-0.07
5	Bawang Merah	0.14	5	Daging Babi	-0.03
Maret					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Merah	0.76	1	Daging Ayam Ras	-0.14
2	Terong	0.31	2	Beras	-0.11
3	Rokok Putih	0.25	3	Bensin	-0.11
4	Rokok Kretek Filter	0.24	4	Ikan Tongkol	-0.07
5	Cabai Rawit	0.15	5	Daging Babi	-0.04

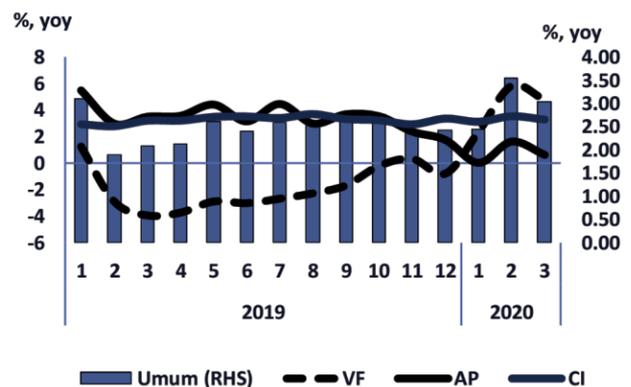
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

naiknya permintaan seiring dengan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Adapun peningkatan harga emas perhiasan disebabkan oleh naiknya harga emas dunia akibat ketidakpastian ekonomi global.

b) Kota Singaraja

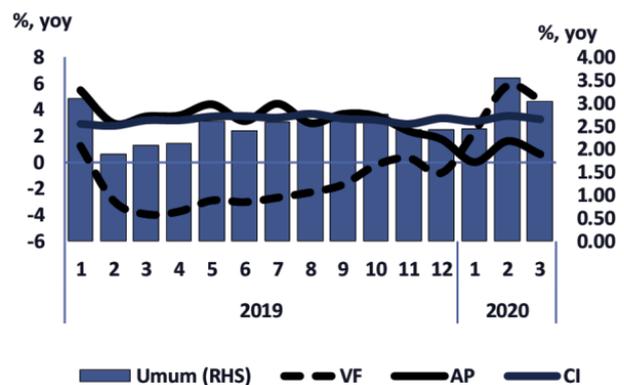
Inflasi di Singaraja tercatat meningkat, dari 2,45% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 3,69% (yoy) pada triwulan I 2020. Meningkatnya inflasi Singaraja terjadi untuk sebagian kelompok komoditas. Peningkatan terbesar terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan peningkatan terbesar terlihat untuk sub-kelompok makanan serta rokok dan tembakau.

Di Singaraja, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada triwulan I 2020 adalah cabai merah (andil 0,76%), terong (andil 0,31%), rokok putih (andil 0,25%), rokok kretek filter (andil 0,24%), cabai rawit (andil 0,15%), dan telur ayam ras (andil 0,14%). Berdasarkan pangsa, komoditas rokok memiliki pangsa yang lebih besar di Singaraja jika dibandingkan dengan pangsa rokok di Denpasar.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.29. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (%yoy)

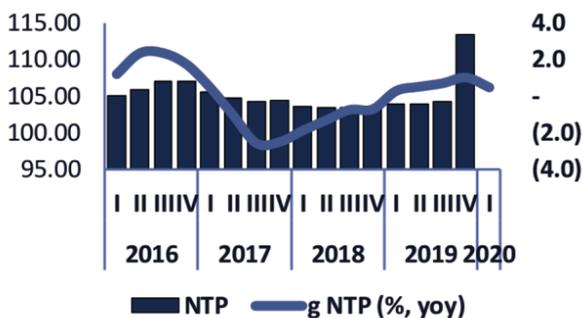


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.30. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (%mtm)

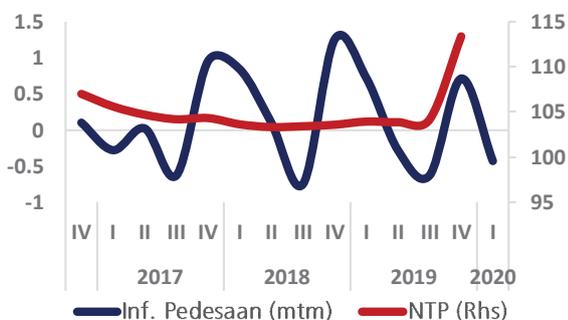
3.3. INFLASI PERDESAAN

Sebagaimana IHK yang menunjukkan kenaikan harga secara umum di perkotaan, Inflasi Perdesaan terdiri dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar lainnya, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin RT, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan I 2020 deflasi perdesaan Bali tercatat sebesar 0,43% (mtm) lebih rendah dibanding dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.31. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.32. Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)

3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi Provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. TPID di Provinsi Bali baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah berkoordinasi untuk menyusun program pengendalian inflasi tahun 2019 dalam sebuah *Roadmap* Pengendalian Inflasi Tahun 2019 dan dituangkan dalam bentuk program kerja 2020. Program kerja TPID ditujukan pada seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta menjaga

ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidental juga dilanjutkan sehingga dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

Roadmap pengendalian inflasi Provinsi Bali tahun 2019-2021 terbagi atas *key strategies* 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dalam hal menjaga keterjangkauan harga, program yang dilakukan antara lain:

1. Stabilisasi Harga, yang dilakukan melalui optimalisasi peran pasar murah/operasi pasar, penertiban penerapan batas HET (harga eceran tertinggi), himbauan kepada *supermarket* dan distributor untuk menerapkan program diskon pada waktu tertentu serta *monitoring* harga melalui komunikasi dan koordinasi termasuk melalui pemanfaatan SiGapura
2. Mengelola Permintaan yang dilakukan melalui program penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat, himbauan belanja bijak pada saat hari besar keagamaan, sosialisasi terkait komoditas pangan substitusi dari komoditas yang ada (seperti daging ayam beku sebagai pengganti daging ayam segar) serta sinergi dengan sektor pariwisata dalam rangka pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan peternakan lokal Bali

Upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan dilakukan dengan program memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan serta program kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal dengan optimalisasi bantuan sarana produksi, pengembangan pertanian organik, pengembangan ternak unggulan lokal Bali, pengembangan Teknologi sistem SALIBU (Tanam Sekali Panen Berkali-kali), pengembangan SRI (*System Rice Intensification*) dan pengembangan Pertanian *Hydroponic* Perkotaan (*Urban Farming*)
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Penguatan cadangan pangan yang dilakukan dengan menjaga level CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton.

4. Program kelembagaan yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis pertanian, perluasan implementasi Asuransi Usaha Pertanian (AUP), pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan pengembangan kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani

Untuk menjaga kelancaran distribusi, akan dilakukan program kerja sama antardaerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan. Dalam rangka mendorong kerja sama perdagangan antar daerah, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah, antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD
2. Optimalisasi pemanfaatan pasar lelang *forward* untuk pemenuhan komoditas pangan strategis serta pemasaran produk unggulan daerah
3. Kerjasama antarkabupaten/kota yang mengalami surplus dan defisit di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan.
2. Pengembangan pasar dengan menerapkan sistem pasar lelang *online*.
3. Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Sementara itu komunikasi efektif dilakukan melalui perbaikan kualitas data dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Perbaikan kualitas data dilakukan dengan penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian, penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, serta penggunaan kajian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sementara untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah akan dilakukan melalui *capacity building* anggota TPID (termasuk studi banding dan rapat koordinasi) serta penyusunan rekomendasi dalam hal pengaturan kebijakan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah bersama dengan instansi lain yang mendukung tercapainya sasaran inflasi IHK. Salah satu rekomendasinya adalah menjaga tarif angkutan udara pada batas atas dan batas bawah.

Detail kegiatan TPID di Bali sepanjang triwulan I 2020 adalah sebagaimana tabel III.5.

Tabel III.5. Kegiatan TPID Triwulan I 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Pemimpin Rapat
1	Rapat Koordinasi HLM TPID dalam rangka antisipasi menjelang hari raya keagamaan (Galungan dan Kuningan)	29 Januari 2020	TPID Kabupaten Klungkung	Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
2	Rapat Koordinasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Jelang Galungan & Kuningan Tahun 2020	5 Februari 2020	TPID se-Provinsi Bali	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta
3	High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Gianyar dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari raya Galungan dan Kuningan	10 Februari 2020	TPID Kabupaten Gianyar, TPID Provinsi Bali	Sekda Kabupaten Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya
4	High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka menghadapi hari raya Galungan dan Kuningan.	11 Februari 2020	TPID Kabupaten Jembrana, TPID Provinsi Bali	Sekda Kab. Jembrana I Made Sudiada
5	Rapat Koordinasi Tim Teknis TPID Provinsi Bali dalam rangka menghadapi hari raya Galungan dan Kuningan	13 Februari 2020	TPID se-Provinsi Bali	Kabiro Perekonomian Provinsi Bali Tjok Bagus Pemyayun
6	Dialog Lintas Denpasar Pagi di RRI, Topik Dampak Hari Raya terhadap Inflasi	13 Februari 2020	TPID Provinsi Bali dan TPID Kota Denpasar	Kepala BPS Adi Nugroho Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Bali Rizki Ernadi Wimanda Kabag Perekonomian Kota Denpasar Made Saryawan
7	Capacity Building dan Penyusunan Formulir TPID Award 2019 oleh TPID se-Provinsi Bali	25-26 Februari 2020	TPID se-Provinsi Bali	SEKDA Provinsi Bali Dewa Made Indra
OPERASI PASAR-PASAR MURAH-MONEV				
No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Penyelenggara
1	Operasi Pasar	27 Januari 2020	Lap. Parkir Pasar Mengwi. Komoditas : Beras, Gula, Minyak Goreng, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Cabai	TPID Kabupaten Badung bekerjasama dengan Bulog dan Perumda Pasar Mangu Guri Sedana
2		17 Februari 2020	Pasar Anyar	TPID Kabupaten Buleleng
3	Monitoring dan Evaluasi Distribusi, Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Hari Raya Nyepi	11 Maret 2020	Pasar Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	TPID Provinsi Bali
4		12 Maret 2020	Pasar Umum Galiran, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	
5		13 Maret 2020	Pasar Kidul, Kec. Bangli, Kab. Bangli	
6	Pemantauan stok Gula di Gudang Pengepul dan di Pasar Klungkung	2 Maret 2020	Gudang Pengepul dan di Pasar Klungkung	TPID Kabupaten Klungkung
7	Pemantauan stok gula di Distributor Kabupaten Jembrana	2 Maret 2020	Distributor Kabupaten Jembrana	TPID Kabupaten Jembrana
8	Pemantauan langsung ke Gudang Bulog Sempidi terkait ketersediaan gula pasir hanya 1,5 Ton, pendistribusiannya diprioritaskan untuk Rumah Pangan Kita (RPK)	3 Maret 2020	Gudang Bulog Sempidi	TPID Kabupaten Badung
9	Monitoring ke Pasar dan Distributor Pangan untuk memantau harga pangan dan ketersediaan stok pada 7 Lokasi	13 Maret 2020	Monitoring ke Pasar dan Distributor Pangan di Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
10	Pemantauan langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Mengwi, Belah Kiauh dan Petang	16 Maret 2020	Pasar Mengwi, Belah Kiauh dan Petang	TPID Kabupaten Badung
11	Monitoring dan Evaluasi Distribusi, Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Hari Raya Nyepi	11 Maret 2020	Pasar Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	TPID Provinsi Bali
12		12 Maret 2020	Pasar Umum Galiran, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	
13		13 Maret 2020	Pasar Kidul, Kec. Bangli, Kab. Bangli	
14	Monitoring Harga dan Stok Bahan Pangan di Pasar Tradisional dan Distributor	13 Maret 2020	Pasar Tradisional (Pasar Kreneng, Pasar Badung) dan Distributor (UD Jenar Sari, CV Crystal, CV Sumber Pangan, UD Dewi Agung, UD Tu In)	TPID Kota Denpasar
15	Pemantauan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, dan Pemantauan di Kecamatan Nusa Penida	19 Maret 2020	Penyebrangan Barang Kebutuhan Pokok, Pasar Galiran, dan Nusa Penida	TPID Kabupaten Klungkung
16	Koordinasi ke Gudang GSP Bebalang yang beralamat di Lingk/Kel. Bebalang Bangli	19 Maret 2020	Gudang GSP Bebalang	TPID Kabupaten Bangli
17	Pemantauan Langsung ke Pasar Umum Gianyar	20 Maret 2020	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
18		20 Maret 2020	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
19	Koordinasi TPID Kab Badung dgn Satgas Pangan Polres Badung	20 Maret 2020	Wilum Polres Badung	TPID Kabupaten Badung
20		20 Maret 2020	Wilum Polres Badung	TPID Kabupaten Badung
21	Pasar Murah	6 Januari 2020	Pasar Murah Bajera Sandhi	Asita Bali Chapter
48	Pasar Murah	13 Februari 2020	Pasar Anyar	TPID Kabupaten Buleleng
52	Pasar Murah	14 Februari 2020	Lapangan Umum Desa Tamanbali	TPID Kabupaten Bangli
53	Pasar Murah	14 Februari 2020	Banjar Tainsiat (Jaba Jero Gede Tainsiat), Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	Disperindag kota Denpasar
57	Pasar Murah	14 Februari 2020	Balai Banjar Djabon	Disperindag Provinsi Bali
58	Pasar Murah	15 Februari 2020	Areal Parkir Peken Ijogading	TPID Kabupaten Jembrana
59	Pasar Murah	16 Februari 2020	Lapangan Puputan Klungkung	Diskop UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
60	Pasar Murah	17 Februari 2020	Lapangan Dukuh Sari, Desa padangsambian Kaja, Denpasar Barat	Disperindag kota Denpasar
61	Pasar Murah	17 Februari 2020	Pasar Anyar	TPID Kabupaten Buleleng
62	Pasar Murah	26 Februari 2020	Lap. Karya Manunggal	Disperindag Kota Denpasar
65	Pasar Murah	27 Februari 2020	Pasar Anyar	TPID Kabupaten Buleleng

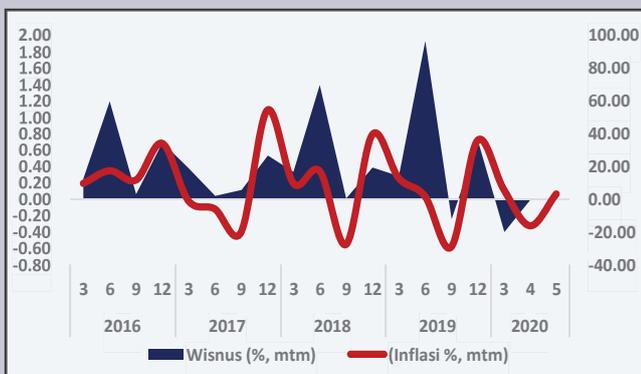
Sumber : Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan



BOKS 2

SINERGI PENGENDALIAN INFLASI BALI MENJELANG HBKN DI ERA COVID-19



Gambar Boks II.1 Perkembangan Wisman dan Inflasi Bali

Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS pada 2010, 83,5% penduduk Bali menganut agama Hindu. Namun demikian, tingkat inflasi pada bulan Ramadan dan Lebaran di Bali secara historis tercatat tinggi, disebabkan oleh meningkatnya jumlah turis yang menjadikan Bali sebagai tujuan berlibur pada Libur Lebaran.

Secara umum, komoditas yang mengalami peningkatan permintaan pada Hari Raya Lebaran adalah beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, dan tomat. Untuk memenuhi

peningkatan permintaan pada *peak* maupun *high season* pariwisata, Bali masih bergantung kepada daerah lain, terutama dari Jawa Timur dan NTB. Adapun untuk komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras dapat dipenuhi oleh peternak ayam di Bali.

Pada awal 2020, harga komoditas di Bali masih tercatat stabil, dengan produktivitas pertanian dan peternakan yang membaik. Hal ini tercermin dari rendahnya angka kematian ayam yang mendekati 0% serta musim tanam baik. Produksi pertanian diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, terutama didukung oleh faktor cuaca yang sudah kembali normal setelah *El Nino* pada 2019. Namun demikian, penyebaran COVID-19 yang semakin meluas menyebabkan terhentinya industri pariwisata dan berdampak pada permintaan bahan pangan yang turun secara signifikan.

Menanggapi penyebaran COVID-19, pemerintah daerah di Indonesia mulai menerapkan pembatasan pergerakan masal, baik di dalam kota maupun antarwilayah. Hal ini menyebabkan adanya risiko *panic buying* oleh masyarakat pada awal PSBB, seiring dengan kekhawatiran terhentinya distribusi dan peningkatan harga bahan pokok. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa distribusi

pangan dan peralatan medis tidak terganggu, serta membebaskan izin impor untuk beberapa komoditas utama, seperti bawang putih. Kebijakan ini berhasil menurunkan harga bawang putih di Bali setelah sebelumnya meningkat hingga 39,8% (yoy) pada bulan Februari 2020.

Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran, sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami inflasi, utamanya untuk bahan pangan hortikultura. Berbeda dengan hal tersebut, pada bulan April 2020, Bali mencatat deflasi yang dalam, yaitu sebesar 0,33% (mtm), dengan deflasi terdalam terlihat untuk kelompok bahan pangan. Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga yang signifikan adalah daging ayam ras (andil 0,14%, mtm), cabai merah (andil 0,08%, mtm), telur ayam ras (andil 0,04%, mtm), bawang putih (andil 0,01%, mtm), dan cabai rawit (andil, 0,003%, mtm). Adapun harga bawang merah masih meningkat, dengan andil sebesar 0,08% (mtm).

1. Daging Ayam Ras

Produksi daging ras di Bali berasal dari wilayah Tabanan, Bangli, dan Gianyar. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan peternakan yang juga menjadi *supplier* daging ayam, di antaranya Charoen Pokphand Jaya Farm, Japfa Comfeed Indonesia, Wonokoyo Jaya Corp, dan Ciomas. Produksi daging ayam pada tahun 2019 sebesar 12,5 ribu ton, dengan kebutuhan per bulan rata-rata sebesar 3.186 ton.

Berdasarkan pantauan di PIHPS, di titik terendah pada pertengahan Mei harga daging ayam ras tercatat sebesar Rp29.750/kg, turun signifikan dibandingkan dengan awal tahun yang sebesar Rp36.250/kg. Dalam rangka mencegah penurunan harga lebih lanjut, Satgas pangan di pintu-pintu masuk Bali melarang importasi daging ayam ras dari luar Bali, terutama dari Pulau Jawa.

2. Aneka Cabai

Produksi cabai di Bali mencapai 1.507 ton/tahun, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 1.146 ton/bulan. Untuk memenuhi defisit pasokan, Bali mendatangkan cabai dari Jawa Timur dan NTB. Namun demikian, harga cabai merah dan cabai rawit turun tajam, di mana harga pada Mei 2020 tercatat sebesar Rp16.116/kg dan Rp21.288/kg dari masing-masing sebesar Rp48.630/kg dan Rp46.889/kg.

Akibat rendahnya permintaan masyarakat, TPID menggalakkan penggunaan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) serta sosialisasi untuk mengolah produk turunan cabai. Mengingat daya tahan cabai yang

tidak lama, petani komoditas ini berpotensi untuk menurunkan kuantitas benih di musim tanam pada pertengahan tahun ini.

3. Telur Ayam Ras

Seperti halnya dengan daging ayam ras, Bali dapat memenuhi kebutuhan telur ayam ras. Produksi telur ayam terutama berada di daerah Bangli, Tabanan, Karangasem, dan Badung Utara. Saat ini produksi telur ayam mencapai 16,1 ribu ton, dengan konsumsi mencapai 15,7 ribu ton. Harga telur ayam tercatat menurun, dari sebesar Rp23.555/kg di Januari 2020 menjadi Rp21.100/kg. Untuk mencegah penurunan lebih lanjut, Satgas pangan melarang importasi telur ayam dari luar Bali.

Tetap rendahnya harga komoditas di bulan Ramadan menjadi disinsentif bagi petani dan peternak untuk mempertahankan produktivitasnya, terutama memasuki periode musim tanam di bulan Juni-Juli 2020. Hal ini berpotensi untuk menurunkan pasokan di semester kedua 2020 dan meningkatkan harga di tengah perekonomian yang masih belum pulih. Untuk menghindari hal ini, pemerintah bersama TPID melakukan beberapa langkah untuk menjaga pendapatan petani di antaranya memberikan insentif khusus untuk petani, menghimbau masyarakat untuk memberikan bantuan dalam bentuk *fresh food* bekerja sama dengan petani di daerah masing-masing, menginisiasi pasar *online* dan media sosial untuk menghubungkan petani dengan konsumen, dan merancang jaring pengaman sosial untuk petani penggarap dan buruh tani.





BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

- Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2020 tumbuh 6,96% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy).
- Pada triwulan I 2020, kredit rumah tangga tumbuh 7,28%(yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,95% (yoy). Peningkatan kredit rumah tangga bersumber terutama dari peningkatan kredit multiguna, seiring dengan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit tersebut.
- Pada triwulan I 2020 kredit UMKM tumbuh 6,79% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari meningkatnya kredit UMKM LU industri pengolahan dan akmamin

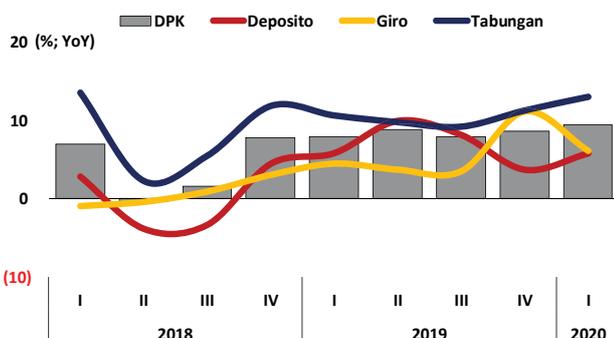
GAMBARAN UMUM

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Bali pada triwulan I 2020 masih terjaga. Kondisi ini tercermin oleh terjaganya tingkat intermediasi perbankan yang diwarnai peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit. Meskipun demikian, tekanan terhadap keuangan korporasi sedikit meningkat, tercermin dari menurunnya kinerja likuiditas dan rentabilitas korporasi. Hal ini dinilai sejalan dengan melambatnya kinerja LU utama dalam perekonomian Bali. Sementara itu, kredit korporasi masih menunjukkan peningkatan dengan kualitas kredit yang membaik. Di sisi rumah tangga, meskipun tekanan terhadap keuangan rumah tangga sedikit meningkat, namun daya tahan keuangan rumah tangga masih cukup kuat. Hal ini tercermin oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga dan optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, kualitas kredit rumah tangga juga masih terjaga, di tengah kinerja konsumsi rumah tangga yang cenderung melambat akibat pandemi COVID-19. Sejalan dengan korporasi dan rumah tangga, penyaluran kredit UMKM juga tercatat meningkat dengan kualitas yang cukup baik.

4.1. KINERJA INTERMEDIASI PERBANKAN MASIH BAIK

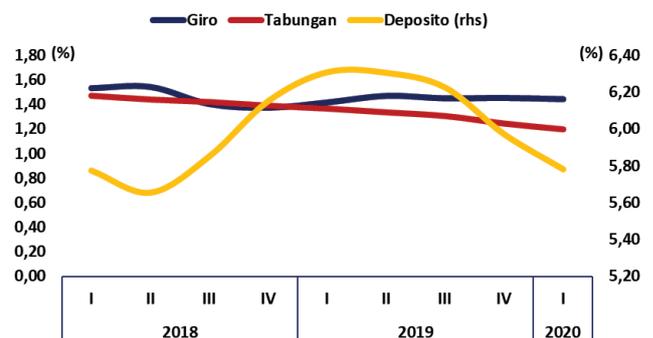
4.1.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan DPK di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh sebesar 9,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,68% (yoy). Peningkatan DPK ini terutama bersumber dari akselerasi pertumbuhan tabungan (pangsa 50,76%) dan deposito (pangsa 33,87%), sedangkan giro (pangsa 15,37%) tumbuh melambat (Grafik IV.1). Meningkatnya pertumbuhan tabungan dan deposito di tengah tren penurunan suku bunga simpanan (Grafik IV.2) diperkirakan dilatarbelakangi oleh motif berjaga-jaga masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal ini secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat pada perbankan di Bali di tengah pandemi COVID-19 masih terjaga. Sementara itu, giro tumbuh melambat diperkirakan disebabkan oleh kebijakan penundaan pemungutan beberapa jenis pajak dalam rangka penanganan dampak COVID-19.



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.1. Pertumbuhan DPK dan Komponennya

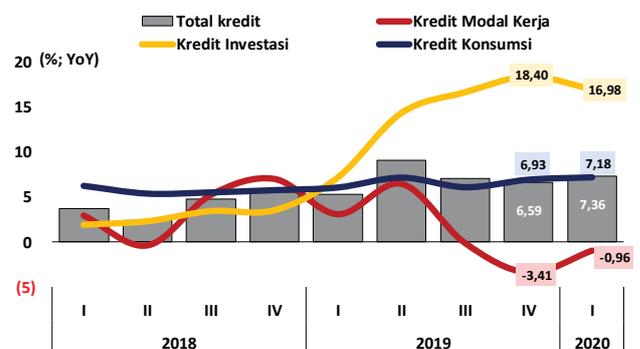


Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.2. Suku Bunga Simpanan

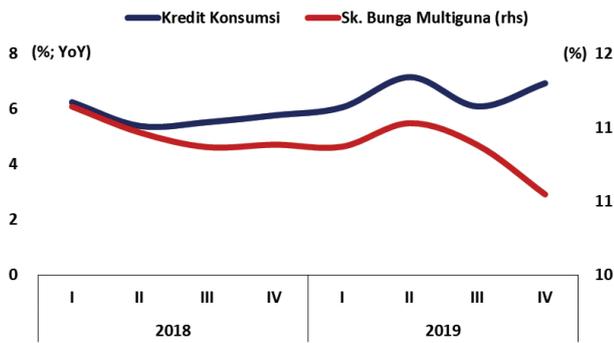
4.1.2. Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh 7,36% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, meningkatnya kredit bersumber dari meningkatnya kredit konsumsi (pangsa 34,92%) dan membaiknya kredit modal kerja (pangsa 31,86%). Sementara itu, kredit investasi (pangsa 33,22%) cenderung melambat (Grafik IV.3). Meningkatnya kredit konsumsi terutama bersumber dari peningkatan kredit multiguna seiring dengan berlanjutnya tren penurunan suku bunga kredit tersebut (Grafik IV.4).



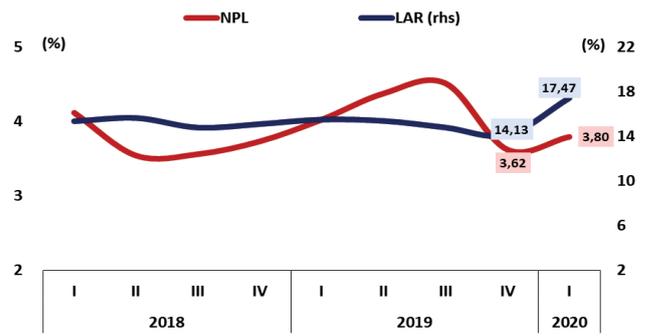
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.3. Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaannya



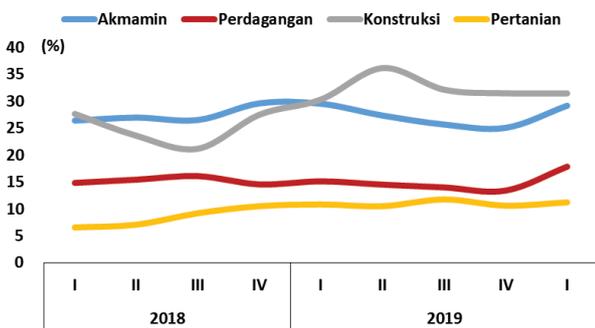
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.4. Perkembangan Kredit Konsumsi dan Sk. Bunga Multiguna



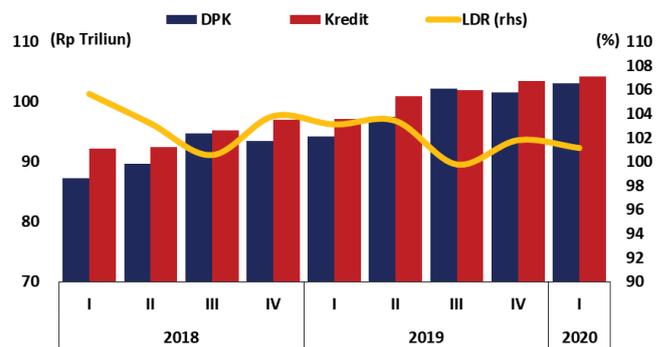
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.6. Perkembangan NPL dan LAR Kredit di Bali



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.5. Perkembangan LAR Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.7. Perkembangan LDR

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), meningkatnya kredit bersumber dari penyaluran kredit LU akmamin. Peningkatan kredit LU akmamin diperkirakan terjadi akibat meningkatnya restrukturisasi kredit pada LU tersebut. Hal ini tercermin dari peningkatan *Loan at Risk* (Grafik IV.5) pada LU tersebut. LU akmamin merupakan LU yang terkena dampak cukup besar dari pandemi COVID-19, sehingga diperkirakan banyak debitur yang terdampak usahanya dan mengajukan fasilitas restrukturisasi. Pemberian fasilitas restrukturisasi oleh perbankan ini sejalan dengan POJK No. 11/pojk.03/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19.

Kualitas kredit di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 sedikit menurun. Hal ini tercermin dari *Nonperforming Loan* (NPL) Gross, yang meningkat pada triwulan I 2020 menjadi 3,80% dari 3,62% pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.6). Meskipun demikian, NPL Bali masih terjaga di bawah level 5%. Berdasarkan jenis penggunaannya, menurunnya kualitas kredit terjadi pada Kredit Modal Kerja. NPL Kredit Modal Kerja pada triwulan I tercatat sebesar 6,22%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,67%.

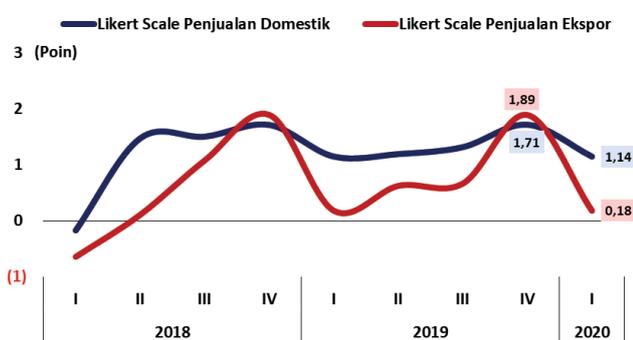
Kinerja intermediasi perbankan di Bali pada triwulan I 2020 masih cukup baik di tengah menurunnya kinerja ekonomi. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 101,16%, sedikit menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 101,82%. Tingginya LDR yang melampaui level 100%, menandakan bahwa kredit yang disalurkan di Bali lebih besar dibandingkan dengan dana yang dihimpun di Bali (Grafik IV.7).

4.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI NONKEUANGAN

4.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi

Secara umum, sumber kerentanan korporasi Bali dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik. Faktor eksternal yang mempengaruhi kerentanan korporasi antara lain adalah kondisi perekonomian negara mitra dagang dan asal Wisatawan Mancanegara (Wisman) utama, serta potensi terjadinya bencana. Sementara itu, faktor domestik yang mempengaruhi antara lain adalah kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta potensi terjadinya bencana. Faktor-faktor ini sangat terkait dengan sektor pariwisata, mengingat besarnya ketergantungan perekonomian Bali pada sektor tersebut.

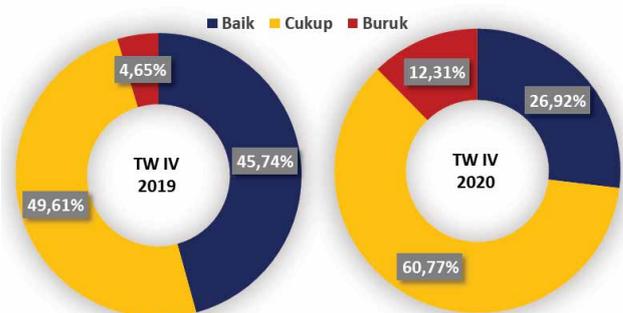
Pada triwulan I 2020, kinerja korporasi Bali menurun seiring dengan menurunnya kinerja perekonomian sebagai dampak COVID-19. Dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19, baik Indonesia maupun negara asal wisman serta mitra dagang utama menerapkan kebijakan *travel restriction* yang menahan kinerja pariwisata serta ekspor barang. Hal ini kemudian berdampak langsung kepada kinerja korporasi di Bali, terutama korporasi yang terkait dengan sektor pariwisata. Pada April 2020 tercatat sejumlah hotel dan restoran telah menghentikan operasionalnya secara sementara. Menurunnya kinerja korporasi juga tercermin dari menurunnya indikator skala *likert* penjualan ekspor dan domestik pada triwulan I 2020 (Grafik IV.8).



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik IV.8. Skala Likert

Menurunnya rentabilitas korporasi berdampak terhadap menurunnya likuiditas korporasi. Rentabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja likuiditas karena menurunnya rentabilitas berdampak pada penurunan aset lancar korporasi. Pada triwulan I 2020, sejalan dengan penurunan rentabilitas, likuiditas (kemampuan untuk membayar utangnya) korporasi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan lalu. Kondisi ini tercermin dari menurunnya pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas baik di triwulan I 2020 menjadi 26,92%, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 45,74% (Grafik IV.10).

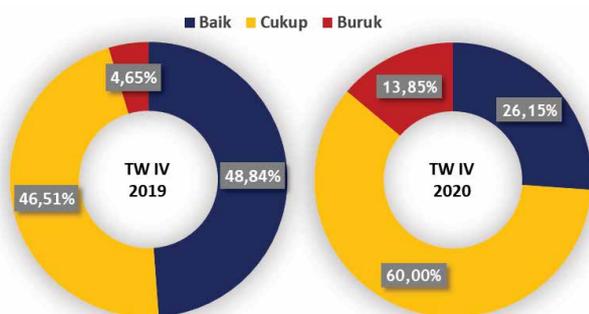


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Grafik IV.10. Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2. Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi

Kondisi rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba) korporasi pada triwulan I 2020 menurun. Berdasarkan hasil SKDU, pangsa korporasi dengan kondisi rentabilitas baik tercatat sebesar 26,15%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 48,84% (Grafik IV.9). Menurunnya kondisi rentabilitas ini sejalan dengan penurunan skala *likert* penjualan domestik dan ekspor (hasil liaison).



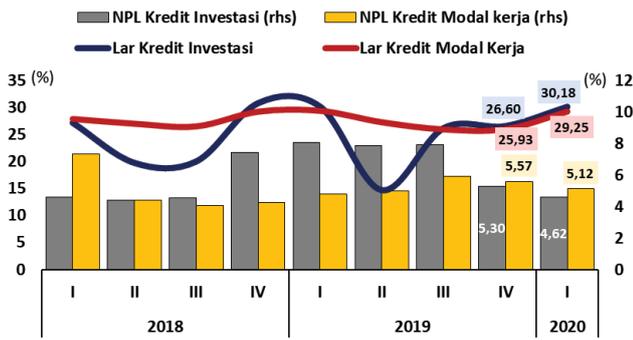
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Grafik IV.9. Kondisi Rentabilitas Korporasi

4.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi Nonkeuangan

Penyaluran kredit perbankan di Wilayah Bali kepada korporasi nonkeuangan cenderung kecil (pangsa 29,76%). Berdasarkan penggunaannya, penyaluran kredit perbankan terhadap korporasi nonkeuangan, paling besar diberikan dalam bentuk kredit investasi (pangsa 69,75%). Sementara itu pangsa kredit modal kerja sekitar 30,15%. Secara sektoral, kredit korporasi nonkeuangan terkonsentrasi besar pada LU yang berhubungan dengan pariwisata yaitu LU akmamin (pangsa 57,11%) dan LU perdagangan (pangsa 16,26%).

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2020 tumbuh 6,96% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy). Dari sisi penggunaan, meningkatnya kinerja penyaluran kredit korporasi nonkeuangan bersumber dari penyaluran kredit investasi. Kredit investasi korporasi nonkeuangan tumbuh 18,14% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (15,53%; yoy). Sementara itu, kredit modal kerja pada triwulan I 2020 berkontraksi sebesar 12,39%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (10,41%,yoy). Meningkatnya kredit investasi



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.11. NPL dan LaR Kredit Modal Kerja dan Investasi Korporasi Nonkeuangan

pada triwulan I 2020 bersumber dari peningkatan restrukturisasi kredit tersebut. Hal ini tercermin dari nilai LaR yang meningkat di tengah penurunan NPL (Grafik IV.11). Selain itu, peningkatan restrukturisasi kredit investasi ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk.

Berdasarkan jenis LU, meningkatnya kredit korporasi nonkeuangan terutama bersumber dari meningkatnya kredit LU akmamin dan LU konstruksi. Kredit akmamin tumbuh 24,83% (yoy) pada triwulan I 2020, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,25% (yoy). Meningkatnya kredit akmamin pada triwulan I 2020 bersumber dari meningkatnya aktivitas investasi pada sektor tersebut. Kondisi ini terkonfirmasi oleh kredit investasi korporasi nonkeuangan pada LU akmamin yang tumbuh 26,04% (yoy) pada triwulan I, meningkat dari triwulan sebelumnya (19,29%;yoy).

Kualitas kredit korporasi nonkeuangan sedikit membaik. Pada triwulan I 2020, NPL kredit korporasi nonkeuangan tercatat sebesar 7,13%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya (7,26%). Berdasarkan jenis penggunaannya, membaiknya kualitas

kredit ini bersumber dari perbaikan kualitas kredit investasi. NPL kredit investasi korporasi pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 4,62%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,30%). Sementara itu, secara sektoral membaiknya kualitas kredit korporasi terutama didorong oleh membaiknya kualitas kredit LU akmamin dan LU perdagangan. Secara keseluruhan, meskipun kualitas kredit membaik, namun rasio NPL masih berada di atas 5%, dan LaR mengalami peningkatan. Oleh karena itu, risiko kredit korporasi masih perlu mendapat perhatian.

4.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA

4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Kerentanan rumah tangga dipengaruhi oleh kinerja pariwisata Bali. Besarnya ketergantungan rumah tangga kepada kinerja pariwisata, tercermin oleh besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada LU perdagangan, pertanian, industri pengolahan dan akmamin. Pada triwulan I 2020, kinerja konsumsi rumah tangga tercatat melambat, sejalan dengan menurunnya kinerja LU akmamin, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Pada triwulan I 2020 tekanan terhadap keuangan rumah tangga sedikit meningkat. Meningkatnya tekanan terhadap keuangan rumah tangga tercermin dari menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan I 2020. Penurunan ini diperkirakan dampak dari menurunnya kinerja pariwisata akibat COVID-19. Selain itu, tekanan terhadap keuangan rumah tangga juga tercermin dari peningkatan beban utang rumah

Tabel IV.1. DSR Rumah Tangga

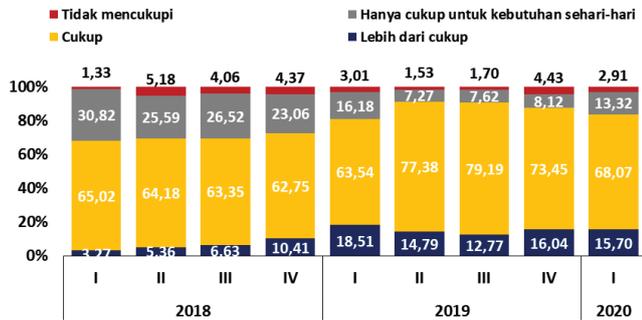
Pengeluaran/ bln	Triwulan IV 2019				Pengeluaran/ bln	Triwulan I 2020			
	Debt Service Ratio (%)					Debt Service Ratio (%)			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%		0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	16,10	5,15	4,03	3,54	Rp1 - 2 jt	15.83	2.67	4.50	5.67
Rp2,1 - 3 jt	15,30	4,51	5,15	6,44	Rp2,1 - 3 jt	9.50	3.17	7.83	8.33
Rp3,1 - 4 jt	8,53	4,19	2,90	4,19	Rp3,1 - 4 jt	6.33	2.67	4.67	5.67
Rp4,1 - 5 jt	2,74	1,29	2,42	2,25	Rp4,1 - 5 jt	2.67	0.67	0.83	3.17
>Rp5 jt	3,70	2,25	2,09	3,22	>Rp5 jt	5.33	1.67	2.83	6.00
Total	46,38	17,39	16,59	19,65	Total	39.67	10.83	20.67	28.83

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)				Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)			
	TW IV - TW III 2019					TW I 2020 - TW IV 2019			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%		0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	(1,13)	1,93	0,32	0,64	Rp1 - 2 jt	(0.27)	(2.49)	0.47	2.12
Rp2,1 - 3 jt	(0,16)	0,32	(0,97)	1,13	Rp2,1 - 3 jt	(5.80)	(1.34)	2.68	1.89
Rp3,1 - 4 jt	(1,13)	(0,48)	0,48	0,16	Rp3,1 - 4 jt	(2.20)	(1.52)	1.77	1.48
Rp4,1 - 5 jt	(0,64)	(0,32)	0,81	(0,32)	Rp4,1 - 5 jt	(0.07)	(0.62)	(1.58)	0.91
>Rp5 jt	(0,97)	0,81	(0,32)	(0,16)	>Rp5 jt	1.63	(0.59)	0.74	2.78
Total	-4,03	2,25	0,32	1,45	Total	-6.71	-6.56	4.08	9.19

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali (diolah)

tangga. Pada triwulan I 2020, *Debt Service Ratio* (DSR) pada kelompok DSR>30% mengalami peningkatan menjadi 28,83% dari 19,65 pada triwulan sebelumnya (Tabel IV.1).

Selain itu, peningkatan beban utang rumah tangga juga dapat berhubungan dengan kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei konsumen, pada triwulan I 2020 tercatat peningkatan jumlah rumah tangga yang

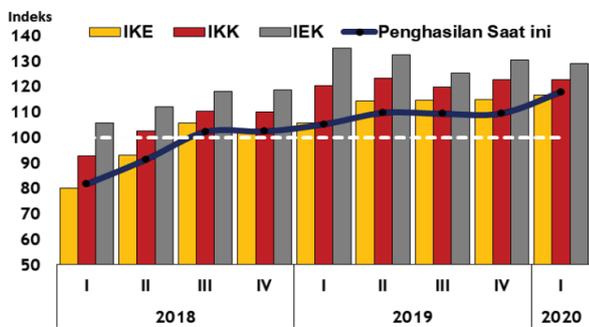


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Grafik IV.12. Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga

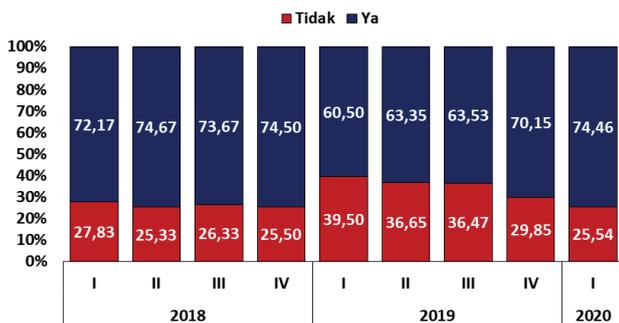
pendapatannya hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, jumlah porsi rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih dari cukup mengalami penurunan. (Grafik IV. 12).

Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga melambat, risiko terhadap keuangan rumah tangga masih cukup



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik IV.13. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

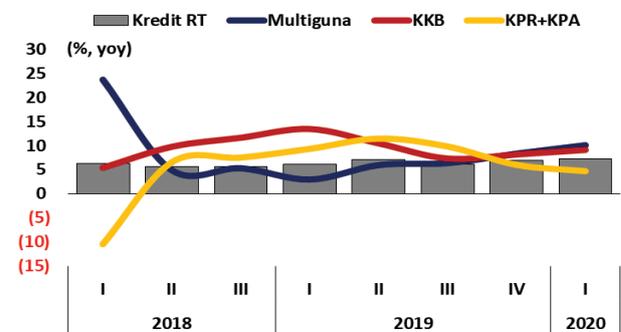
Grafik IV.14. Ketersediaan Dana Cadangan

terjaga. Hal ini tercermin dari masih kuatnya optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi dan penghasilan saat ini (Grafik IV.13). Sejalan dengan hal ini, jumlah rumah tangga yang memiliki dana cadangan untuk kejadian tak terduga juga meningkat (Grafik IV.14).

4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga

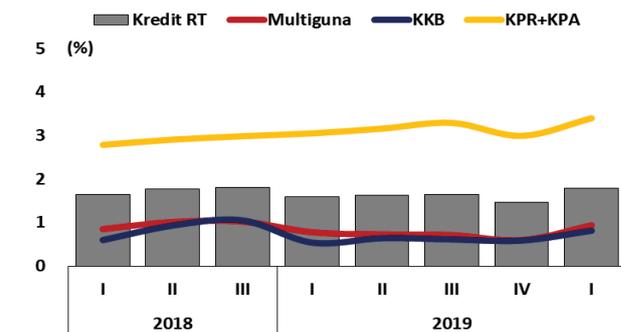
Penyaluran kredit perseorangan di Bali masih mendominasi (pangsa 67,45%). Sebagian besar kredit perseorangan ini digunakan untuk konsumsi (pangsa 51,71%), sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif yaitu modal kerja (pangsa 31,03%) dan investasi (pangsa 17,26%). Kredit konsumsi perseorangan secara umum dikenal juga sebagai kredit rumah tangga. Pada triwulan I 2020, kredit rumah tangga tumbuh 7,28% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,95% (yoy). Peningkatan kredit rumah tangga bersumber terutama dari peningkatan kredit multiguna, seiring dengan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit tersebut. Selain itu, peningkatan kredit kendaraan bermotor (KKB), juga ikut menopang peningkatan kredit konsumsi (Grafik IV.15).

Pada triwulan I 2020, risiko kredit RT masih terjaga. Risiko kredit RT masih terjaga cukup baik, tercermin dari tingkat NPL yang masih cukup rendah dan berada di bawah 5%. Namun demikian, NPL pada triwulan 1 2020



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.15. Pertumbuhan Kredit Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.16. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

sedikit meningkat (1,79%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,47%). Berdasarkan jenis kredatnya, meningkatnya NPL di triwulan I 2020 bersumber dari meningkatnya NPL pada semua jenis kredit rumah tangga (Grafik IV.16).

4.3.3.1. Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen (KPR dan KPA)

Kinerja perkembangan KPR dan KPA di triwulan I 2020 tumbuh 4,70% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan lalu (6,00%; yoy). Dari jenis kredatnya, melambatnya pertumbuhan KPR dan KPA disebabkan oleh penurunan hampir seluruh tipe kredit. Hanya KPR tipe kecil (s.d.21) dan besar (70+) yang masih tumbuh positif namun melambat di triwulan I 2020. Sementara itu, pertumbuhan KPA masih terkontraksi pada semua tipe KPA.

Dari sisi risiko, kualitas KPR dan KPA cenderung menurun. Hal ini tercermin dari rasio NPL KPR dan KPA di triwulan I 2020 (3,40%) yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (2,99%). Meskipun demikian, berdasarkan tipenya, beberapa kredit KPA perlu mendapat perhatian

husus mengingat rasio NPL kredit tersebut jauh melampaui *threshold* 5%.

4.3.3.2. Penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Multiguna

Berbeda dengan KPR dan KPA, KKB tumbuh meningkat di triwulan I 2020. KKB tumbuh 10,10% (yoy) di triwulan I 2020, meningkat dari triwulan sebelumnya (8,36%; yoy). Meningkatnya pertumbuhan KKB bersumber dari pertumbuhan kredit roda enam (truk) yang tumbuh 24,85%(yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 (8,66%;yoy). Sementara itu, KKB roda empat dan roda dua tumbuh melambat pada triwulan I 2020 dibandingkan dengan triwulan IV 2019 (tabel IV.3).

Kualitas kredit KKB secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio NPL KKB yang stabil berada di level rendah. Pada triwulan I 2020, NPL KKB tercatat sebesar 0,81%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (0,59%), namun jauh berada di bawah 5%. Selain itu, NPL untuk KKB roda enam yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 6,26 (di atas 5%), kini membaik dan berada di level 4,85%.

Tabel IV.2. Perkembangan Kredit KPR dan KPA

Jenis Kredit	Pangsa TW IV 2019 (%)	g. Kredit (%; yoy)				
		2019				2020
		I	II	III	IV	I
KPR	31.10	9.66	8.65	9.05	6.95	5.73
RT. KPR sd 21	1.91	(1.43)	(2.88)	0.20	1.61	0.83
RT. KPR sd 70	16.10	17.85	17.38	16.59	13.47	11.60
RT. KPR 70+	13.08	3.42	1.70	2.49	0.78	(0.03)
KPA	0.31	(4.67)	(8.28)	(13.87)	(13.01)	(15.45)
RT. KPA sd 21	0.05	(13.15)	1.15	(27.05)	0.08	(18.05)
RT. KPA sd 70	0.17	(12.46)	(12.93)	(10.16)	(15.07)	(15.52)
RT. KPA 70+	0.09	24.58	(3.49)	(11.10)	(15.96)	(13.87)
KPR+KPA	31.41	9.33	11.46	9.82	6.00	4.70

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Tabel IV.3. Perkembangan KKB dan Multiguna

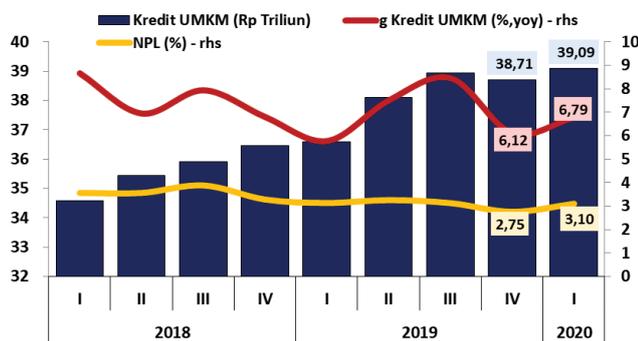
Jenis KKB	Pangsa TW IV 2019 (%)	g. Kredit (%; yoy)				
		2019				2020
		I	II	III	IV	I
KKB	8.11	9.02	6.49	7.39	8.23	9.18
Mobil	7.01	5.55	0.17	2.14	5.28	4.95
Sepeda Motor	0.74	54.42	83.70	88.26	44.61	28.10
Truk	0.03	-22.54	257.62	-13.53	8.66	24.85
Lainnya	0.33	86.07	58.34	35.37	14.46	126.50
RT. Multiguna	51.41	2.83	4.59	6.52	8.36	10.10

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Pangsa kredit multiguna masih mendominasi kredit rumah tangga. Besarnya pangsa kredit multiguna didorong oleh pengajuan kredit tersebut yang relatif mudah. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, kredit multiguna dapat menjadi pilihan RT dalam mencari sumber dana pembiayaan kebutuhan konsumsinya. Secara umum kredit multiguna dapat secara leluasa digunakan untuk aktivitas konsumsi seperti renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik. Pada triwulan I 2020, kredit multiguna tumbuh 10,10% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,36% (yoy). Dari sisi risiko, kualitas kredit multiguna masih cukup baik, sehingga risiko kredit ini relatif kecil. Hal ini tercermin dari konsistennya NPL kredit multiguna berada di level yang rendah.

4.4. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Grafik IV.17. Pertumbuhan Kredit UMKM

Pada triwulan I 2020 kredit UMKM tumbuh 6,79% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari meningkatnya kredit UMKM LU industri pengolahan dan akmamin. Sementara itu, kredit UMKM LU pertanian dan perdagangan cenderung tumbuh melambat (Tabel IV.4).

Risiko kredit UMKM pada triwulan I 2020 masih terjaga. Meskipun kredit UMKM tumbuh melambat, namun kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,98%, meningkat dibandingkan triwulan lalu (2,75%), namun masih berada di bawah 5%. Meningkatnya NPL kredit UMKM terutama bersumber dari meningkatnya kredit UMKM untuk LU perdagangan, industri dan akmamin. Sementara itu, meskipun secara agregat NPL kredit UMKM masih berada di bawah level 5%, namun secara sektoral, NPL UMKM LU industri telah melampaui *threshold* tersebut.

Eksposur perbankan terhadap UMKM pada triwulan I 2020 cukup baik dan stabil. Pada triwulan I 2020, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Bali tercatat sebesar 37,48%, stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (37,41%). Rasio penyaluran kredit UMKM di Bali dinilai cukup baik karena telah melebihi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi kredit UMKM terbesar masih berada di Kota Denpasar (pangsa 31,66%), diikuti Kab. Badung (pangsa 17,21%) dan Kab. Gianyar (12,22%). Dari sisi risiko, secara umum NPL kredit UMKM di seluruh Kab./Kota terjaga di bawah level 5%. Hanya Kabupaten Buleleng yang saat ini memiliki NPL di atas 5% (6,13%). NPL terendah dimiliki oleh Kabupaten Gianyar (1,40%).

Tabel IV.4. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

UMKM Sektoral	Nominal (Triliun)					g. Kredit (%; yoy)				
	2019				2020	2019				2020
	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	I
Pertanian	2.18	2.38	2.60	2.66	2.76	11.20	21.33	27.66	29.41	26.74
Industri	0.57	0.67	0.83	0.83	1.09	51.49	63.56	78.62	88.89	91.04
Perdagangan	20.97	21.51	21.75	21.31	21.05	4.95	4.51	3.93	1.85	0.37
Akmamin	4.45	4.83	4.98	4.90	5.22	11.09	16.10	21.68	12.27	17.34

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Tabel IV.5. Pangsa Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	Nominal (Triliun)					Pangsa (%)				
	2019				2020	2019				2020
	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	I
Kota Denpasar	12.05	12.39	12.42	12.36	12.38	32.93	32.53	31.90	31.93	31.66
Kab. Badung	6.45	6.75	6.90	6.80	6.73	17.63	17.73	17.71	17.56	17.21
Kab. Gianyar	4.48	4.65	4.69	4.63	4.78	12.25	12.22	12.05	11.95	12.22
Kab. Buleleng	3.77	3.98	4.17	4.11	4.21	10.29	10.44	10.70	10.63	10.76
Kab. Tabanan	3.24	3.40	3.61	3.61	3.68	8.85	8.93	9.26	9.32	9.42
Kab. Karangasem	1.94	2.03	2.13	2.15	2.18	5.31	5.33	5.47	5.56	5.57
Kab. Jembrana	1.80	1.89	1.94	1.97	2.00	4.92	4.96	4.97	5.08	5.12
Kab. Bangli	1.43	1.50	1.55	1.54	1.56	3.93	3.93	3.98	4.00	4.00
Kab. Klungkung	1.44	1.50	1.55	1.55	1.58	3.90	3.93	3.97	3.97	4.05
Total UMKM	36.60	38.10	38.95	38.71	39.09	37.68	37.75	38.20	37.41	37.48

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

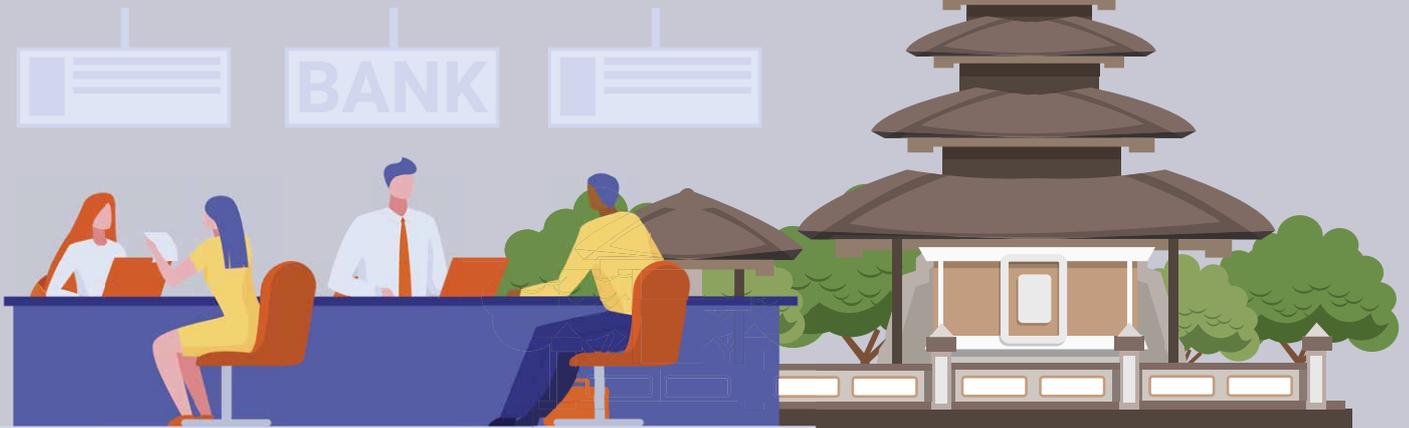
Tabel IV.6. Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	g. Kredit (%; YoY)				
	2019				2020
	I	II	III	IV	I
Kota Denpasar	1.73	4.08	2.87	1.40	2.68
Kab. Badung	6.92	7.95	12.90	6.37	4.20
Kab. Gianyar	5.55	8.92	7.62	4.28	6.56
Kab. Buleleng	1.34	6.53	9.12	6.30	11.74
Kab. Tabanan	4.78	9.66	13.79	13.44	13.70
Kab. Karangasem	7.99	12.40	14.95	14.74	12.03
Kab. Jembrana	4.58	10.43	9.96	11.82	11.14
Kab. Bangli	7.19	11.58	10.29	10.56	8.69
Kab. Klungkung	10.07	15.15	13.92	11.90	10.73
Total UMKM	5.79	7.51	8.46	6.12	6.79

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

BOKS 3

ANALISIS DAMPAK *SHOCK* PDRB TERHADAP RISIKO KREDIT DI PROVINSI BALI



PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN LU TERKAIT PARIWISATA

Merebaknya pandemi COVID-19 berdampak cukup besar terhadap perekonomian Bali. Kinerja ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup besar pada triwulan I 2020. Menurunnya kinerja pariwisata tercermin dari menurunnya kinerja lapangan usaha (LU) akmamin, perdagangan dan industri pengolahan. Penurunan kinerja ini kemudian dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan *repayment capacity* LU tersebut, yang umumnya tercermin dari indikator rasio *Nonperforming Loan*¹ (NPL) dan *Loan at Risk*² (LaR) pada sektor tersebut.

Pada triwulan I 2020, ekonomi Bali berkontraksi sebesar 1,14% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya (5,51%;yoy). Sejalan dengan hal ini, kinerja LU yang berhubungan dengan pariwisata juga mengalami penurunan. Namun demikian, rasio NPL sektor tersebut cenderung stabil pada triwulan I 2020. Memasuki awal triwulan II (April) 2020, rasio NPL juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat berarti dua hal yaitu NPL secara umum tidak sensitif terhadap pergerakan PDRB atau kredit bermasalah mendapatkan fasilitas restrukturisasi sehingga tekanan terhadap keuangan tidak tergambarkan dari NPL.

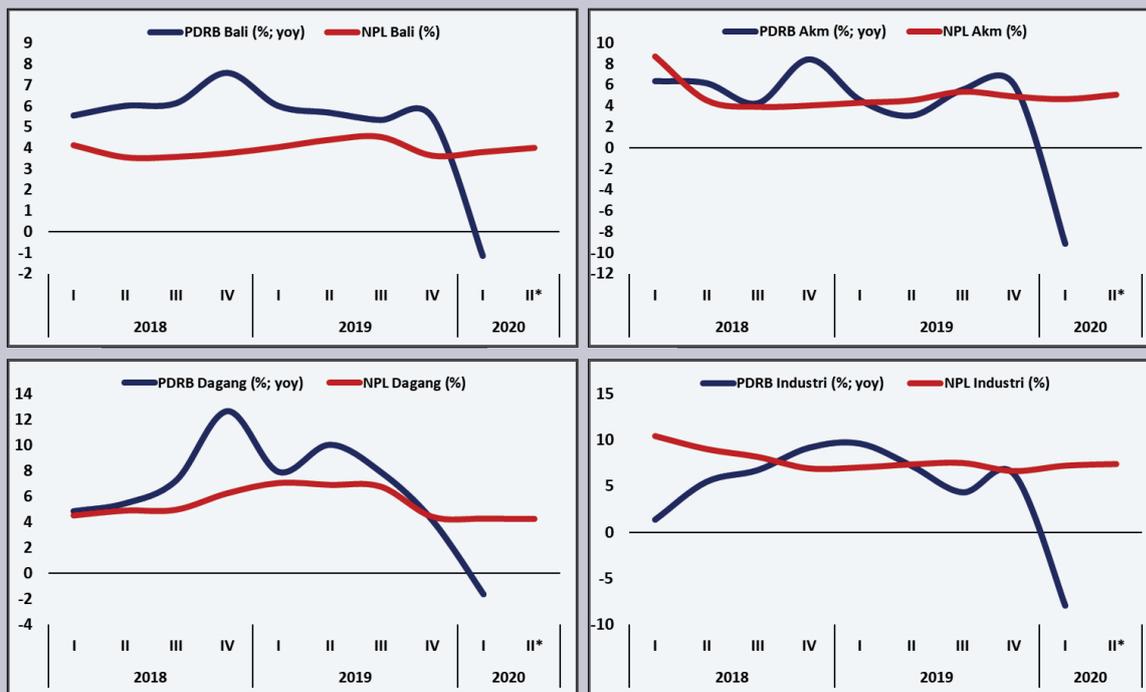
TERJAGANYA NPL DITOPANG OLEH PENINGKATAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang usahanya terdampak COVID-19. Sejalan dengan hal ini, rasio *LaR* cenderung meningkat di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan gambar boks III.2, *LaR* cenderung lebih sensitif merespon penurunan PDRB di triwulan I 2020 dibandingkan dengan NPL.

DAMPAK *SHOCK* PDRB TERHADAP *LaR* DI PROVINSI BALI

Berdasarkan Gambar boks III.1, *LaR* cenderung lebih sensitif merespon penurunan perekonomian dibandingkan dengan NPL. Oleh karena itu, analisis akan di fokuskan kepada simulasi *shock* yang terjadi pada PDRB terhadap *LaR* Bali dan sektor terkait pariwisata (Akmamin, Industri, dan Perdagangan). Berdasarkan pengalaman saat terjadi erupsi Gunung Agung pada triwulan IV 2017, diketahui bahwa efek dari pertumbuhan ekonomi cukup sensitif mempengaruhi kinerja keuangan korporasi nonkeuangan dibandingkan dengan kinerja secara keseluruhan debitur.

1 *Nonperforming Loan* adalah kredit bermasalah yang merupakan jumlah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
2 *Loan at Risk* adalah kredit yang berisiko gagal bayar yang merupakan jumlah dari kredit restrukturisasi baik kualitas lancar maupun dalam perhatian, kredit nonrestrukturisasi kualitas dalam perhatian, dan NPL.

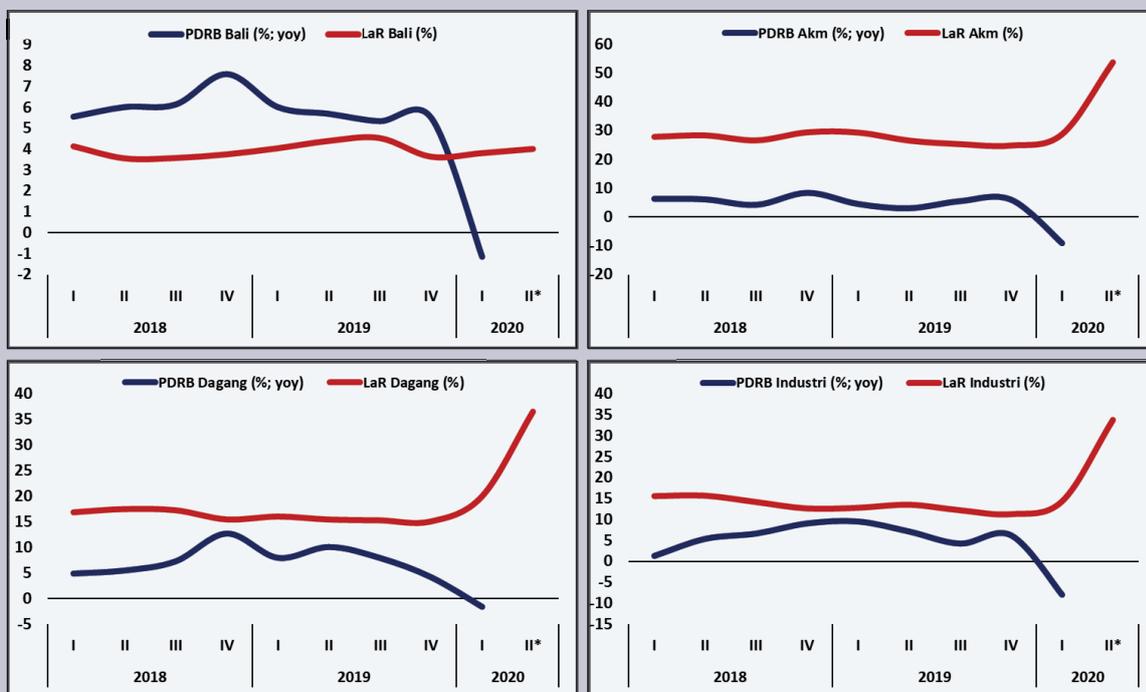


Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.1. Perkembangan PDRB dan NPL

Respon yang diharapkan dari LaR terhadap PDRB adalah negatif, sesuai dengan hasil dari studi empiris terdahulu terkait dampak pertumbuhan ekonomi terhadap NPL³. Pertumbuhan ekonomi dan NPL memiliki hubungan negatif karena ketika pertumbuhan ekonomi menurun, pendapatan korporasi secara umum juga akan menurun

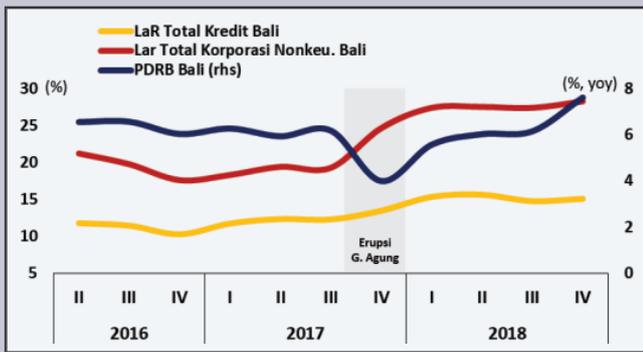
sehingga mempengaruhi kemampuan bayar korporasi. Jika kemampuan bayar korporasi menurun cukup besar maka hal tersebut akan mendorong peningkatan kredit bermasalah (NPL). Nkusu (2011) menggunakan data panel 26 negara menemukan adanya respon negatif antara *shock* pada pertumbuhan ekonomi dengan NPL. Selain



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.2. Perkembangan PDRB dan LaR

3 Karena LaR cenderung lebih sensitif terhadap PDRB, analisis ini akan menggunakan LaR dan mengasumsikan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap NPL pada studi empiris terdahulu akan sama dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap LaR.



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.3. Perkembangan PDRB dan LaR saat Erupsi G. Agung

itu respon NPL juga cenderung *persistent* atau cenderung tidak kembali pada *initial equilibrium* dalam jangka waktu 4 tahun. Respon negatif NPL terhadap pertumbuhan ekonomi juga didapati oleh *Konstantakis and Michaelides* (2016). Dalam penelitiannya, respon negatif NPL terhadap *shock* GDP cukup signifikan dan bertahan selama 2 triwulan, lalu kembali ke *initial equilibrium* dalam jangka panjang.

Untuk melihat bagaimana respon LaR terhadap *shock* yang terjadi pada PDRB di Bali, maka dilakukan simulasi menggunakan *Vector Auto Regression (VAR)*. Sesuai penjelasan sebelumnya, data LaR yang digunakan adalah LaR Korporasi di Bali. Hasil simulasi terdiri dari empat bagian yaitu:

- Respon LaR Korporasi total terhadap *shock* PDRB Bali;
- Respon LaR Korporasi LU akmamin terhadap *shock* PDRB Bali;
- Respon Lar Korporasi LU perdagangan terhadap *shock* PDRB Bali; dan
- Respon Lar Korporasi LU industri terhadap *shock* PDRB Bali.

Ketiga LU tersebut dinilai dapat mewakili kinerja pariwisata. Sementara itu, LU transportasi yang juga terkait dengan pariwisata tidak digunakan dalam analisis dikarenakan pengkategorian LU tersebut dalam data kredit digabung dengan LU komunikasi.

HASIL SIMULASI

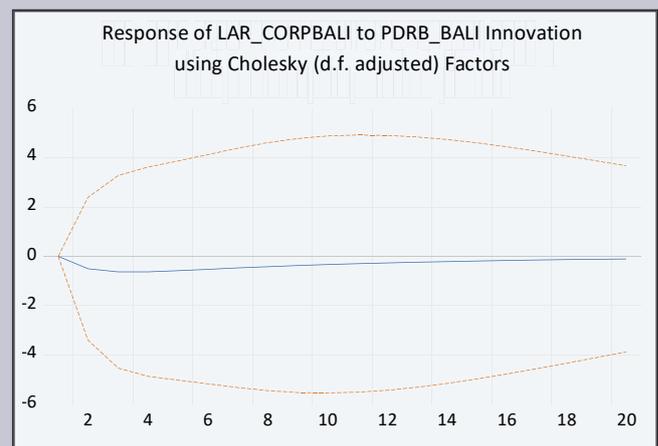
Simulasi dilakukan dengan menggunakan VAR dimana juga telah dilakukan uji normalitas agar *shock* dari VAR bersifat *symmetric* sehingga meskipun IRF secara otomatis menunjukkan *shock* yang positif, namun dapat digunakan untuk menjelaskan *shock* negatif dengan mengubah arah dari respon yang dihasilkan.

- Respon LaR Korporasi total terhadap *shock* PDRB Bali.

Impulse Response Function (IRF) menunjukkan adanya hubungan negatif antara LaR korporasi dan PDRB Bali. Peningkatan 1 *standard deviation (SD)* PDRB Bali atau setara 1,97%, akan direspon oleh penurunan LaR Korporasi sebesar 0,5% dalam 2 periode (2 triwulan) setelah *shock, ceteris paribus*. Begitu juga sebaliknya (karena VAR yang digunakan *symmetric*), 1 SD *adverse shock* atau penurunan sekitar 1,97% PDRB Bali akan direspon oleh peningkatan LaR sebesar 0,5% dalam 2 periode (2 triwulan). Respon dari LaR Korporasi secara keseluruhan tidak terlalu besar namun cukup *persistent* di mana dalam jangka waktu 20 periode (5 tahun) LaR masih belum kembali kepada *equilibrium* awal.

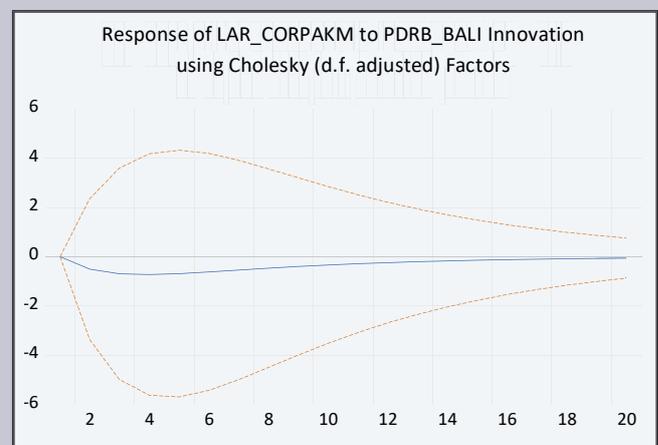
- Respon LaR Korporasi LU Akmamin terhadap *shock* PDRB Bali.

IRF menunjukkan adanya hubungan negatif antara LaR korporasi LU Akmamin dan PDRB Bali. 1 SD *adverse shock* atau penurunan sekitar 1,97% PDRB



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.4. Respon NPL Kredit Korporasi total terhadap *shock* PDRB Bali



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.5. Respon NPL Kredit Korporasi LU Akmamin terhadap *shock* PDRB Bali

Bali akan direspon oleh peningkatan LaR sebesar 0,5% dalam 1 periode (1 triwulan). Respon dari LaR LU Akmamin secara umum tidak terlalu besar namun cukup *persistent*, dan LaR akan menuju keseimbangan awal setelah 20 periode (5 tahun) dari *shock*.

- c) Respon Lar Korporasi LU Perdagangan terhadap shock PDRB Bali.

IRF menunjukkan adanya hubungan negatif antara LaR korporasi LU Perdagangan dan PDRB Bali. 1 SD *adverse shock* atau penurunan sekitar 1,97% PDRB Bali akan direspon oleh peningkatan LaR sebesar 5,1% dalam dua periode (2 triwulan) setelah *shock*, *ceteris paribus*. Respon dari LaR pada Korporasi LU Perdagangan lebih besar dari LU Akmamin namun *less persistent*. LaR baru menuju keseimbangan awal setelah 9 periode (2 tahun 3 bulan) dari *shock*.

- d) Respon LaR Korporasi LU Industri terhadap shock PDRB Bali.

IRF menunjukkan adanya hubungan negatif antara LaR korporasi LU Industri dan PDRB Bali. 1 SD *adverse shock* atau penurunan sekitar 1,97% PDRB Bali akan direspon oleh peningkatan LaR sebesar 3,2% dalam dua periode (2 triwulan) setelah *shock*, *ceteris paribus*. Respon dari LaR pada Korporasi LU Industri lebih kecil dari LU perdagangan namun lebih *persistent*. LaR cenderung masih bertahan di atas *equilibrium* awal setelah melewati 20 periode (5 tahun) dari *shock*.

KESIMPULAN

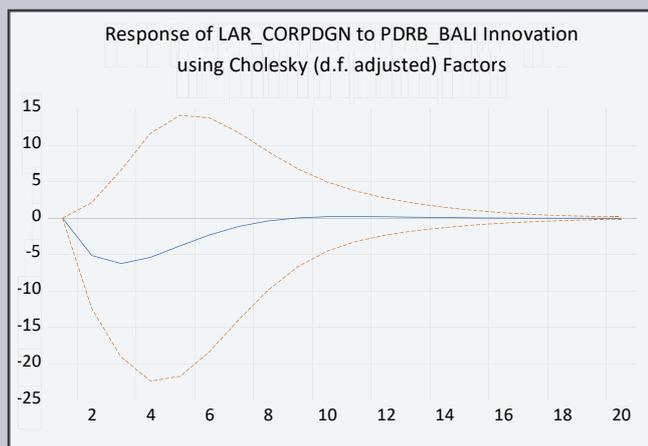
Dari hasil simulasi, di antara ketiga LU yang dikaji, disimpulkan bahwa penurunan PDRB memberikan efek paling besar terhadap LaR Korporasi LU perdagangan. Sementara itu, efek dari penurunan PDRB paling cepat di respon oleh LaR Korporasi LU akmamin dan efek terpanjang (*most persistent*) ditunjukkan LaR pada LU industri.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku LU industri dikarenakan besarnya persistensi efek dari penurunan PRDB di LU tersebut. Di Bali, pelaku LU industri kebanyakan merupakan UMKM yang dukungan keuangannya rendah. Untuk menjaga likuiditas pelaku LU industri, pemerintah dapat lebih memberdayakan LU tersebut ataupun menyediakan program asuransi kredit.

REFERENSI

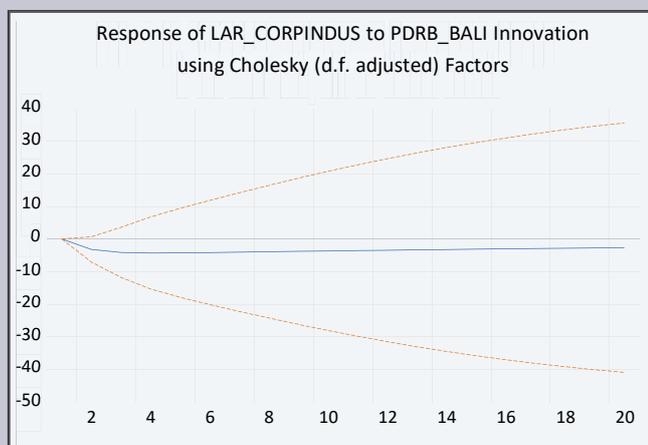
Konstantakis, K. N., & Michaelides, P. G. (2016). Non performing loans (NPLs) in a crisis economy: Long-run equilibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001–2015). *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*.

Nkusu, M. (2011). Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. *IMF Working Paper*.



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

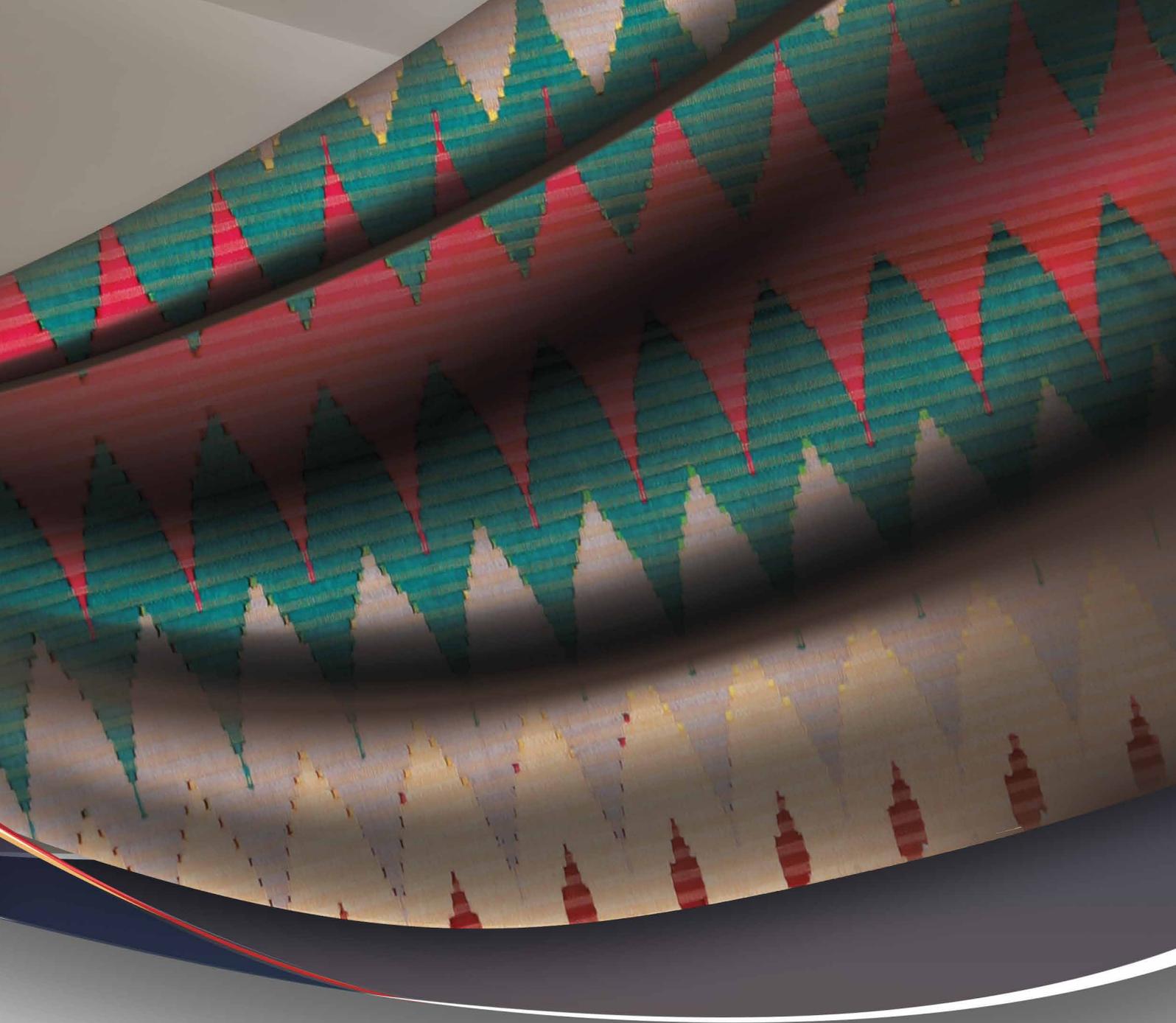
Gambar Boks III.6. Respon NPL Kredit Korporasi LU Perdagangan terhadap shock PDRB Bali



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Gambar Boks III.7. Respon NPL Kredit Korporasi LU Industri terhadap shock PDRB Bali





BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* sebesar Rp1,74 triliun. Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya permintaan uang kartal pada periode laporan, pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun.
- Perkembangan transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume.

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow¹⁰ sebesar Rp1,74 triliun. Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya permintaan uang kartal pada periode laporan, pascaperayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun. Perkembangan transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan I 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 380ribu lembar atau tumbuh -13,10 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -12,55% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp12,15 triliun atau tumbuh -3,57% (yoy) pada triwulan I 2020. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -3,00% (yoy). Demikian halnya dengan transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) juga mengalami perlambatan. Nominal RTGS tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 15,65% (yoy) pada triwulan I 2020. Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh dari 19,09 % (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi sebesar 1,49% (yoy).

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Perkembangan layanan sistem pembayaran di Bali, baik dengan transaksi tunai maupun nontunai pada triwulan I 2020 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran tunai dapat memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi uang Rupiah yang layak edar serta tepat waktu. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai telah dapat menyediakan sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) serta uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Sesuai dengan pola historisnya, perkembangan transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* (aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding dengan uang yang keluar), yaitu sebesar Rp1.738 miliar

setelah berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun.

Secara triwulanan, nominal *inflow* pada triwulan I 2020 tercatat sebesar Rp5,76 triliun atau melambat sebesar -14,78% (yoy). Kondisi ini lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan *inflow* pada triwulan IV 2019 yang terakselerasi sebesar 10,13% (yoy), dengan nilai nominal Rp4,58 triliun. Sementara itu, nilai nominal *outflow* pada triwulan laporan tercatat menunjukkan peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 14,61% (yoy), dengan nominal Rp4,02 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,32% (yoy), dengan nominal Rp5,84 triliun. Meskipun nilai *inflow* melambat dan nilai *outflow* meningkat, aliran uang pada triwulan berjalan tercatat mengalami *net inflow*. Hal ini sejalan dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2020¹¹. Perlambatan nilai *outflow* pada triwulan laporan juga didorong oleh beberapa faktor meliputi meningkatnya inflasi¹² dan melambatnya kinerja pariwisata Bali, seiring dengan perlambatan jumlah kunjungan wisman pada triwulan laporan¹³.

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

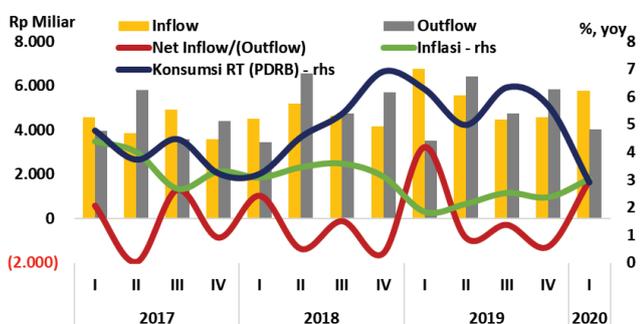
Selain pengelolaan aliran uang kartal yang masuk dan keluar (*inflow* dan *outflow*), Bank Indonesia juga memiliki tugas memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat atau dikenal dengan *Clean Money Policy*. Beberapa kegiatan tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak

- 10 *Net inflow* merupakan kondisi di mana uang yang masuk ke kas Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar kas Bank Indonesia
- 11 Kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 tercatat terkontraksi sebesar -1,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar 5,51% (yoy)
- 12 Tingkat inflasi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), sedikit meningkat dibanding triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy).
- 13 Jumlah wisman pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 1,05 juta orang atau terkontraksi sebesar -21,82% (yoy), jauh melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,65% (yoy).

Tabel V.1. Perkembangan *Inflow - Outflow* Provinsi Bali

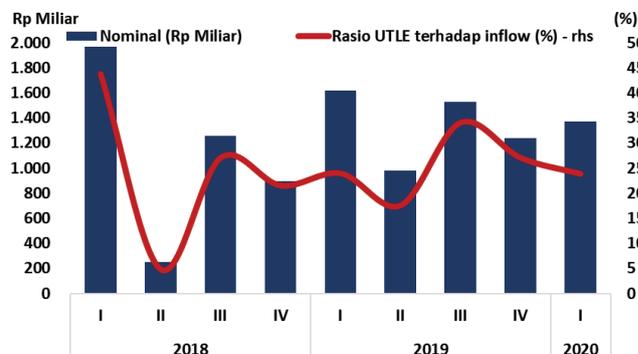
Indikator	2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Rp Miliar)	4.575	3.876	4.929	3.582	4.502	5.207	4.654	4.160	6.762	5.569	4.481	4.582	5.762
Outflow (Rp Miliar)	3.974	5.822	3.601	4.425	3.448	6.558	4.745	5.703	3.512	6.409	4.744	5.836	4.025
Net Inflow/(Outflow) - Rp Miliar	601	(1.946)	1.328	(843)	1.054	(1.352)	(91)	(1.543)	3.250	(840)	(263)	(1.254)	1.738
Penukaran (Rp Miliar)	20,00	18,00	15,11	18,00	22,37	22,11	30,61	26,46	30,22	36,07	37,11	90,77	66,27
Temuan Uang Palsu (Lembar)	1.055	1.509	1.406	759	1.241	656	775	910	897	788	714	735	233
Frekuensi Kas Keliling (Kali) - rhs	24	21	15	34	17	14	24	25	14	14	16	3	5
Nominal Kas keliling (Rp miliar)	13,26	30,68	2,94	6,13	4,64	17,84	5,26	8,21	5,99	8,43	5,31	3,61	1,90

Sumber : Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.1. Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow, Inflasi* dan PDRB



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.2. Rasio UTLE Terhadap *Inflow*

Edar (UTLE). Sepanjang triwulan I 2020 jumlah UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar 34,44 juta lembar. Sementara itu, rasio UTLE terhadap *inflow* mencapai 23,87% pada triwulan laporan. Pangsa ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 27,09%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan peduli akan perlunya menjaga kualitas uang.

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

SKNBI merupakan salah satu sarana transfer dana nontunai selain RTGS, namun dengan nilai nominal yang relatif kecil (ritel) dibandingkan dengan RTGS (kategori nominal besar). Kegiatan operasional SKNBI dilakukan melalui mekanisme pertukaran warkat debit antarbank yang berjalan melalui skema kliring. Untuk Wilayah

Provinsi Bali, koordinator penukaran warkat debit kliring dilaksanakan di KPwBI Provinsi Bali di Kota Denpasar, sedangkan untuk Wilayah Singaraja yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah Bank Mandiri.

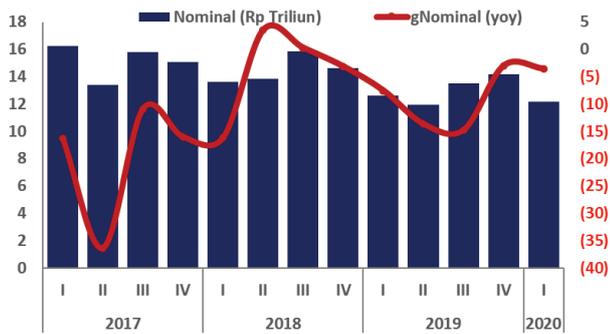
Perkembangan transaksi nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan di periode laporan. Pada triwulan I 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 380.183 lembar atau tercatat tumbuh -13,10% (yoy). Kondisi ini sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar -12,55% (yoy). Sejalan dengan itu, nilai nominal transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 tercatat sebesar Rp12,15 triliun atau tumbuh sebesar -3,57% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar -3,00% (yoy). Melambatnya transaksi kliring sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020¹⁴.

Tabel V.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Wilayah Bali

Indikator	2017				2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
PERPUTARAN KLIRING													
Volume Kliring (ribu)	622,00	540,00	608,54	568,65	538,49	533,72	582,38	510,11	437,48	412,785	444,077	446,071	380,183
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	10,20	10,19	9,82	9,32	8,83	9,88	9,39	8,36	7,41	7,51	6,73	6,76	6,55
Nominal Kliring (Rp Miliar)	16.270,00	13.370,00	15.804,40	15.077,89	13.635,43	13.842,34	15.845,75	14.602,60	12.603,80	11.948,76	13.505,12	14.164,47	12.153,95
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	266,72	252,26	254,91	247,18	223,53	256,34	255,58	239,39	213,62	217,25	204,62	214,61	209,55
TOLAKAN CEK/BG													
Lembar (ribu)	7,91	7,45	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,14	3,85	3,88	4,15	3,86
Nominal Cek/BG (Rp Miliar)	423,00	202,00	186,95	196,68	168,87	174,93	162,94	167,45	146,04	141,32	117,82	131,43	126,76
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING													
- Lembar (yoy, %)	(1,74)	(20,35)	(4,47)	(15,25)	(13,43)	(1,16)	(4,30)	(10,29)	(18,76)	(22,66)	(23,75)	(12,55)	(13,10)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(18,10)	(37,61)	(12,22)	(17,26)	(16,19)	3,53	0,26	(3,15)	(7,57)	(13,68)	(14,77)	(3,00)	(3,57)
PERTUMBUHAN TOLAKAN CEK/BG													
- Lembar (yoy, %)	(4,15)	(5,22)	(17,28)	(24,27)	(25,28)	(28,17)	(21,98)	(17,87)	(29,92)	(28,13)	(17,97)	(10,17)	(6,69)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(1,63)	(52,13)	(30,24)	(26,88)	(16,40)	(6,43)	(17,15)	(14,86)	(13,52)	(19,21)	(27,69)	(21,51)	(13,20)

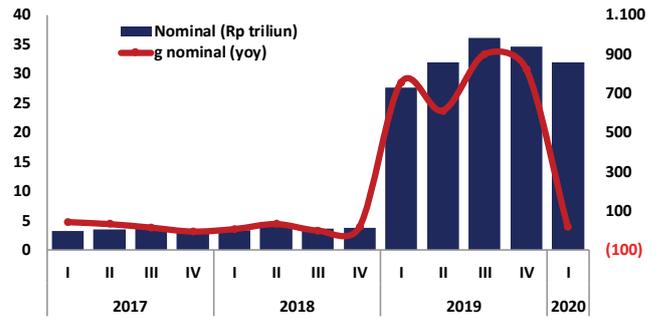
Sumber : Bank Indonesia

14 Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2019 tercatat sebesar -1,14% (yoy), terkontraksi dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,51% (yoy).



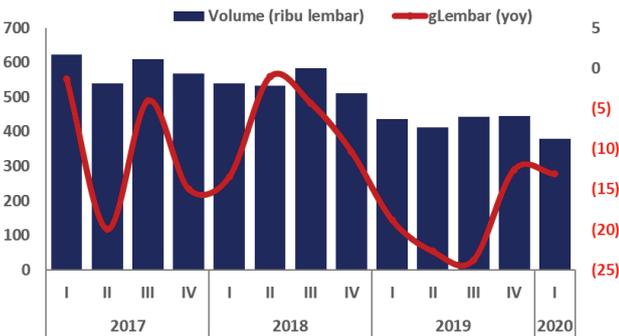
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.3. Perkembangan Nominal Kliring di Bali



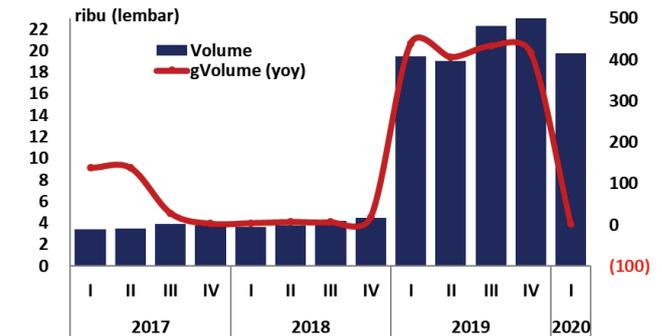
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.5. Perkembangan Nominal RTGS di Bali



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.4. Perkembangan Volume Kliring di Bali



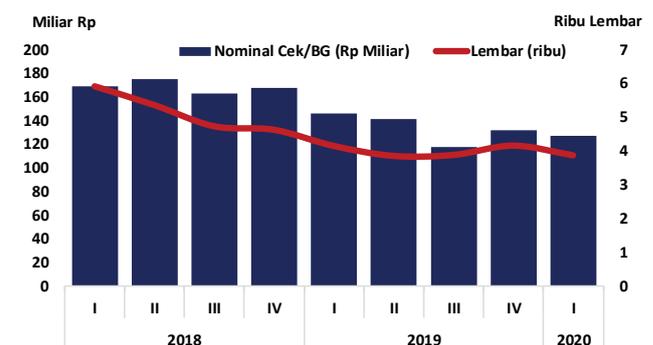
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.6. Perkembangan Volume RTGS di Bali

Sejalan dengan SKNBI, transaksi Bank Indonesia **Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)** pada triwulan laporan juga mengalami perlambatan. Pada triwulan I 2020, nominal RTGS tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 15,65% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp34,6 triliun atau tumbuh sebesar 416,23%. Dilihat dari volumenya, transaksi RTGS tercatat sebanyak 19.729 lembar atau tumbuh 1,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 23.034 lembar atau tumbuh sebesar 822,77%.

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG

Perkembangan nominal tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan terus mengalami penurunan, baik dari sisi volume maupun nilai nominal. Volume tolakan cek/bilyet giro pada periode laporan tercatat turun sebesar 13,10% (yoy) atau sejumlah 3.860 lembar. Sementara itu, nominal tolakan cek/bilyet giro pada periode laporan tercatat sebesar Rp126,76 miliar atau menurun -13,2% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong perbankan dalam mematuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro. Penurunan jumlah tolakan transaksi cek/BG yang terjadi sejak tahun 2017, juga menunjukkan upaya perbankan dalam mensosialisasikan penggunaan bilyet giro kepada nasabahnya telah berjalan dengan baik dan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.7. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali

mencapai sasaran yang diharapkan.

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli

Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan kualitas uang Rupiah (*soil level*) di masyarakat. Secara umum, terdapat dua jenis layanan kas yang dilakukan Bank Indonesia untuk implementasi *Clean Money Policy*, yaitu melalui layanan kas di dalam kantor dan layanan kas di luar kantor. Kedua layanan kas ini dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dan 45 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan kas di dalam kantor Bank Indonesia dilakukan kepada bank umum (penyetoran dan pembayaran), maupun penukaran uang langsung kepada masyarakat dengan jadwal tertentu. Selain menukarkan uang langsung ke KPw Bank Indonesia Provinsi Bali di Kota Denpasar, masyarakat juga dapat menukar pada kantor bank umum. Layanan kas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi uang yang layak edar serta tepat waktu. Sepanjang bank memiliki persediaan uang Rupiah layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bank tidak diperbolehkan menolak permintaan penukaran dari masyarakat. Kondisi geografis Bali menjadi tantangan dalam pemenuhan dan penyediaan uang layak edar di masyarakat khususnya pada daerah terpencil, sehingga tetap dapat memperoleh uang dalam kualitas baik, layak edar serta dengan nominal pecahan yang sesuai. Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia membuka layanan kas di luar kantor, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kas Titipan

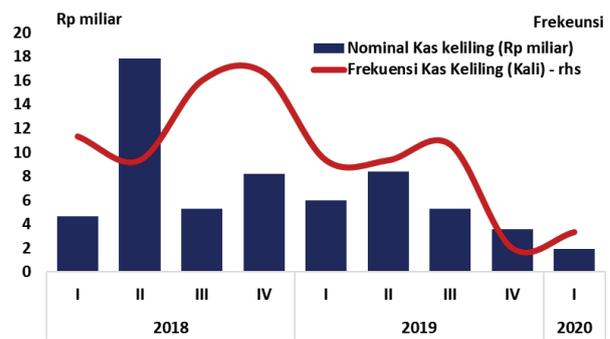
Kas Titipan adalah salah satu bentuk layanan Bank Indonesia dalam penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat yang berlokasi jauh dari Kantor Bank Indonesia melalui kerja sama dengan Bank Umum sebagai Bank Pengelola. Bank dapat melakukan penarikan/penyetoran tunai ke Bank Indonesia melalui Kas Titipan tanpa harus mendatangi Kantor Bank Indonesia. Selain itu, Kas Titipan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan bank akan uang kartal kepada masyarakat termasuk melalui mekanisme penukaran. Salah satu tujuan dari Kas Titipan ini adalah percepatan penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2016 di wilayah Kabupaten Singaraja, guna meningkatkan kualitas uang layak edar, dan pelaksanaan kas titipan diikuti oleh 8 anggota bank peserta dan 1 bank pengelola yang juga merangkap anggota di wilayah Kabupaten Singaraja.

2. Kas Keliling

Layanan kas ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui mekanisme penukaran langsung di beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat (seperti pasar dan pusat perbelanjaan), baik dalam kota maupun di luar kota. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar masyarakat, termasuk untuk wilayah yang sulit dijangkau (*remote area*). KPw BI Provinsi Bali juga melayani kas keliling ke daerah terpencil, yaitu

di Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

Perkembangan frekuensi pelaksanaan kegiatan kas keliling pada triwulan I 2020 tercatat sejumlah 5 kali, sama dengan triwulan sebelumnya yang sejumlah 5 kali. Sementara itu, nilai nominal transaksi dari kegiatan kas keliling pada triwulan laporan juga menunjukkan penurunan, yaitu turun sebesar -68,29% (yoy), dengan nilai nominal Rp1,9 miliar, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -56,08% (yoy). Kondisi ini terutama disebabkan oleh pembatasan kegiatan penukaran uang untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain sebagai sarana penukaran uang, kegiatan kas keliling juga dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat.



Sumber: Bank Indonesia

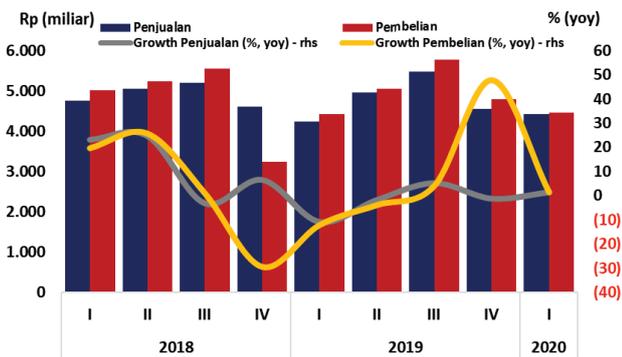
Grafik V.8. Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali

Selain layanan kas, KPw Bank Indonesia Provinsi Bali juga berupaya mempermudah operasional antar bank untuk mendapatkan akses Uang Layak Edar (ULE), melalui program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), khususnya di wilayah Kota Denpasar. Sejak tahun 2012, perbankan yang membutuhkan uang layak edar tidak harus mengambil ULE ke Kantor Bank Indonesia, karena telah difasilitasi melalui sistem TUKAB. Melalui sistem ini, bank dapat bertransaksi dengan bank lain yang memiliki ketersediaan ULE yang cukup. Dalam upaya untuk menjamin pengedaran uang Rupiah yang berkualitas, Bank Indonesia juga mengoptimalkan peran perbankan dalam menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah termasuk memastikan uang yang diberikan kepada nasabah dalam kondisi layak edar. Berkaitan dengan upaya tersebut, telah dilakukan pelatihan standar tata cara sortasi uang kertas kepada kasir perbankan dan koordinasi serta evaluasi layanan kas perbankan secara berkesinambungan.

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali

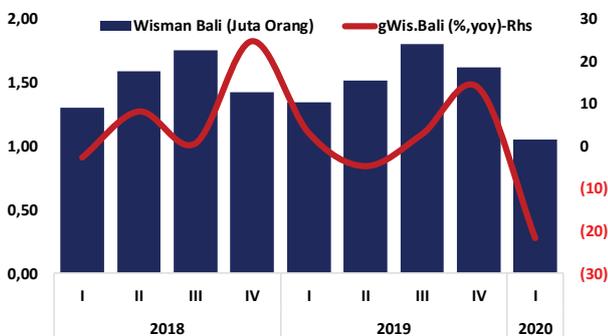
Nilai nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan IV 2019 menunjukkan perlambatan. Kondisi ini tercermin dari melambatnya pertumbuhan nilai nominal transaksi penukaran valuta asing, yaitu dari 19,09% (yoy) pada triwulan IV 2019, menjadi 1,49% (yoy) pada triwulan I 2020. Nominal transaksi jual-beli valas tercatat sebesar Rp8,90 triliun (triwulan I 2020), yang terdiri atas transaksi pembelian sebesar Rp4,47 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp4,43 triliun.

Melambatnya pertumbuhan transaksi penukaran (jual-beli) valuta asing pada KUPVA BB pada triwulan I 2020, sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisman akibat kebijakan negara-negara yang memberlakukan *travel restriction* dan *lockdown* di tengah pandemi COVID-19¹⁵. Kondisi ini juga didukung oleh aliran uang Rupiah yang masuk ke Bank Indonesia lebih tinggi pada triwulan I 2020 dibanding dengan aliran uang keluar (terjadi *net inflow*).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

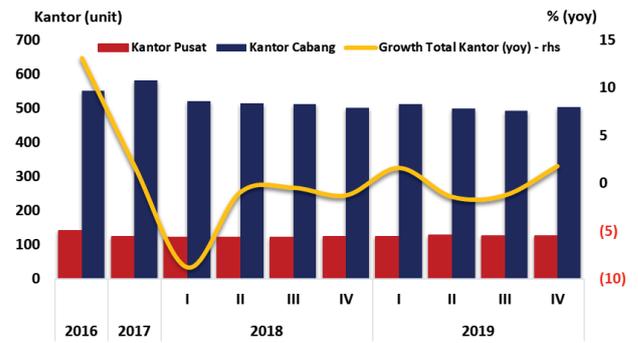
Grafik V.9. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik V.10. Perkembangan Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali

15 Jumlah wisman pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 1,05 juta orang atau terkontraksi sebesar -21,82% (yoy), jauh melambat dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,65% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.11. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Bila dianalisis lebih lanjut terkait dengan perkembangan jaringan kantor KUPVA BB, terinformasi bahwa jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin yang beroperasi di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 tercatat sejumlah 637 kantor, yang terdiri atas 130 Kantor Pusat (KP) dan 507 Kantor Cabang (KC). Secara tahunan, jumlah tersebut meningkat dibanding dengan triwulan IV 2019. Dalam rangka membangun industri KUPVA BB yang sehat dan efisien, Bank Indonesia juga melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk mencegah pemanfaatan KUPVA BB dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali

Keuangan inklusif merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi stabilitas sistem keuangan/makroprudensial, moneter, maupun sistem pembayaran. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, keuangan inklusif dapat membantu menurunkan tekanan risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan berupaya meningkatkan porsi penghimpunan dananya dari segmen ritel karena segmen ini relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Sementara itu pada sisi kredit, terbukanya segmen ritel baru yaitu kredit mikro dan kecil menjadi salah satu strategi diversifikasi portofolio dan diversifikasi risiko kredit. Guna mendukung keuangan inklusif, Bank Indonesia juga melaksanakan berbagai program pengembangan keuangan inklusif berupa edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan *responsible finance* bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, program pengembangan keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transmisi *policy rate*, mengingat transmisi *policy rate* dilakukan melalui perbankan. Berkembangnya

keuangan inklusif di masyarakat akan membantu efektivitas kebijakan moneter dan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect*¹⁶ dari kebijakan tersebut.

Sementara itu dari sisi sistem pembayaran, pengembangan keuangan inklusif akan mendukung semakin luas dan lancarnya jangkauan sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah sehingga dapat digunakan oleh seluruh penduduk di manapun berada. Di samping itu, program keuangan inklusif juga membantu terwujudnya program *less cash society* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Bank Indonesia memiliki parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan Inklusif (IKI)¹⁷. Pengukuran IKI dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang tersedia di sektor perbankan. IKI menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan inklusif meliputi: akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses¹⁸

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa¹⁹
2. Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000 penduduk dewasa
3. Jumlah kantor bank²⁰ per 1.000 km²
4. Jumlah ATM per 1.000 km²

Pada triwulan I 2020, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali mencapai 34. Sementara itu, rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada triwulan I 2020 sebesar 91²¹. Bila dianalisis lebih lanjut secara spasial, Kabupaten Karangasem masih menjadi daerah dengan rasio jumlah kantor layanan terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa sebesar 9,6%, sedangkan Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan rasio jumlah ATM terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa sebesar 5,25%. Di sisi lain, Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk dewasa dengan pangsa 15,46% memiliki rasio jumlah kantor layanan tertinggi dan rasio jumlah ATM tertinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Badung merupakan salah satu pusat daerah pariwisata Bali.

Ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah ATM per 1000 km² di Provinsi Bali mencapai 536. Sementara rasio jumlah kantor layanan bank per 1000 km² tercatat sebesar 201. Kabupaten Jembrana dan Bangli masih

Tabel V.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

Lokasi	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	1.132	3.022	34	91
Kota Denpasar	348	1.182	48	162
Kab. Badung	273	1.013	53	197
Kab. Bangli	30	31	17	18
Kab. Buleleng	95	141	19	28
Kab. Gianyar	138	316	35	80
Kab. Jembrana	48	69	22	32
Kab. Karangasem	51	79	16	25
Kab. Klungkung	37	47	27	34
Kab. Tabanan	112	144	33	42

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah.

16 *Second round effect* adalah dampak lanjutan dari kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 17 IKI adalah salah satu alternatif cara dalam pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multi-dimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan.
 18 Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain).
 19 Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun.
 20 Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank umum dan BPR yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point*, *Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC).
 21 Berarti terdapat 34 kantor layanan bank dan 91 jaringan ATM yang siap untuk melayani 100.000 penduduk dewasa di Bali.

Tabel V.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km²

Lokasi	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Prov. Bali	1.132	3.022	201	536
Kota Denpasar	348	1.182	2.723	9.250
Kab. Badung	273	1.013	652	2.420
Kab. Bangli	30	31	58	60
Kab. Buleleng	95	141	70	103
Kab. Gianyar	138	316	375	859
Kab. Jembrana	48	69	57	82
Kab. Karangasem	51	79	61	94
Kab. Klungkung	37	47	117	149
Kab. Tabanan	112	144	133	171

Sumber: Bank Indonesia

tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah kantor layanan per 1000 km² terendah. Kabupaten Bangli juga tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah ATM per 1000 km² terendah pada triwulan laporan. Sementara itu, Kota Denpasar tercatat memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM per 1000 km² tertinggi seiring dengan luas wilayah yang paling kecil (pangsa 2%) namun menjadi pusat pemerintahan dan pusat operasional perbankan di Bali.

Dimensi Penggunaan²²

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi:

1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa.
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan I 2020, rasio jumlah rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali sebesar 1.651, sedikit meningkat dibanding dengan triwulan IV 2019 (1.648). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi jumlah rekening simpanan yang dimiliki penduduk dewasa di bank sepanjang triwulan I 2020 relatif stabil. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan²³. Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening simpanan dengan peningkatan rasio terbesar terjadi di Kabupaten Denpasar, yaitu dari 8.340 pada triwulan IV 2019 menjadi 8.417 pada triwulan I 2020.

Tabel V.5. Indikator *Banking Penetration*

Lokasi	Rasio Jumlah Rekening Kredit		Rasio Jumlah Rekening Simpanan	
	TW IV 2019	TW I 2020	TW IV 2019	TW I 2020
Prov. Bali	192	199	1.648	1.651
Kab. Buleleng	95	93	875	861
Kab. Jembrana	86	85	425	428
Kab. Tabanan	330	330	1.610	1.624
Kab. Badung	109	107	1.294	1.305
Kab. Gianyar	125	124	745	743
Kab. Klungkung	122	120	629	633
Kab. Bangli	79	78	418	423
Kab. Karangasem	333	333	2.045	2.029
Kota Denpasar	779	867	8.340	8.417

Sumber: Bank Indonesia

²² Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.

²³ Contohnya Provinsi Bali memiliki penduduk dewasa berjumlah 3,25 juta dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 4,5 juta. Rasio jumlah simpanan=4,5juta / 3,25juta x 1000=1383.

Sejalan dengan simpanan, rasio jumlah rekening kredit turut mengalami peningkatan, dari 192 pada triwulan IV 2019 menjadi 199 pada triwulan I 2020. Secara spasial, rasio jumlah rekening kredit di seluruh wilayah di Bali relatif stabil. Peningkatan jumlah rekening kredit terbesar terjadi di Kota Denpasar dari 779 pada triwulan IV 2019 menjadi 867 pada triwulan I 2020.

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada Oktober 2017. Upaya ini sesuai amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Hingga triwulan I 2020, pembayaran di Tol Bali Mandara sudah sepenuhnya menerapkan nontunai (100% nontunai). Jalan Tol Bali Mandara memiliki 3 pintu gerbang, yakni Gerbang Tol Benoa, Gerbang Tol Nusa Dua dan Gerbang Tol Ngurah Rai. Selain itu, pada Maret 2018 telah dioperasikan layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di pintu tol Benoa untuk mengurangi kemacetan yang seringkali terjadi di pintu tol. Dengan adanya *drive thru* tersebut, pengguna tol dapat melakukan *top up* saldo uang elektronik ataupun membeli uang elektronik. Layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di Jalan Tol Bali Mandara ini adalah yang pertama di Indonesia.

Selain penerapan 100% nontunai di jalan tol, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. **KPw Bank Indonesia Provinsi Bali bekerja sama memfasilitasi dan mendukung implementasi elektronifikasi parkir (e-parking) kendaraan bermotor, obyek wisata, retribusi daerah, SPBU dan parkir bandara.** Kerjasama dengan PT Angkasa Pura dilakukan untuk mewujudkan program elektronikasi pada pembayaran parkir kendaraan

bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang dikemas dalam "Bali Card". Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa (*e-Port Card*). Di Pelabuhan Gilimanuk, untuk loket masuk penumpang dan loket masuk sepeda motor telah implementasi nontunai 100%, sedangkan untuk loket masuk kendaraan roda empat masih menggunakan sistem *Hybrid* (tunai dan nontunai). Dalam bidang transportasi, program elektronifikasi dilakukan dengan menyasar salah satu penyedia jasa transportasi. KPw Bank Indonesia Provinsi Bali juga mendorong elektronifikasi pembayaran tiket masuk obyek wisata khususnya di Kabupaten Tabanan dan kawasan wisata Pantai Pandawa serta pembayaran parkir kendaraan di pusat perbelanjaan.

Selain kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, implementasi pembayaran nontunai di pemerintahan daerah Provinsi Bali juga terus dikembangkan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah, penerapan nontunai telah dilaksanakan pada pajak daerah, khususnya Pajak/Retribusi Daerah, PBB, BPHTB, dan industri perhotelan, hiburan dan restoran (PHR). Sementara pengeluaran daerah Provinsi Bali juga telah diterapkan elektronifikasi, yaitu menggunakan transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemprov Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang tersambung secara *online* untuk pengelolaan APBD, sehingga pembuatan laporan keuangan seperti neraca dapat dilakukan seketika. Implementasi *e-Retribusi* telah dilaksanakan di Pasar Umum Beringkit (Kab. Badung), Pasar Agung (Desa Peninjoan) dan Pasar Jembrana sejak tahun 2019.

Sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai transformasi penyaluran bansos secara nontunai, Bank Indonesia juga telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos nontunai baik dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), Program Sembako, bantuan pangan, pupuk dan dana desa, dinilai lebih efisien dibanding dengan bansos tunai. Bansos nontunai khususnya PKH (Program Keluarga Harapan)

Tabel V.6. Jumlah Gardu Tol Bali Mandara

No	Nama Gerbang Tol	Jumlah Gardu Tol		
		Mobil	Sepeda Motor	Total
1	Gerbang Tol Benoa	4	3	7
2	Gerbang Tol Nusa Dua	4	4	8
3	Gerbang Tol Ngurah Rai	4	3	7
TOTAL		12	8	22

Sumber: PT. Jasa Marga Bali Tol, Tbk

dan Program sembako telah disalurkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penyaluran dilakukan oleh HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara) dengan pembagian wilayah penyaluran yang telah ditentukan.

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk nontunai/elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau *e-warong*. LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan teknologi *mobile* dan berbasis *daring* (dalam jaringan *online*). Layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai pertengahan tahun 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung implementasi elektronifikasi yang mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai, mendorong efisiensi distribusi bantuan dan meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (*e-warong*) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan berperan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan HIMBARA sebagai penyalur BPNT untuk menambah jumlah *E-Warong* yang melayani penerimaan KPM BPNT.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan nontunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, pada tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial nontunai, *training of trainers* (ToT) penyaluran program bantuan sosial secara nontunai di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Negara, terutama kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

serta pejabat Dinas Sosial. Selain itu, kegiatan edukasi penyaluran bantuan sosial nontunai diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan agen bank.

Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia, pada triwulan I 2020 jumlah agen LKD di Provinsi Bali sebanyak 8.727 agen atau tumbuh 21,66% (yoy), meningkat dibanding dengan triwulan IV 2019 (20,89%; yoy). Pertumbuhan jumlah agen LKD ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan elektronifikasi di Provinsi Bali.

Sebagai pedoman implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Bank Indonesia juga telah meluncurkan standar *Quick Response* (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Pengembangan QRIS ini mengusung semangat Unggul yaitu, Universal yang berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Gampang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel. Untung memiliki arti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Langsung berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

QRIS disusun dan dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.12. Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali

interoperabilitas antarp Penyelenggara, antar-instrumen, termasuk antarnegara. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan *QR Code Payment* model *Merchant Presented Mode* (MPM) dimana penjual (*merchant*) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (*customer*) ketika melakukan transaksi pembayaran.

Hingga bulan Mei 2020, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Bali tercatat sebanyak lebih dari 88 ribu. Berbagai *merchant* QRIS tersebar di kalangan pedagang, tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah ataupun universitas hingga destinasi wisata.

Penggunaan QRIS juga telah diimplementasikan di Samsat Pembantu Ubud Bali. Pembayaran menggunakan QRIS kantor Samsat Pembantu Ubud Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Sampai saat ini pemanfaatan QRIS telah diimplementasikan di 27 Samsat dan 1 Samsat Keliling dan perkembangan transaksi Pajak Kendaraan Bermotor melalui QRIS tercatat meningkat signifikan. Selain itu, QRIS juga telah diimplementasikan di 2 pasar tradisional, 260 tempat ibadah, 13 lembaga sosial, 5 kantin sekolah, 3 koperasi universitas, 2 destinasi wisata, koperasi, serta berbagai aplikasi belanja.

Pembayaran menggunakan QR Code ini diharapkan akan terus mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat inklusi keuangan, serta memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



BOKS 4

STRATEGI PENGEMBANGAN *CONTACTLESS DIGITAL PAYMENT* DI ERA *NEW NORMAL*

Sampai dengan akhir Mei 2020, perkembangan COVID-19 tercatat sebanyak lebih dari 6 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian sedikitnya 370 ribu kasus kematian¹. Pandemi menyebabkan kondisi “*New Normal*”, salah satunya terjadi kecenderungan pergeseran pola interaksi antarmanusia, seperti berkurangnya intensitas pertemuan fisik, tatap muka, termasuk juga meminimalkan kontak fisik. Hal ini mendorong semakin cepatnya digitalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek sistem pembayaran

Penggunaan Uang Elektronik (UE) dalam *digital payment* menjadi alternatif dalam melakukan transaksi. UE terdiri atas 2 jenis yakni UE berbasis *chip* dan UE berbasis *server*. Uang elektronik berbasis *chip* biasanya digunakan dalam bentuk kartu. Data keuangan dan saldo disimpan di dalam *chip* kartu. Beberapa bank telah mengeluarkan UE seperti *e-money* Bank Mandiri, *fazz* BCA, *Brizzi* BRI, *Tap Cash* BNI dan sebagainya. Sementara untuk UE berbasis *server* atau juga disebut dengan dompet elektronik (*e-wallet*) memanfaatkan *server* dalam pemakaiannya.

Penggunaan UE diintegrasikan dengan berbagai kemudahan dalam bertransaksi di Indonesia. Pemesanan makanan, penggunaan jasa ojek, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan berbagai transaksi lainnya menjadi mudah dan nyaman melalui penggunaan UE. Bahkan pemberian sedekah juga dapat dilakukan melalui UE. Lebih jauh lagi, penggunaan UE juga dinilai mendukung percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya tergolong ke dalam *unbanked people*, sekarang dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh Bank.

Namun demikian, tidak semua opsi pembayaran digital bebas kontak (*contactless*). Media fisik berupa kartu memiliki risiko menjadi perantara penyebaran COVID-19. Penggunaan UE berbasis *server* menjadi jawaban atas kebutuhan pembayaran tanpa kontak fisik (*contactless*) antara pembeli dan penjual. Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi yang terkoneksi dengan *server* penerbit. UE berbasis *server* menggunakan *smartphone* sebagai dompet digital untuk pembayaran dan bertransaksi.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia terus mendorong perkembangan *contactless digital payment* melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia dan wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang menggunakan QR code. QRIS sebagai standar nasional menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang teregistrasi (*server based*). QRIS memiliki informasi mengenai data, lokasi, kategori *merchant*, PJSP, nominal transaksi (optional), dan lainnya.

Implementasi QRIS mendukung 5 (Lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. **Pertama**, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. **Kedua**, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. **Ketiga**, menjamin *interlink* antara *Fin-tech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti *Application Programming Interface-API*), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. **Keempat**, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech & sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. **Kelima**, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip *resiprokalita*.

Di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia mendorong berbagai kebijakan terkait penggunaan *contactless digital payment* melalui QRIS. Bank Indonesia memberlakukan kebijakan *Merchant Discount Rate* sebesar 0% (bebas biaya) untuk *merchant* usaha mikro dari 1 April–30 September 2020. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong Penyedia Jasa Sistem Pembayaran untuk membuka pendaftaran *merchant* secara *online* dan pemuatan informasinya di *website* Bank Indonesia. Penggunaan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM) di mana

QRIS dikirim melalui aplikasi pesan instan menjadi salah satu upaya menjaga jarak fisik (*physical distancing*) antara penjual dan pembeli.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus melakukan kampanye penggunaan QRIS. Kampanye dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kampanye juga dilakukan pada berbagai pameran atau kegiatan di tingkat kota maupun provinsi termasuk kegiatan perguruan tinggi dan juga kegiatan-kegiatan perbankan.

Hingga bulan Mei 2020, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Bali tercatat sebanyak lebih dari 88 ribu. Berbagai *merchant* QRIS tersebar di kalangan pedagang, tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah ataupun universitas hingga destinasi wisata. Di samping itu, pembayaran melalui QRIS tidak mutlak digunakan untuk transaksi komersial, penggunaan QRIS juga digunakan untuk e-retribusi pemda, donasi keagamaan, dan sosial. Penggunaan QRIS juga telah diimplementasikan di Samsat Pembantu Ubud Bali dan Pelabuhan Wisata Bangsal NTB. Pembayaran menggunakan QRIS Kantor Samsat Pembantu Ubud Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Selain itu, QRIS juga telah diimplementasikan di berbagai pasar tradisional, tempat ibadah, lembaga sosial, kantin sekolah, koperasi universitas, dan berbagai destinasi wisata.





BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% pada Februari 2020.
- Angka Kemiskinan Provinsi Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61%, menurun dibanding dengan periode September 2018 yang sebesar 3,91%.

GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Menurunnya kinerja perekonomian Bali berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal ini tercermin pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,19% (Februari 2019) menjadi 1,21% (Februari 2020). Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tengah menurunnya kesempatan kerja. TPAK tercatat meningkat dari 76,68% pada Februari 2019 menjadi 77,08% di Februari 2020. Sementara itu, indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 178 pada triwulan I 2019 menjadi 121 pada triwulan I 2020. Penurunan lebih dalam diprakirakan akan terjadi pada triwulan II 2020, sebagaimana terkonfirmasi pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Bali.

Kondisi kesejahteraan di Provinsi Bali secara umum terjaga, namun terdapat indikasi penurunan pada periode berjalan. Angka Kemiskinan Provinsi Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61%, menurun dibanding dengan periode September 2018 yang sebesar 3,91%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan. Namun demikian, terjadi indikasi penurunan kesejahteraan sebagaimana tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) dari 104,31 pada triwulan IV 2019 menjadi 96,67 pada triwulan I 2020. Gini ratio Provinsi Bali yang mengalami peningkatan juga menjadi tantangan bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Bali.

6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali

Sejalan dengan melambatnya kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada Februari 2020 juga menunjukkan penurunan. Hal ini terindikasi dari peningkatan jumlah pengangguran dari 30,3 ribu orang pada Februari 2019 menjadi 31,3 ribu orang pada Februari 2020. Peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang belum mampu diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja. Penduduk usia kerja di Bali pada Februari 2020 tercatat sebesar 3,36 juta orang atau meningkat sebesar 1,50% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pada bulan Februari 2019 yang sebesar 1,41% (yoy) atau sejumlah 3,31 juta orang. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2020 tercatat sebesar 2,59 juta orang atau tumbuh 2,03% (yoy). Kondisi tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan capaian pada Februari 2019 yang mengalami kontraksi sebesar 2,60% (yoy).

Penurunan kondisi sektor ketenagakerjaan pada periode Februari 2020, tercermin oleh meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perkembangan TPT di Bali pada periode yang sama tercatat menunjukkan

peningkatan dari sebesar 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% (yoy) pada Februari 2020. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh penurunan kesempatan kerja sebagaimana tercermin pada tren penurunan *job vacancy index*.

Peningkatan TPT dapat tertahan oleh peningkatan serapan tenaga kerja di lapangan usaha utama lainnya, yaitu konstruksi, transportasi, akomunikasi, jasa keuangan dan infokom (tabel 6.5).

Berdasarkan jenjang pendidikannya, penduduk yang paling banyak menganggur adalah lulusan setingkat diploma, tercatat sebesar 3,77%. Kemudian disusul



Sumber: Big Data Bank Indonesia

Grafik VI.1. Job Vacancy Index

Tabel VI.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA	2017		2018		2019		2020
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk Usia 15+ (Ribuan Orang)	3.212	3.236	3.266	3.289	3.312	3.339	3.362
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.469	2.434	2.607	2.525	2.540	2.466	2.591
Bekerja (Ribuan Orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.560
Pengangguran (Ribuan Orang)	31,61	36,14	22,35	34,49	30,26	37,55	31,33
Bukan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	743,10	801,11	658,77	763,55	772,39	872,54	770,67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,87	75,24	79,83	76,78	76,68	73,87	77,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19	1,52	1,21

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel VI.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Utama yang Ditamatkan

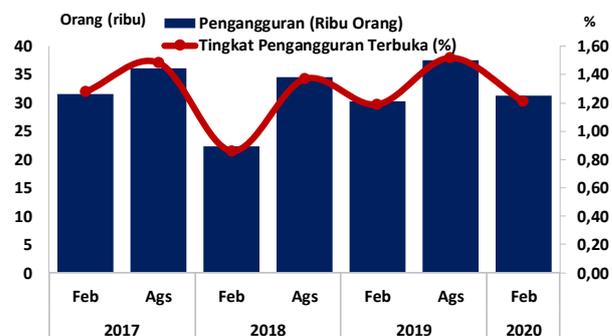
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (%)	1,06	0,77	0,37	0,52	0,56	0,54	0,37
SMA (%)	1,28	1,78	1,66	1,41	1,55	1,95	1,36
SMK (%)	1,06	2,69	1,19	3,14	2,01	2,89	2,42
Diploma I / II / III (%)	1,34	1,76	0,90	2,58	2,86	4,03	3,77
Universitas (%)	2,78	2,51	1,25	1,67	1,58	2,01	1,76
TOTAL	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19	1,52	1,21

Sumber: BPS Provinsi Bali

oleh penduduk dengan lulusan pendidikan setingkat SMK sebesar 2,42% dan penduduk dengan lulusan level pendidikan universitas sebesar 1,76%. Sementara TPT terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah sebesar 0,37%. Gambaran kondisi TPT ini, menunjukkan sulitnya penduduk bagi lulusan level pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Kondisi ini juga menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan sinergi dunia pendidikan dengan dunia usaha (pihak yang akan menyerap lulusan perguruan tinggi tersebut) perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan pola historisnya, TPT di periode Februari relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus setiap tahunnya. Kondisi tersebut terjadi karena pada periode Agustus terdapat periode kelulusan, sehingga banyak penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang baru lulus dan mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)²⁴ Provinsi Bali pada Februari 2020 menunjukkan peningkatan dibanding dengan periode yang sama tahun 2019.

TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 77,08% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2019 yang sebesar 76,68%. Peningkatan ini bersumber dari pekerja dengan jenjang pendidikan lulusan SMA dan Diploma. Lulusan SMA tercatat mengalami peningkatan TPAK dari 3,38% pada Februari 2019 menjadi 12,73% pada Februari 2020. Sedangkan lulusan Diploma tercatat mengalami peningkatan dari -0,91% pada Februari 2019 menjadi



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

24,48% pada Februari 2020.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas pekerja pada Februari 2020 merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Pada Februari 2020 pekerja dengan pendidikan tersebut tercatat sebanyak 827 ribu orang (pangsa 32,3%). Pekerja dengan tingkat pendidikan SMA menempati urutan kedua terbanyak sejumlah 589 ribu orang dengan pangsa sebesar 23%. Sementara pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan pekerja dengan jumlah yang paling kecil yakni 123 ribu orang dengan pangsa 4,8%.

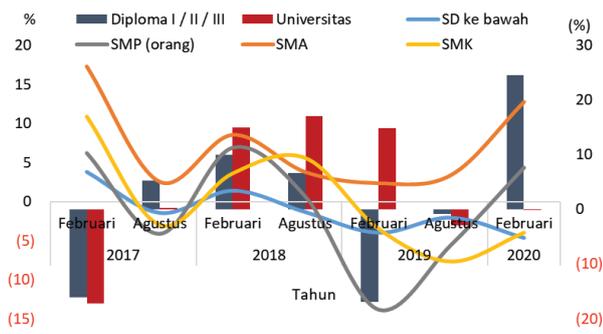
Bila ditinjau lebih lanjut terkait dengan jumlah jam kerja per minggu dari pekerja, jumlah pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) di Bali pada Februari 2020 tercatat sebanyak 1,83 juta orang, menurun sebesar -4,8% (yoy), kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan

Tabel VI.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SD ke bawah (orang)	890.927	844.455	903.376	833.132	867.499	816.134	827.309
SMP (orang)	392.097	350.330	419.033	352.504	361.098	332.986	376.730
SMA (orang)	469.762	507.370	509.748	526.395	521.608	544.163	587.987
SMK (orang)	344.514	320.617	367.301	350.877	354.471	317.437	339.423
Diploma I / II / III (orang)	108.491	110.239	119.259	117.516	99.133	116.444	123.404
Universitas (orang)	231.703	265.296	266.226	310.446	305.507	301.515	304.853
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316	2.428.679	2.559.706

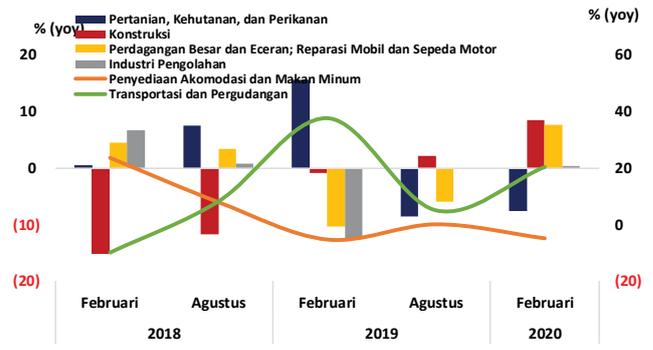
Sumber: BPS Provinsi Bali

24 TPAK merupakan indikator yang menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.



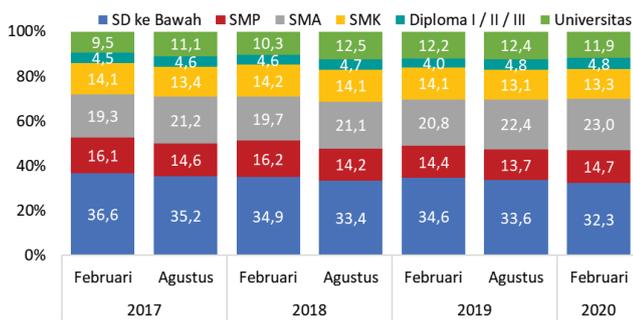
Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.3. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



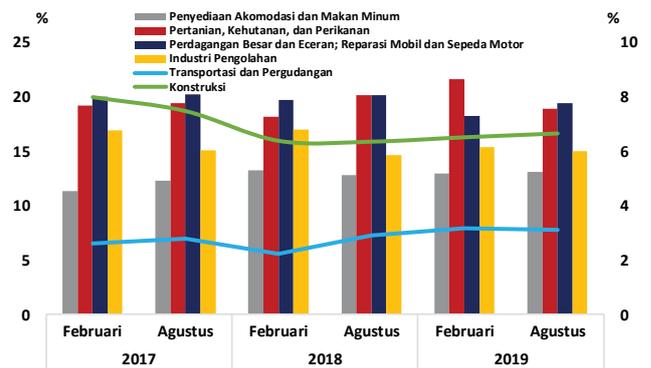
Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.5. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.4. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.6. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama

periode yang sama tahun 2019 sebesar -2,85% (yoy). Selanjutnya, dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat sebesar 71,48% merupakan pekerja penuh waktu, sementara sisanya sebesar 28,52% merupakan pekerja tidak penuh (antara 1-34 jam per minggu).

Komposisi tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja secara umum tercatat mengalami sedikit pergeseran.

LU pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, menggeser dominasi LU perdagangan. Pada Februari 2020, LU pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak, 19,60% dari total penduduk yang bekerja. LU perdagangan menempati posisi kedua dalam penyerapan tenaga kerja, dengan pangsa 19,23%. Selanjutnya lapangan usaha dengan

pangsa terbesar ketiga adalah industri pengolahan, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dengan pangsa 15,13%.

Sejalan dengan tertahannya kinerja pariwisata di awal tahun 2020, penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha yang terkait dengan bidang usaha pariwisata mengalami penurunan dibandingkan dengan awal tahun 2019. LU akmamin tercatat mengalami penurunan pangsa sebesar -0,88%. Penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada lapangan usaha pertanian sebesar -2,05.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2020 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan formal. Kondisi ini sedikit berbeda dibanding Februari 2019 di mana kelompok pekerja informal lebih

Tabel VI.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Penduduk yang Bekerja	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Pekerja Tidak Penuh							
Jumlah (orang)	635.294	550.541	606.812	583.676	587.624	605.581	730.136
%	26,06	22,96	23,47	23,43	23,42	24,93	28,52
Pekerja Penuh							
Jumlah (orang)	1.802.200	1.847.766	1.978.131	1.907.194	1.921.692	1.823.098	1.829.570
%	73,94	77,04	76,53	76,57	76,58	75,07	71,48
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316	2.428.679	2.559.706

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel VI.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribu Orang)

Lapangan Usaha 17 Sektor	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	468	466	470	501	543	458	502
Pertambangan dan Penggalian	5	7	5	6	14	10	7
Industri Pengolahan	413	362	440	365	386	364	387
Pengadaan Listrik dan Gas	3	5	4	6	4	6	6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2	6	4	6	5	12	5
Konstruksi	195	179	165	158	163	162	177
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	489	486	510	502	457	472	492
Transportasi dan Pergudangan	64	67	58	72	79	76	95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277	295	343	319	324	319	308
Informasi dan Komunikasi	8	10	15	8	11	12	6
Jasa Keuangan dan Asuransi	58	58	65	61	84	70	68
Real Estat	5	4	8	3	0	4	8
Jasa Perusahaan	43	55	42	58	54	57	69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128	117	144	138	120	124	120
Jasa Pendidikan	105	104	124	117	95	98	106
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42	48	56	50	38	54	53
Jasa lainnya	134	129	133	122	131	132	149
Jumlah	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.559

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

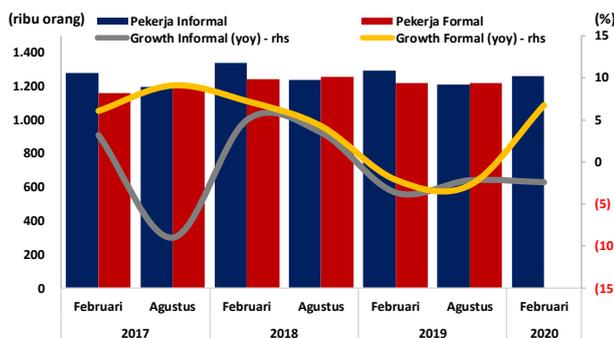
Tabel VI.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Ribu Orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Berusaha Sendiri (ribu orang)	379	354	404	349	385	403	404
Berusaha Dibantu Buruh (ribu orang)	408	372	440	407	443	366	417
Pekerja Bebas (ribu orang)	159	168	147	187	136	170	139
Pekerja Tak Dibayar (ribu orang)	331	301	350	293	328	270	301
Pekerja Informal (ribu orang)	1.277	1.194	1.341	1.236	1.292	1.209	1.261
Berusaha Dibantu Buruh (ribu orang)	93	100	103	110	92	91	102
Buruh/karyawan (ribu orang)	1.067	1.104	1.140	1.145	1.125	1.128	1.197
Pekerja Formal (ribu orang)	1.160	1.204	1.244	1.255	1.217	1.219	1.298
TOTAL (ribu orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.560

Sumber: BPS Provinsi Bali

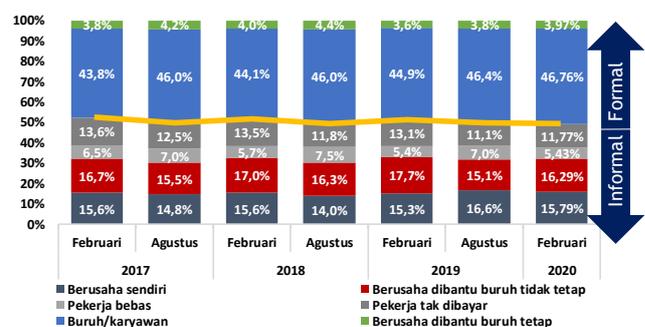
mendominasi. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,26 juta jiwa atau 49,27% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut turun sebesar 2,41% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2019 yang tercatat sebanyak 1,29 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,29 juta jiwa atau 50,7% dari total penduduk yang bekerja, atau mengalami peningkatan sebesar 6,70% (yoy) dibanding

dengan Februari 2019 yang tercatat sebesar 1,22 juta orang. Cukup tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal pada Februari 2020 mengindikasikan bahwa sektor informal cukup memudahkan tenaga kerja di Bali dalam mencari pekerjaan, karena sektor informal pada umumnya tidak mewajibkan persyaratan secara ketat terkait dengan latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu.



Sumber: BPS Provinsi Bali

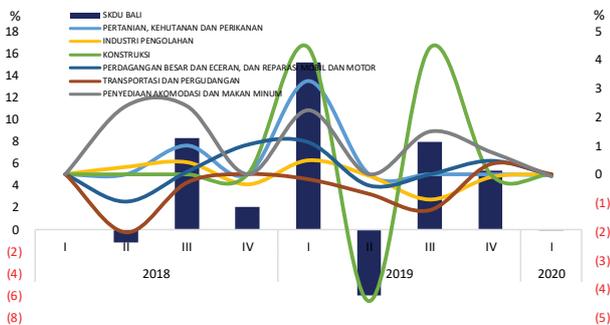
Grafik VI.7. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.8. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal

Menurunnya kondisi ketenagakerjaan juga tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI Provinsi Bali periode triwulan I 2020. Berdasarkan hasil survei tersebut, penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha di Bali secara umum menunjukkan penurunan dibanding dengan triwulan I 2019. Kondisi ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2020 yang tercatat -0,09%, menurun dibanding dengan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 15,17%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai SBT penggunaan tenaga kerja di beberapa lapangan usaha utama, antara lain akumulator, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, SBT industri pengolahan yang menunjukkan peningkatan, menahan laju penurunan SBT penggunaan tenaga kerja secara keseluruhan. Kondisi ketenagakerjaan diperkirakan akan berkontraksi lebih dalam pada triwulan II 2020. Hal ini sebagaimana tergambar pada perkiraan nilai



Sumber : SKDU, Bank Indonesia

Grafik VI.9. Hasil SKDU Triwulan IV 2019

Saldo Tertimbang Bersih untuk triwulan II 2020 sebesar -13,33%, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 maupun triwulan II 2019. Kondisi ini terutama disebabkan oleh perkiraan penurunan nilai SBT penggunaan tenaga kerja di lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha industri pengolahan.

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali

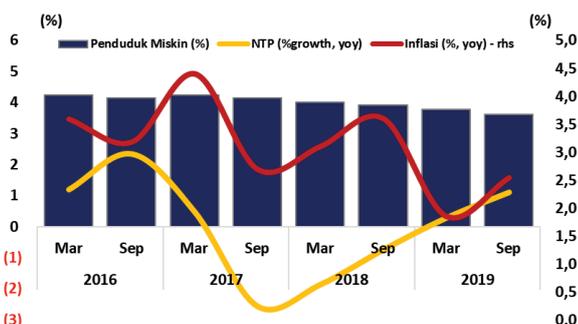
Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2019 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61%, atau sejumlah 156,91 ribu orang, menurun dibanding dengan periode Maret 2019 dan September 2018 yang masing-masing sebesar 3,79% (163,85 ribu orang) dan 3,91% (168,34 ribu orang). Bila dianalisis lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 91,12 ribu orang (3,04%), sementara di wilayah perdesaan sebesar 65,79 ribu orang (4,86%). Jumlah ini menurun dibanding Agustus 2018 yang masing-masing sebesar 3,36% dan 5,08%.

Penurunan angka kemiskinan didukung oleh pelaksanaan program bantuan sosial nontunai, berupa Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Adanya penambahan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga menambah kelompok penerima manfaat yang diikuti peningkatan nilai nominal pada tahun 2019, menjadi salah satu pendorong menurunnya tingkat kemiskinan tersebut.

Tabel VI.7. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2015 – 2019

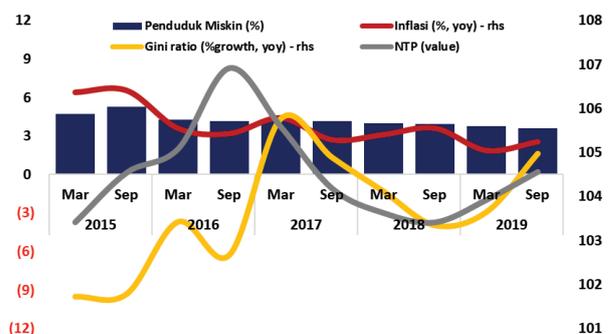
Keterangan	2017		2018		2019	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	180,13	176,48	171,76	168,34	163,85	156,91
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,25	4,14	4,01	3,91	3,79	3,61
- Kota	3,58	3,46	3,32	3,36	3,29	3,04
- Desa	5,45	5,42	5,38	5,08	4,88	4,86
Garis Kemiskinan (Rp)	361.387	364.064	382.598	388.451	400.624	412.906
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,55	0,69	0,52	0,54	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	1,12	1,18	0,12	0,11	0,10

Sumber: BPS Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.10. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali



Sumber: BPS

Grafik VI.11. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali

6.2.2. Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai angka kemiskinan suatu daerah, dilakukan analisis terkait dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indeks P1 mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh mana individu berada di bawah garis kemiskinan pada suatu daerah/wilayah (dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Sementara itu, indeks P2 menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan data September 2019, indeks P1 Provinsi Bali tercatat sebesar 0,50, membaik dibanding dengan September 2018 yang sebesar 0,52. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan non-miskin) masih berada 0,50% di bawah garis kemiskinan (Rp412.906 per kapita per bulan). Kondisi ini lebih baik dibanding kondisi pada September 2018. Membaiknya kondisi ini, didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat, tercermin antara lain oleh peningkatan NTP dan terjaganya daya beli masyarakat (inflasi yang melandai). Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks P2 juga mengalami penurunan, yaitu dari 0,12 pada September 2018, menjadi 0,10 pada September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali semakin menurun. Nilai P2 sebesar 0,10 menginformasikan bahwa besarnya deviasi total pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali terus mengecil. Keadaan ini mengkonfirmasi bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penurunan angka kemiskinan.

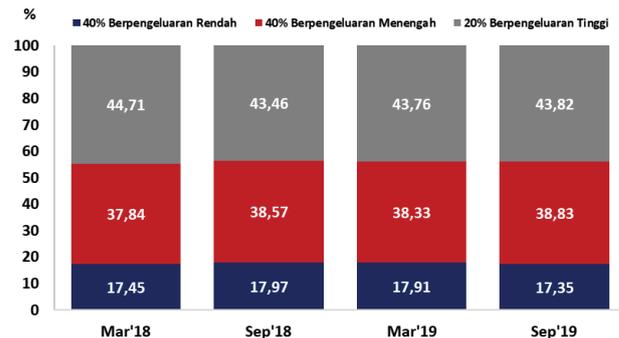
6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga dari sisi tingkat ketimpangannya, yang tercermin oleh indikator ratio gini. Di tengah penurunan angka kemiskinan di Bali dan melandainya inflasi, tingkat ketimpangan di Bali pada September 2019 menunjukkan peningkatan. Tingkat ratio gini Provinsi Bali tercatat sebesar 0,37 pada September 2019, meningkat dibanding dengan periode September 2018 yang tercatat 0,36. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antarpenduduk di Provinsi Bali. Berbagai upaya pemerintah (pusat dan daerah) yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam mengurangi kesenjangan/ketimpangan ekonomi ternyata belum sepenuhnya dapat mengurangi tingkat kesenjangan di Bali. Sementara itu, upaya pemerintah yang terus mendorong pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Sumber: BPS

Grafik VI.12. Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.13. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk

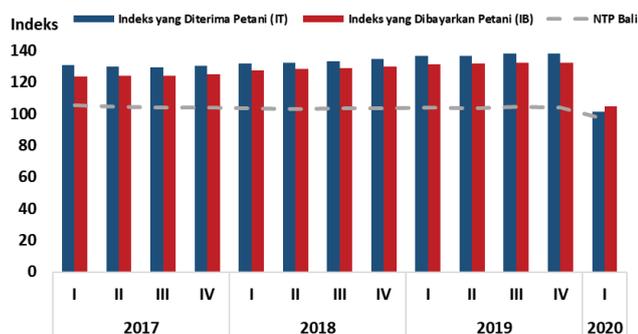
juga belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi terhadap capaian penurunan tingkat ketimpangan.

Peningkatan Ratio Gini Provinsi Bali pada September 2019, didorong oleh peningkatan pengeluaran kelompok 60% berpengeluaran menengah dan tinggi serta terjadinya penurunan pengeluaran kelompok 20% berpengeluaran rendah pada September 2019 dibanding dengan September 2018. Kondisi ini berdampak pada semakin meningkatnya jurang ketimpangan antara masyarakat yang memiliki pengeluaran tinggi dengan rendah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan disiapkan langkah-langkah nyata untuk mengatasinya.

6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

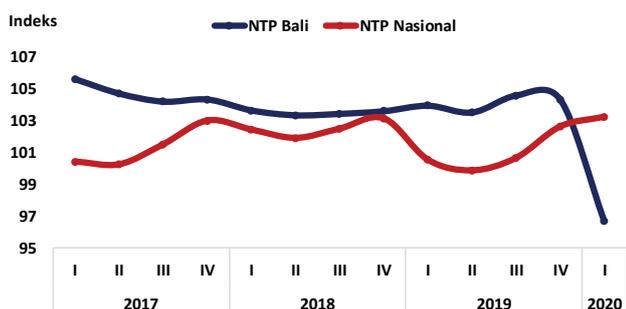
Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan, dapat terkonfirmasi oleh perkembangan indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

Sejalan dengan mata pencaharian masyarakat perdesaan yang terkonsentrasi pada lapangan usaha pertanian. Perkembangan NTP Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 96,67, menurun dibanding dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 104,31. Memasuki tahun 2020, penghitungan indeks NTP menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu 2018 = 100. Indeks NTP Provinsi Bali pada triwulan I tidak mencapai angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.14. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



Sumber: BPS Provinsi Bali

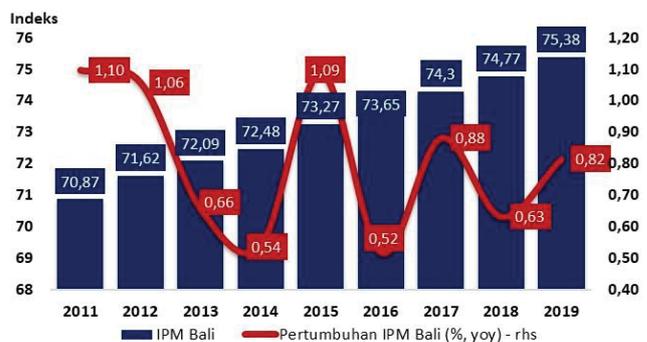
Grafik VI.15. Perbandingan NTP Bali dan Nasional

memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Dilihat dari subsektornya, terdapat 3 subsektor yang berada di bawah 100 yakni subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor hortikultura dan subsektor peternakan.

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

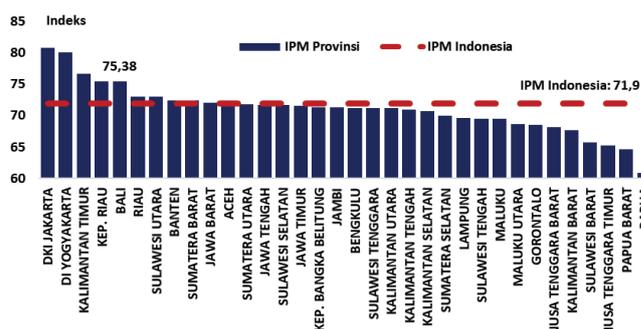
Perkembangan indikator pembangunan manusia di Bali semakin membaik, tercermin oleh peningkatan nilai IPM Bali pada tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu nilai IPM Bali yang berada di atas nasional dan tren yang meningkat juga menunjukkan membaiknya kondisi perkembangan kualitas pembangunan manusia di Bali. IPM Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar 75,38, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 74,77, dan lebih tinggi dibanding dengan IPM Nasional tahun 2019 yang sebesar 71,92. IPM Bali tersebut menempati urutan ke-5 di antara 34 provinsi di Indonesia.

Peningkatan IPM Bali pada tahun 2019, dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.16. Perkembangan IPM Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik VI.17. Perbandingan IPM Bali dan Nasional

Kapita. Pada tahun 2019, UHH Provinsi Bali mencapai 71,99 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,99 tahun. Nilai ini meningkat 0,31 tahun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 71,68 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan HLS dan RLS pada tahun 2019 masing-masing mencapai 13,27 tahun dan 8,84 tahun. Keadaan ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun (Diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibanding tahun 2018. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,84 tahun (kelas IX), lebih lama 0,19 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kedua indikator ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp14,15 juta per tahun atau meningkat Rp260 ribu dibanding dengan tahun 2018. Membaiknya kualitas pembangunan manusia di Bali tersebut juga didorong oleh berbagai program dari pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Bali.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BOKS 5 PENGENDALIAN RISIKO KEMISKINAN BALI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Penurunan kinerja pariwisata Bali berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Dua LU utama yang sangat terkait dengan sektor pariwisata yaitu LU akamin dan LU perdagangan menjadi LU utama yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Bali. Pada Februari 2020, kedua LU tersebut menyerap sekitar 31% penduduk Bali yang bekerja. Adanya tekanan kinerja pada LU yang berkaitan erat dengan pariwisata tentu akan berisiko pada penurunan pendapatan rumah tangga seiring dengan potensinya terjadinya PHK. Menurut data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, per Mei 2020, sebanyak 3.988 tenaga kerja di PHK dan 55.455 tenaga kerja dirumahkan sebagai dampak pandemi COVID-19. Sekitar 80% tenaga kerja yang terdampak COVID-19 tersebut bekerja di LU yang berkaitan erat dengan pariwisata.

Berdasarkan survei oleh Bank Indonesia Provinsi Bali terhadap rumah tangga, sebesar 78% rumah tangga yang disurvei mengalami penurunan pendapatan. Besarnya penurunan pendapatan tersebut bervariasi dari 8% hingga 31%. Seiring dengan penurunan pendapatan tersebut, rumah tangga yang disurvei meresponnya dengan mengurangi pengeluaran. Berdasarkan hal

tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga di Bali akan mengalami kontraksi pada triwulan II 2020, setelah tumbuh positif pada triwulan I 2020 (2,90%;yoy).

Dampak COVID-19 Pada Peningkatan Risiko Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada peningkatan risiko kemiskinan. Berdasarkan hasil riset *SMERU Research Institute*¹, pandemi COVID-19 berisiko meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil riset tersebut, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,2% di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, maka tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi meningkat dari 9,2% di September 2019 menjadi 9,7% di akhir 2020. Sementara itu, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 1,0% di tahun 2020, maka tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi meningkat hingga menjadi 12,37% di tahun 2020. Hasil simulasi dampak kinerja pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap 1% peningkatan pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan

1,4% peningkatan pada rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita (*vice versa*)². Dengan menggunakan asumsi yang sama, bisa dihitung juga potensi peningkatan risiko kemiskinan di Bali sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi Bali di tengah pandemi COVID 19. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2020 akan berada pada kisaran -7,3% hingga -5,9% (yoy), maka kemiskinan di Bali berpotensi meningkat berada pada kisaran 6-10% di tahun 2020. Namun, perlu dicatat bahwa potensi peningkatan kemiskinan ini bisa terjadi apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan intervensi untuk menahan penurunan konsumsi rumah tangga.

Kebijakan Pemerintah dalam Menahan Risiko Peningkatan Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19

Potensi peningkatan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 telah ditekan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal. Pemerintah Pusat membuat kebijakan stimulus fiskal dengan memperluas program bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Program Sembako. Untuk PKH dan Program Sembako, Pemerintah meningkatkan baik jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun nominal bantuan³. Untuk Provinsi Bali, jumlah KPM untuk PKH meningkat dari 79.051 menjadi 86.564 KPM. Sementara itu, KPM Program Sembako meningkat dari 127.217 menjadi 193.199 KPM.

ASPEK	BALI
SKEMA BANTUAN	Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 600rb / KK / Bulan Bantuan Sembako Rp 600rb / KK/ Bulan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 150rb – 160rb / KK / Bulan
SASARAN PENERIMA	Net Coverage: 266.163 KK • Masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JP5 Pusat seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan
JUMLAH DANA	Net Amount: Rp 261 Miliar
SUMBER PENDANAAN	1. Dana Desa APBN 2. Dana Desa Adat dari APBD Semesta Berencana
MEKANISME	Setiap bulan selama 3 BULAN (April-Juni 2020) Pembagian BST dilakukan melalui: 1. Transfer ke akun rekening yang dapat dicairkan di ATM/Kantor Bank 2. Kantor Pos Indonesia

Gambar V.1. Program Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah Bali

Upaya untuk menekan potensi peningkatan kemiskinan sebagai dampak penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Bali juga membuat kebijakan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial yaitu dalam bentuk 3 skema bantuan sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako, serta Bantuan Langsung Tunai. Total penerima dari ketiga program bantuan sosial tersebut mencapai 266.163 kepala keluarga. Program bantuan sosial tersebut disalurkan selama tiga bulan (April-Juni 2020) dengan nominal masing-masing berkisar dari Rp150.000 hingga Rp600.000 per bulan. Total anggaran yang digunakan untuk program tersebut mencapai Rp261 miliar.

Dengan adanya program bantuan sosial, risiko peningkatan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 diharapkan tidak terjadi. Program bantuan sosial diharapkan dapat menahan penurunan konsumsi masyarakat sehingga jumlah masyarakat miskin tidak bertambah. Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial menjadi penting dalam menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah.

Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Untuk Menekan Peningkatan Kemiskinan Di Tengah Pandemi COVID -19

Efektivitas program bantuan sosial untuk menahan risiko peningkatan kemiskinan sangat bergantung pada akurasi data penduduk miskin dan juga pada koherensi antarprogram. Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) menggunakan *database* "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)" untuk data penduduk miskin yang menjadi target pada program jaminan sosial termasuk program bantuan sosial. Kualitas data tersebut bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengkinian data penduduk miskin. Menurut data Kementerian Sosial, baru 50% kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif melakukan pengkinian data tersebut. Kabupaten/kota di Bali sudah secara aktif melakukan pengkinian data tersebut. Adanya sistem banjar di Bali sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengkinian data kemiskinan tersebut. Dengan data kemiskinan yang cukup akurat di Bali, diharapkan program bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah mampu menekan potensi peningkatan kemiskinan di Bali akibat pandemi COVID-19.

2 Nilai koefisien korelasi ini diperoleh dari hasil estimasi model ekonometrik menggunakan data *time series* pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pengeluaran RT per kapita dari tahun 1980 hingga 2019.
 3 Untuk PKH, nominal bantuan meningkat 25%. Untuk Program Sembako nominal bantuan meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan.

Selain itu, koordinasi antara program bantuan sosial juga diperlukan sehingga penerima program tersebut tidak tumpang tindih satu sama lain. Dengan data yang akurat dan kriteria penerima program yang berbeda-beda, berbagai jenis program bantuan sosial dapat menjangkau jumlah penduduk miskin yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah tidak tumpang tindih dengan penerima program bantuan sosial pemerintah pusat. Dengan demikian, program bantuan sosial bisa mencakup lebih banyak masyarakat dan lebih efektif dalam menekan potensi peningkatan kemiskinan akibat pandemi COVID-19.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan berkontraksi dan berada dalam kisaran -9,49% s/d -9,09% (yoy), sedikit membaik dibanding dengan prakiraan triwulan II 2020.
- Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding dengan 2019, dan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy).

GAMBARAN UMUM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan terkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s.d -9% (yoy), sedikit membaik dibanding prakiraan triwulan II 2020 yang sebesar -9,5% s.d -9,1% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali diperkirakan terkontraksi dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,63% (yoy). Sejalan dengan perkiraan kontraksi perekonomian pada triwulan mendatang dan keseluruhan tahun 2020, tekanan inflasi diperkirakan menurun. Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding dengan tahun 2019, dan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Berdasarkan disagregasinya, penurunan tekanan inflasi pada tahun 2020, terutama bersumber dari core inflation dan administered price, sementara kelompok volatile food diperkirakan akan meningkat dalam skala terbatas. Kecukupan pasokan komoditas pokok dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID diprakirakan akan berkontribusi terhadap terkendalinya risiko inflasi tahun 2020.

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2020

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan terkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s.d -9% (yoy), sedikit membaik dibanding prakiraan triwulan II 2020 yang sebesar -9,5% s.d -9,1% (yoy). Dari sisi permintaan, membaiknya perekonomian didorong oleh peningkatan aktivitas Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) dan pemerintah. Sementara ekspor luar negeri, investasi dan konsumsi Rumah Tangga (RT) masih terkontraksi. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi bersumber dari peningkatan lapangan usaha (LU) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi/perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sisi Permintaan

Ekspor Bali diperkirakan masih mengalami kontraksi pada triwulan III 2020. Kondisi ini terutama disebabkan oleh masih terkontraksinya ekspor jasa seiring belum pulihnya kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada triwulan III 2020. UNWTO memprediksi pertumbuhan *global tourism* masih tertahan akibat dampak pandemi COVID-19. Negara-negara asal wisman utama Bali (Australia, China, Jepang, Korea Selatan) berencana untuk membuka mobilitas antar negara secara bertahap, dan diprediksi masih belum dapat terimplementasi sepenuhnya pada triwulan III 2020.

Dari sisi investasi, kontraksi diperkirakan masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penundaan/pembatalan sejumlah investasi pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintah, penundaan sejumlah proyek fisik pemerintah terjadi akibat adanya *refocusing* anggaran dan penurunan pagu belanja modal. Dari sisi swasta,

pengusaha cenderung bersikap *wait and see* menunggu perkembangan pandemi baik secara global, nasional dan domestik. Disamping itu, kapasitas produksi perusahaan di Bali masih cenderung mencukupi, sehingga belum terdapat urgensi untuk melakukan investasi.

Konsumsi RT masih terkontraksi sebagai dampak belum membaiknya sektor pariwisata. Pendapatan rumah tangga di Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata mengingat angkatan kerja di Bali sebagian besar bekerja pada lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan akmamin yang sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Meskipun sebagian besar rumah tangga sudah mulai beralih profesi ke sektor pertanian maupun transportasi, optimisme konsumen tetap dalam tren menurun. Hal ini menahan jumlah konsumsi, terutama bahan tahan lama. Kondisi ini tercermin pada tren penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama.

Laju kontraksi diperkirakan tertahan oleh pertumbuhan positif Konsumsi LNRT dan Konsumsi Pemerintah. Kedua komponen tersebut diperkirakan tumbuh positif, membaik dibandingkan triwulan II 2020 seiring dengan bertambahnya penyaluran bansos dan pembelian barang dan jasa untuk penanganan COVID-19



Sumber : Survei Konsumen KPw BI Provinsi Bali

Grafik VII.1. Indeks Ekspektasi Konsumen

di Provinsi Bali. Pemerintah Bali memberikan bansos tunai dan bansos sembako masing-masing sebesar Rp600.000/ KK. Disamping itu, terdapat skema bantuan langsung tunai sebesar Rp150.000.

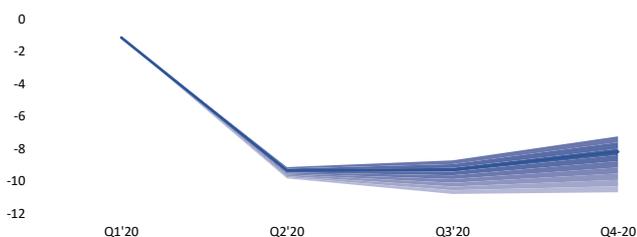
Sisi Penawaran

Prakiraan kontraksi kinerja ekonomi Bali di triwulan III 2020 dari sisi penawaran bersumber dari seluruh lapangan usaha, kecuali jasa kesehatan yang masih mencatat pertumbuhan positif. Prakiraan kontraksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi:

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang masih terkontraksi pada triwulan III 2020.
- Belum membaiknya optimisme pelaku usaha triwulan III 2020 yang menyebabkan penundaan investasi baik bangunan fisik dan nonfisik.
- Belum membaiknya optimisme dan pendapatan konsumen menahan kinerja sektor perdagangan, terutama perdagangan bahan tahan lama.
- Masih berlakunya kebijakan penanganan COVID-19 berupa pembatasan mobilitas/pembatasan sosial di Bali pada awal triwulan III 2020 menyebabkan produktivitas perekonomian belum pulih sepenuhnya pada triwulan III 2020.
- Berlalunya periode panen padi pada sebagian besar daerah lumbung pangan di Bali, yang terjadi pada bulan April s/d Mei 2020.

7.1.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2020

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, **prompt indikator, hasil survei dan liaison terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi.** Kontraksi kinerja ekonomi Bali terutama disebabkan oleh meluasnya pandemi COVID-19 hingga Pemerintah RI mengumumkan status kedaruratan pada 31 Maret 2020. Berbagai kebijakan penanganan COVID-19 baik secara global,



Sumber : BPS

Keterangan : Proyeksi Triwulan II, III dan IV Proyeksi KPw BI Provinsi Bali

Grafik VII.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2020

nasional dan domestik berdampak terhadap kontraksi kinerja ekonomi Bali. Dari sisi permintaan kontraksi terutama disebabkan oleh pertumbuhan negatif ekspor luar negeri, investasi, dan konsumsi RT. Sementara itu dari sisi LU, kontraksi kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh penurunan kinerja hampir seluruh lapangan usaha. Hanya lapangan usaha jasa kesehatan dan pertanian yang diperkirakan akan mencatat pertumbuhan positif.

Permintaan

Kinerja ekspor luar negeri Bali yang didominasi oleh kinerja ekspor jasa, diperkirakan mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah negara mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas baik di dalam maupun luar negeri (*lockdown*), termasuk di negara asal wisman utama Bali. Kondisi ini menyebabkan terpukulnya ekspor Provinsi Bali, khususnya ekspor jasa. Kunjungan wisman Bali diperkirakan akan terkontraksi -49% (skenario moderat) s/d -80% (skenario sangat berat). Hal ini sejalan dengan skenario kontraksi wisman global oleh *World Tourism Organization* (UNWTO) yang sebesar -60% s/d -80% pada tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, ekspor komoditas juga diperkirakan akan mengalami kontraksi, seiring dengan perkiraan penurunan ekonomi global dan mitra dagang utama Provinsi Bali. Terganggunya jalur distribusi komoditas ekspor Bali akibat COVID-19 juga menjadi kontributor atas perkiraan kontraksi komoditas ekspor Provinsi Bali.

Kinerja Investasi pada tahun 2020 diperkirakan terkontraksi. Kondisi ini disebabkan oleh penundaan sejumlah proyek fisik yang diinisiasi oleh pemerintah seperti bendungan, proyek jalan, serta proyek infrastruktur lainnya. Kebijakan *refocusing/realokasi* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan kebijakan penghematan anggaran menyebabkan tertundanya proyek fisik tersebut. Dari sisi swasta terjadi sejumlah penundaan proyek investasi bangunan, terutama di sektor pariwisata. Disamping itu, investasi nonbangunan juga cenderung melambat. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan optimisme investor pada masa pandemi COVID-19. Investor cenderung bersikap *"wait and see"*, menunggu kepastian berakhirnya pandemi. Hal ini terkonfirmasi dari skala *likert* ekspektasi investasi hasil liaison KPw BI Provinsi Bali yang menunjukkan penurunan pada tahun 2020.

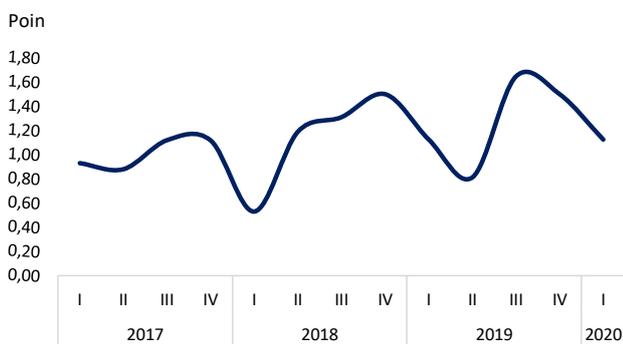
Kinerja konsumsi RT diperkirakan terkontraksi sebagai dampak penurunan kinerja sektor pariwisata. Penurunan kinerja sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya

Tabel VII.1. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Bali 2020-2021

Negara	Pangsa Nilai Ekspor Barang Luar Negeri Bali Tw IV 2019 (%)	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)				
		2017	2018	2019	2020*	2021*
Amerika Serikat	30.22	2.37	2.93	2.33	(5.91)	4.74
Australia	11.03	2.46	2.73	1.85	(6.67)	6.11
Singapura	9.16	4.34	3.44	0.73	(3.47)	2.96
Tiongkok	7.93	6.95	6.75	6.11	1.18	9.21
Jepang	5.97	2.17	0.32	0.65	(5.16)	3.01
Hong Kong	4.29	3.79	2.86	(1.19)	(4.82)	3.91
World Output		3.81	3.60	2.90	(3.00)	5.80

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF)

Keterangan :*) angka proyeksi IMF update Januari 2020



Sumber : Liaison KPw BI Provinsi Bali

Grafik VII.3. Skala Likert Investasi (One Year Projection)

bekerja pada LU terkait sektor pariwisata. Hasil survei²⁵ Kantor Perwakilan Bank Indonesia terhadap konsumen di Provinsi Bali menunjukkan mayoritas rumah tangga mengalami penurunan pendapatan (30-60%) akibat COVID-19. Sebagian besar responden (>70%) merespon penurunan pendapatan dengan mengurangi pengeluaran, khususnya barang tahan lama. Hal ini juga terkonfirmasi dari indeks keyakinan konsumen serta indeks pembelian barang tahan lama hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Bali yang menunjukkan tren penurunan. Kontraksi konsumsi RT yang lebih dalam tertahan oleh sejumlah bantuan sosial yang dikururkan oleh pemerintah. Pada masa pandemi pemerintah memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sosial nontunai (Program Keluarga Harapan/ PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), yang diikuti oleh peningkatan nilai nominal. Pemerintah Provinsi Bali melakukan realokasi anggaran senilai Rp261 miliar untuk

Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang belum menerima bantuan pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2020 diperkirakan masih tumbuh positif namun menurun dibanding tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang terutama bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran. Pagu PAD diperkirakan akan mengalami penurunan 40% pada tahun 2020. Disamping itu, *reposturing* Transfer Ke Daerah dan Dana Desa juga akan menyebabkan penurunan pagu pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan penurunan pagu belanja anggaran, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah.

Penawaran

Kinerja lapangan usaha akmamin dan transportasi pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi terdalam dibandingkan dengan LU lainnya. Kondisi ini terjadi seiring dengan perkiraan terkontraksinya wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik di tahun 2020 akibat dampak COVID-19. Dampak terhadap industri sudah mulai terlihat semenjak pertengahan April 2020, dimana sejumlah hotel dan restoran telah mengentikan sementara operasionalnya. Hasil survei persepsi bisnis kepada perusahaan yang bergerak di lapangan usaha makan dan minum mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan berpersepsi bahwa kontraksi wisman akan terjadi dalam waktu 6 s/d 9 bulan, dan berangsur pulih mulai triwulan IV 2020.

25 Survey dilakukan kepada rumah tangga di Provinsi Bali pada April 2020 dengan metode wawancara langsung. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik demografi populasi.

Kinerja sektor konstruksi pada tahun 2020 juga diperkirakan akan mengalami kontraksi. Kondisi ini disebabkan oleh penundaan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur pada tahun 2020 termasuk pembangunan bendungan, *shortcut* jalan, pengembangan kawasan pariwisata Bali Utara dan pengembangan Bandara Ngurah Rai. Seiring dengan itu, kondisi ini juga disebabkan oleh penurunan optimisme pelaku usaha. Kontraksi lebih dalam tertahan oleh masih berlanjutnya proyek pengembangan pelabuhan Benoa (PELINDO III).

Kinerja sektor pertanian diperkirakan masih dapat tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LU pertanian diperkirakan masih dapat tumbuh positif karena rendahnya dampak kebijakan pembatasan mobilitas/sosial terhadap sektor ini. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan sedikit melambat disebabkan oleh kecenderungan penurunan harga komoditas pertanian ditengah melandainya permintaan.

7.1.3. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Ke depan, berbagai risiko pertumbuhan ekonomi tetap perlu menjadi perhatian. Isu kesehatan yang terjadi saat ini berisiko berkepanjangan dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global, nasional dan domestik. Jika pandemi COVID-19 tidak di tangani secara tepat, kegiatan ekonomi akan semakin berkontraksi. Di Provinsi Bali, berbagai tantangan penanganan COVID-19 dan pemulihan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian.

Bank Indonesia memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk mitigasi dampak COVID-19. Langkah tersebut terdiri atas (i) Penurunan suku bunga BI7DRR (ii) Stabilisasi nilai tukar Rupiah (iii) Pasar uang dan valas (iv) Pelonggaran likuiditas (v) Pelonggaran makroprudensial (vi) mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital.

7.2. PROSPEK INFLASI BALI

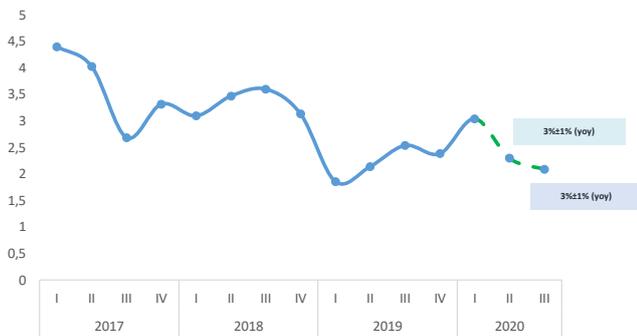
7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan III 2020

Tekanan Inflasi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan sedikit melandai dibandingkan dengan prakiraan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi terutama bersumber dari masih rendahnya tekanan permintaan, terutama barang tahan lama. Disamping itu, mulai melandainya harga komoditas emas dunia berpengaruh terhadap harga emas perhiasan domestik. Sementara itu, tekanan kelompok barang yang diatur pemerintah cenderung stabil. Melandainya tekanan

inflasi tertahan oleh peningkatan beberapa komoditas pada kelompok bahan pangan seiring dengan mulai berakhirnya musim panen komoditas beras. Disamping itu, gelombang tinggi pada periode Juli s/d September 2020 diperkirakan akan mempengaruhi harga produk perikanan.

Meskipun terdapat resiko kenaikan inflasi dari sisi bahan pangan, namun melalui koordinasi dan kerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tingkat inflasi Bali pada triwulan III 2020 diprakirakan dapat tetap terkendali. Upaya TPID se-Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dan beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk melakukan pengendalian inflasi melalui:

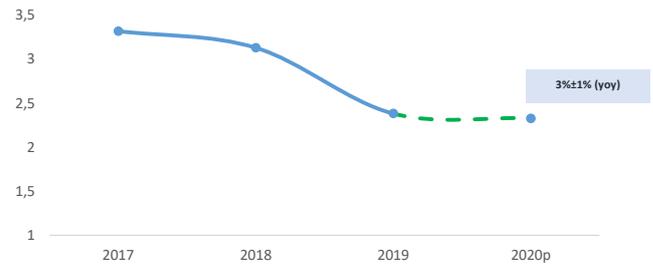
- Kerjasama dalam rangka pengembangan demplot dan pemanfaatan teknologi pangan, termasuk diantaranya pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan antara lain: pengembangan Teknologi sistem Salibu (tanam sekali panen berkali-kali) serta pengembangan SRI (*System Rice Intensification*) untuk pertanian organik dan peningkatan kualitas produksi pangan serta pengembangan pertanian hidroponik perkotaan (*Urban Farming*).
- Optimalisasi program peningkatan produksi melalui pemberian subsidi pupuk organik dan anorganik, bantuan alsintan (olah tanah, tanam, panen), pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pemberian subsidi pajak oleh beberapa kabupaten, Peraturan Daerah (PERDA) mengenai buah lokal, serta asuransi pertanian.
- Program kerjasama antarkabupaten/kota yang mengalami surplus di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis. Sejalan dengan itu, mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan. Implementasi peraturan Gubernur Bali No.99 tahun 2018 mengenai pemanfaatan dan pemasaran produk lokal, merupakan upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
- Upaya pengendalian inflasi daging ayam ras dan telur ayam: (a) pembinaan usaha agribisnis dan monev kelompok pengolah hasil ternak; (b) pembinaan dan lomba kelompok petani ternak; (c) pelatihan Pemuda Tani; dan (d) pengembangan agribisnis pedesaan.
- Mendorong intensifikasi agar terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil produksi.
- Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, antara lain melalui optimalisasi peran swasta dan BUMD.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan p: Angka Proyeksi BI

Grafik VII.4. Proyeksi Inflasi Bali Triwulan I- III 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik VII.5. Proyeksi Inflasi Bali 2020

- Rencana pengembangan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD) antar Bali dengan daerah sumber pasokan khususnya di Wilayah Jawa, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berpotensi mendorong ketersediaan pasokan pada tingkat harga yang wajar.

7.2.2. Perkiraan Inflasi 2020

Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan terkendali dan akan berada dalam kisaran **3%±1% (yoy)**. Penurunnya tekanan inflasi pada tahun 2020 terjadi seiring dengan melandainya permintaan sebagai dampak kontraksi perekonomian Bali secara keseluruhan. Disamping itu, penurunan tekanan inflasi juga disebabkan oleh menurunnya harga angkutan udara sebagai dampak kebijakan pembatasan mobilitas/pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Sementara itu, tekanan kelompok bahan pangan diperkirakan akan sedikit meningkat, didorong oleh risiko hambatan distribusi pada pelaksanaan kebijakan pembatasan mobilitas/pembatasan sosial. Disamping itu, risiko tekanan peningkatan biaya-biaya usaha tani sesuai dengan pola historisnya (biaya sarana dan prasarana produksi termasuk biaya buruh tani), berpotensi mendorong peningkatan harga jual gabah, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan harga jual beras.

Dalam rangka mengantisipasi risiko kenaikan harga pangan, Provinsi Bali, telah melakukan beberapa kegiatan dan program sebagaimana tertuang dalam *roadmap* pengendalian inflasi. Upaya yang dilakukan dalam kerangka *roadmap* pengendalian inflasi meliputi: 1) peningkatan produksi tabama dengan upaya intensifikasi produk pangan dan program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GPPTT) serta Program Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB), 2) upaya TPID dalam menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali, melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah, dan 3) penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system*. Diharapkan melalui kegiatan dan program tersebut, volatilitas harga kelompok bahan makanan dapat ditahan. Sejalan dengan itu, TPID provinsi dan kabupaten/kota juga terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sumber pasokan, khususnya dengan Jawa Timur.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered Price (AP)</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Cash Inflows</i>	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
<i>Cash Outflows</i>	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Ekspor	Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Nonfundamental	Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>).
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.
Impor	Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Inflasi	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>).
Inflasi Inti	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Investasi	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>administered prices</i> dan <i>volatile food</i>).
Kliring	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kualitas Kredit	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Liaison	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
	Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

mtm (<i>month to month</i>) Net Cashflows	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya. Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama yang terdiri dari: <i>net cash outflows</i> bila <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan dengan <i>cash inflows</i> , dan <i>net inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
qtq (<i>quarter to quarter</i>)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor Ekonomi Dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>yoy (year on year)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Trisno Nugroho

Koordinator Penyusun

Rizki Ernadi Wimanda

Editor

M. Setyawan Santoso

Tim Penulis

Christina Irawadi

Riyan Hidayat

Teresa Maria Gabriella Hutabarat

Dea Woro Rinujit

Hastomo Ardy

Kontributor

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Produksi dan Distribusi

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988